



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1817, 2018

BAPPENAS. Pemutakhiran RKP Tahun 2019.

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kementerian/Lembaga telah melakukan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Pasal 43 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

- Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
 10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
 11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019.

Pasal 1

- (1) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 merupakan dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 yang didasarkan pada penetapan Undang Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pemutakhiran terhadap:
 - a. Kerangka Ekonomi Makro dan arah kebijakan fiskal;
 - b. Sasaran dan Target Pengembangan Wilayah;
 - c. Integrasi Pendanaan;
 - d. Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan;
 - e. Sasaran, Indikator, dan Target Prioritas Pembangunan Nasional; dan
 - f. Sasaran, Indikator, Target, dan Arah Kebijakan Pembangunan Bidang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019.

Pasal 2

- (1) Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh:

- a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai instrumen pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan nasional; dan
 - b. menteri/kepala lembaga untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga Tahun 2019.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melaporkan pelaksanaan pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 kepada Presiden.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

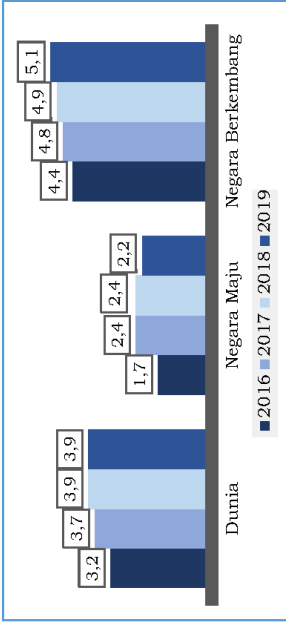
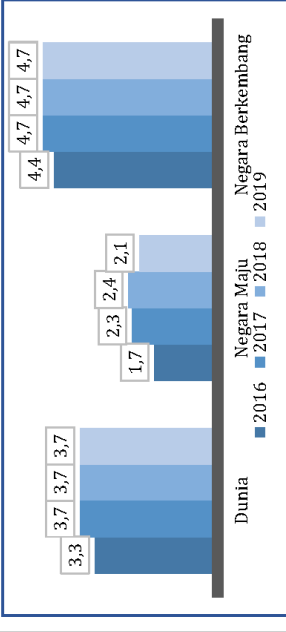
WIDODO EKATJAHJANA

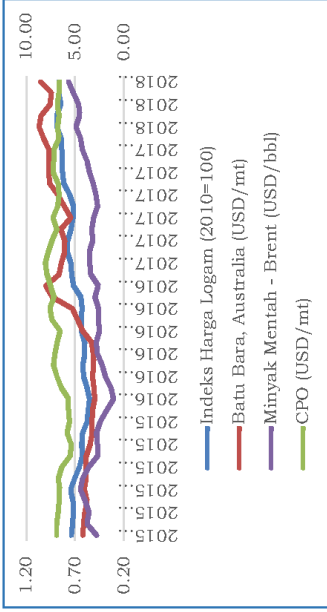
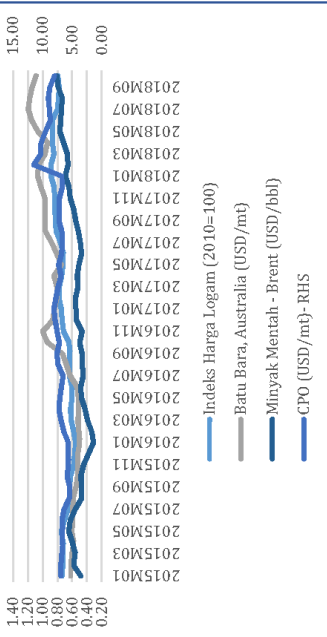
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

RESUME PEMUTAKHIRAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

M - 1

MATRIKS SUBSTANSI PEMUTAKHIRAN RKP 2019

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
<p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Subbab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro Subbab 2.2.1. Perkembangan Ekonomi Terkini Subbab 2.2.1.1. Perekonomian Global</p>			
1.	Perekonomian Global (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.6)	Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 mengalami peningkatan terbesar dalam 5 (lima) tahun terakhir, meningkat 0,5 persen poin.	Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 mengalami peningkatan terbesar dalam 5 (lima) tahun terakhir, meningkat menjadi 0,4 persen poin dibandingkan tahun 2016 menjadi sebesar 3,7 persen.
2.	Perekonomian Global (Perubahan data pada Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Halaman II.6)	 <p>Sumber: IMF, Juli 2018</p>	 <p>Sumber: IMF, Oktober 2018</p>
3.	Perekonomian Global (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.6)	Siklus meningkatnya pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2018. Optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi global didorong terutama oleh aktivitas perekonomian negara maju yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi	Pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan akan bergerak stabil pada tahun 2018. Stabilitasnya pertumbuhan ekonomi global didorong terutama oleh aktivitas perekonomian negara maju yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi.
4.	Pertumbuhan ekonomi global terutama di kawasan Asia (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.6)	... di atas rata-rata negara berkembang sebesar 4,9 persen.	Sementara itu, negara berkembang tetap akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi global terutama di kawasan Asia yang diperkirakan mampu tumbuh 6,5 persen pada tahun 2018, di atas rata-rata negara berkembang sebesar 4,7 persen.
5.	Pertumbuhan ekonomi global Pada tahun 2018 (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.6)	... pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,9 persen.	Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,7 persen.

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
6.	Pertumbuhan ekonomi global Amerika Serikat (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.7)	Pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2017 sebesar 2,3 persen....	Pertumbuhan ekonomi AS pada tahun 2017 sebesar 2,2 persen mengalami akselerasi dibandingkan pada tahun 2016 yang hanya sebesar 1,5 persen.
7.	Tingkat pengangguran AS (Perubahan narasi dan data pada Paragraf 2, Halaman II.7)	Sementara itu, pasar tenaga kerja AS semakin ketat ditandai dengan pengangguran yang turun mencapai titik terendah sejak tahun 2000, yaitu sebesar 4,0 persen pada bulan Juni 2018. Kondisi tersebut mendorong <i>The Fed</i> kembali menaikkan <i>Fed Fund Rate</i> (FFR) di bulan Maret dan Juni, serta diperkirakan akan kembali menaikkan minimal dua kali pada sisa tahun 2018	Sementara itu, pasar tenaga kerja AS semakin ketat ditandai dengan tingkat pengangguran yang turun mencapai titik terendah sejak tahun 2000, yaitu sebesar 3,7 persen pada bulan Oktober tahun 2018. Kondisi tersebut mendorong <i>The Fed</i> kembali menaikkan <i>Fed Fund Rate</i> (FFR) di bulan Maret, Juni, dan September serta diperkirakan akan kembali menaikkan sekali lagi pada bulan Desember tahun 2018.
8.	Harga komoditas dunia (Perubahan narasi pada Paragraf 7, Halaman II.7)	Ke depan, risiko kenaikan harga minyak dunia berasal dari kemungkinan berlanjutnya pembatasan produksi negara OPEC dan keputusan AS untuk keluar dari kesepakatan nuklir dengan Iran (Gambar 2.2).	Harga minyak dunia mengalami penurunan sejak Oktober 2018, didorong oleh produksi <i>shale oil</i> AS yang meningkat, penurunan permintaan global seiring dengan pertumbuhan yang menurun, dan sanksi Iran yang lebih ringan dari perkiraan. (Gambar 2.2).
9.	Perkembangan Harga Komoditas Global (Perubahan data pada Gambar 2.2. Perkembangan Harga Komoditas Global, Halaman II.8)	 <p>Sumber: <i>World Bank</i>, Juli 2018</p>	 <p>Sumber: <i>World Bank</i>, Oktober 2018</p>
10.	Batu bara (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.8)	Harga batu bara masih pada tingkat yang tinggi hingga bulan Mei tahun 2018 didorong oleh peningkatan permintaan yang tinggi di RRT	Harga batu bara masih pada tingkat yang tinggi hingga bulan Oktober tahun 2018 didorong oleh peningkatan permintaan yang tinggi di RRT.
11.	Logam dan mineral (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.8)	Sementara itu, harga logam dan mineral juga mengalami tren yang meningkat pada awal tahun 2018 didorong kombinasi permintaan yang meningkat dan terbatasnya produksi pada beberapa jenis logam atau mineral.	Harga minyak kelapa sawit (CPO) terus mengalami penurunan sejak awal tahun. Penurunan tersebut didorong oleh kelebihan pasokan di pasar dunia seiring dengan turunnya permintaan dari negara Uni Eropa yang mulai beralih ke minyak biji bunga matahari. Sementara itu, harga logam dan mineral mengalami tren yang meningkat pada awal tahun 2018 didorong kombinasi permintaan yang meningkat dan terbatasnya produksi

M - 3

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																												
			pada beberapa jenis logam atau mineral.																																																												
12.	Pertumbuhan PDB sisi permintaan 2016-2018 (perubahan data dan narasi pada Paragraf 3, Halaman II.8)	Sebaliknya, konsumsi masyarakat tumbuh melambat yakni sebesar 4,9 persen (yoy) dibawah pertumbuhan rata-rata selama lima tahun terakhir sekitar 5,0 persen. Konsumsi LNPRT tumbuh 6,9 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 seiring dengan pemilihan kepala daerah serentak di daerah kontributor utama ekonomi nasional yakni DKI Jakarta dan Banten. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 2,1 persen (yoy), mengalami akselerasi seiring dengan perbaikan kondisi fiskal pemerintah (Tabel 2.2).	Konsumsi rumah tangga dan LNPRT tumbuh 5,0 persen (yoy) pada tahun 2017. Dari angka tersebut, konsumsi rumah tangga tumbuh melambat yakni sebesar 4,9 persen (yoy), sementara konsumsi LNPRT tumbuh 6,9 persen (yoy), seiring dengan pemilihan kepala daerah serentak di daerah kontributor utama ekonomi nasional yakni DKI Jakarta dan Banten. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh 2,1 persen (yoy), mengalami akselerasi seiring dengan perbaikan kondisi fiskal pemerintah (Tabel 2.2).																																																												
13.	Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan 2016-2018 (Perubahan data dan sumber data pada Tabel 2.2. Pertumbuhan PDB Sisi Permintaan 2016-2018 (Persen), Halaman II.9)	<table border="1" data-bbox="672 1031 1003 1714"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{a)}</th> <th>2018^{b)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan PDB</td> <td>5,0</td> <td>5,1</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Rumah Tangga</td> <td>5,0</td> <td>4,9</td> <td>5,0</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi LNPRT</td> <td>6,6</td> <td>6,9</td> <td>8,1</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Pemerintah</td> <td>(0,1)</td> <td>2,1</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>Investasi (PMTB)</td> <td>4,5</td> <td>6,2</td> <td>8,0</td> </tr> <tr> <td>Ekspor Barang dan Jasa</td> <td>(1,6)</td> <td>9,1</td> <td>6,2</td> </tr> <tr> <td>Impor Barang dan Jasa</td> <td>(2,4)</td> <td>8,1</td> <td>12,7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) BPS, 2018; b) Outlook 2018</p>	Uraian	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}	Pertumbuhan PDB	5,0	5,1	5,2	Konsumsi Rumah Tangga	5,0	4,9	5,0	Konsumsi LNPRT	6,6	6,9	8,1	Konsumsi Pemerintah	(0,1)	2,1	2,7	Investasi (PMTB)	4,5	6,2	8,0	Ekspor Barang dan Jasa	(1,6)	9,1	6,2	Impor Barang dan Jasa	(2,4)	8,1	12,7	<table border="1" data-bbox="672 363 1003 1031"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{a)}</th> <th>2018^{b)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan PDB</td> <td>5,0</td> <td>5,1</td> <td>5,2</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT</td> <td>5,0</td> <td>5,0</td> <td>5,1</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Pemerintah</td> <td>(0,1)</td> <td>2,1</td> <td>6,3</td> </tr> <tr> <td>Investasi (PMTB)</td> <td>4,5</td> <td>6,2</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>Ekspor Barang dan Jasa</td> <td>(1,6)</td> <td>9,1</td> <td>7,5</td> </tr> <tr> <td>Impor Barang dan Jasa</td> <td>(2,4)</td> <td>8,1</td> <td>14,1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) BPS, 2018; b) Outlook Perhitungan Bappenas per November 2018</p>	Uraian	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}	Pertumbuhan PDB	5,0	5,1	5,2	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,0	5,0	5,1	Konsumsi Pemerintah	(0,1)	2,1	6,3	Investasi (PMTB)	4,5	6,2	7,0	Ekspor Barang dan Jasa	(1,6)	9,1	7,5	Impor Barang dan Jasa	(2,4)	8,1	14,1
Uraian	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}																																																												
Pertumbuhan PDB	5,0	5,1	5,2																																																												
Konsumsi Rumah Tangga	5,0	4,9	5,0																																																												
Konsumsi LNPRT	6,6	6,9	8,1																																																												
Konsumsi Pemerintah	(0,1)	2,1	2,7																																																												
Investasi (PMTB)	4,5	6,2	8,0																																																												
Ekspor Barang dan Jasa	(1,6)	9,1	6,2																																																												
Impor Barang dan Jasa	(2,4)	8,1	12,7																																																												
Uraian	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}																																																												
Pertumbuhan PDB	5,0	5,1	5,2																																																												
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,0	5,0	5,1																																																												
Konsumsi Pemerintah	(0,1)	2,1	6,3																																																												
Investasi (PMTB)	4,5	6,2	7,0																																																												
Ekspor Barang dan Jasa	(1,6)	9,1	7,5																																																												
Impor Barang dan Jasa	(2,4)	8,1	14,1																																																												
14.	Pertumbuhan ekonomi Indonesia (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.9)	Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2018 mencapai 5,1 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2017 sebesar 5,0 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong utamanya oleh investasi yang kuat, meski net ekspor berkontribusi negatif. Investasi tumbuh tinggi sebesar 8,0 persen didorong oleh pertumbuhan yang tinggi pada mesin dan perlengkapan dan perlengkapan lainnya, melanjutkan tren yang dimulai sejak triwulan III tahun 2017.	Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2018 mencapai 5,2 persen, lebih tinggi dibandingkan triwulan III tahun 2017 sebesar 5,1 persen. Akselerasi pertumbuhan ekonomi didorong utamanya oleh pertumbuhan investasi yang kuat, meski net ekspor masih berkontribusi negatif. Investasi tumbuh tinggi sebesar 7,0 persen didorong oleh pertumbuhan barang modal jenis mesin dan perlengkapan, peralatan lainnya serta bangunan, melanjutkan tren yang dimulai sejak triwulan III tahun 2017.																																																												

M - 4

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019			PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019						
		Uraian	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	Realisasi Triwulan I Tahun 2018 ^{b)}	Uraian	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	Realisasi Triwulan III Tahun 2018 ^{a)}		
15.	Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2016-2017 (Perubahan data dan sumber data pada Tabel 2.3. Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2016-2018 (Persen), Halaman II.9)	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,4	3,8	3,1	3,7	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,4	3,8	3,6	3,9
		Pertambangan dan Penggalian	0,9	0,7	0,7	0,3	Pertambangan dan Penggalian	0,9	0,7	2,7	2,1
		Industri Pengolahan	4,3	4,3	4,5	4,9	Industri Pengolahan	4,3	4,3	4,3	4,3
		Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,4	1,5	3,3	3,2	Pengadaan Listrik dan Gas, dan Air Bersih	5,4	1,5	5,6	5,7
		Pengadaan Air	3,6	4,6	3,6	4,6	Pengadaan Air	3,6	4,6	6,2	4,7
		Konstruksi	5,2	6,8	7,3	6,7	Konstruksi	5,2	6,8	5,8	6,6
		Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,0	4,4	5,0	5,9	Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,0	4,4	5,3	5,3
		Transportasi dan Pergudangan	7,4	8,5	8,6	8,7	Transportasi dan Pergudangan	7,4	8,5	5,6	7,7
		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,2	5,5	5,5	5,7	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,2	5,5	5,9	5,9
		Informasi dan Komunikasi	8,9	9,8	8,7	10,6	Informasi dan Komunikasi	8,9	9,8	9,0	8,5
		Jasa Keuangan	8,9	5,5	4,4	7,3	Jasa Keuangan	8,9	5,5	3,4	3,9
		Real Estate	4,7	3,7	3,2	4,2	Real Estate	4,7	3,7	3,9	3,6
		Jasa Perusahaan	7,4	8,4	8,0	8,3	Jasa Perusahaan	7,4	8,4	8,7	8,7
		Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,2	2,1	5,8	3,9	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,2	2,1	7,9	6,7
		Jasa Pendidikan	3,8	3,7	4,8	5,6	Jasa Pendidikan	3,8	3,7	6,6	5,5
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,2	6,8	6,0	8,1	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,2	6,8	7,6	6,9		
Jasa Lainnya	8,0	8,7	8,4	8,9	Jasa Lainnya	8,0	8,7	9,2	9,0		
		Sumber: a) BPS, 2018; b) Outlook 2018			Sumber: a) BPS, 2018; b) Outlook Perhitungan Bappenas per November 2018						
16.	Pertumbuhan tertinggi dari sisi	Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada triwulan I tahun			Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada triwulan III tahun						

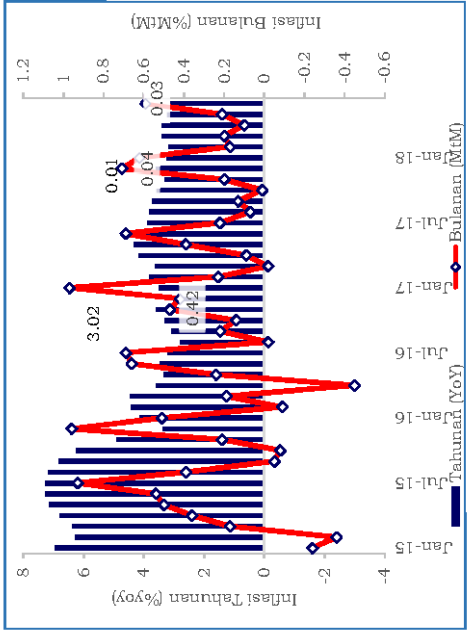
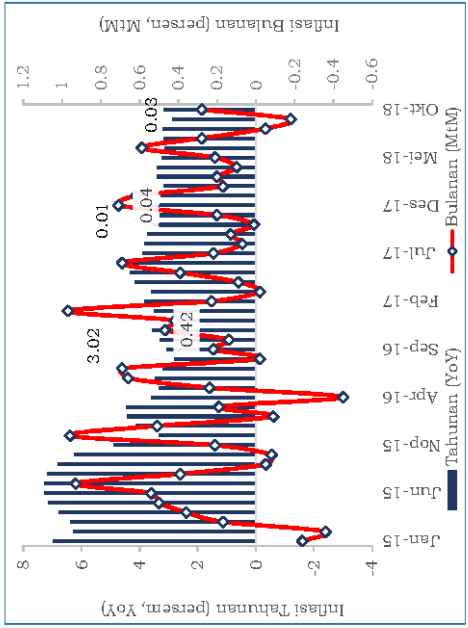
M - 5

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
	<p>lapangan usaha (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 1, Halaman II.10)</p>	<p>2018 dialami oleh sektor informasi dan komunikasi, transportasi dan pergudangan, serta konstruksi. Perkembangan ekonomi digital atau <i>e-commerce</i> menjadi pendorong utama pertumbuhan kedua sektor pertama, sementara sektor konstruksi masih didorong oleh proyek infrastruktur pemerintah. Sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDB yaitu industri pengolahan kembali tumbuh di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yakni sebesar 4,50 persen.</p>	<p>2018 dialami oleh sektor jasa lainnya, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan. Perkembangan ekonomi digital atau <i>e-commerce</i> menjadi pendorong utama pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi, seiring dengan peningkatan lalu lintas data dan belanja iklan. Sementara sumber pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2018 tertinggi adalah sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan.</p> <p>Pertumbuhan sektor industri pengolahan sebesar 4,3 persen (yoy) didorong oleh peningkatan produksi <i>Crude Palm Oil</i> (CPO), industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki, serta industri alat angkut. Sektor pertanian tumbuh 3,6 persen (yoy) didukung oleh pertumbuhan produksi tanaman hortikultura karena permintaan eksternal yang meningkat. Sedangkan sektor perdagangan mampu tumbuh 5,3 persen (yoy) didorong oleh peningkatan penjualan mobil dan sepeda motor.</p>
17.	<p>Neraca Pembayaran (Perubahan data pada Paragraf 6, Halaman II.10)</p>	<p>Walaupun tahun 2017 masih terdapat beberapa risiko meningkatnya ketidakpastian perekonomian global, seperti normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, investasi langsung asing dan portofolio dapat tumbuh masing-masing sebesar 24,8 persen dan 8,7 persen atau mencapai US\$19,2 miliar dan US\$20,6 miliar.</p>	<p>Walaupun tahun 2017 masih terdapat beberapa risiko meningkatnya ketidakpastian perekonomian global, seperti normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat, investasi langsung asing dan portofolio dapat tumbuh masing-masing sebesar 19,5 persen dan 10,0 persen atau mencapai US\$19,3 miliar dan US\$20,9 miliar.</p>
18.	<p>EODB (Perubahan narasi pada Kalimat Pertama, Halaman II.11)</p>	<p>.... serta peningkatan peringkat <i>Ease of Doing Business</i> (EODB) Indonesia dari peringkat 91 di tahun 2016 menjadi 72 di tahun 2017</p>	<p>Peningkatan surplus pada investasi langsung asing ini didorong oleh membaiknya peringkat investasi Indonesia menjadi <i>investment grade</i> oleh lembaga peringkat <i>Standard and Poor's</i>, kenaikan peringkat kredit Indonesia menjadi BBB oleh <i>Fitch Ratings</i>, serta peningkatan nilai Indonesia dalam kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i> - EODB).</p>
19.	<p>Defisit neraca transaksi berjalan (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.11)</p>	<p>Defisit di sisi neraca transaksi berjalan lebih besar, terutama disebabkan oleh meningkatnya defisit di neraca jasa termasuk pendapatan primer dan sekunder yang mencapai US\$36,3 miliar..</p>	<p>Defisit di sisi neraca transaksi berjalan lebih besar, terutama disebabkan oleh meningkatnya defisit di neraca jasa termasuk pendapatan primer dan sekunder yang mencapai US\$36,1 miliar atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai US\$32,3 miliar.</p>
20.	<p>Impor barang (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.11)</p>	<p>....sedangkan impor barang meningkat sebesar 16,1 persen.</p>	<p>Dalam keseluruhan tahun 2017, ekspor barang meningkat sebesar 16,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan impor barang meningkat sebesar 16,2 persen.</p>
21.	<p>Kinerja neraca pembayaran (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 3, Halaman II.11)</p>	<p>Pada triwulan I tahun 2018, kinerja neraca pembayaran Indonesia mengalami penurunan, yaitu mengalami defisit sebesar US\$3,9 miliar. Kinerja tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya maupun triwulan I tahun 2017 yang masing-masing mengalami surplus sebesar US\$1,0 miliar dan US\$4,5 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit sebesar US\$5,5 miliar. Defisit neraca transaksi berjalan tersebut disebabkan oleh defisit neraca pendapatan primer dan jasa-jasa yang masing-masing mencapai US\$7,9 miliar dan US\$1,4 miliar. Sementara itu, neraca perdagangan masih mengalami surplus sebesar US\$2,4 miliar.</p>	<p>Pada triwulan III tahun 2018, kinerja neraca pembayaran Indonesia mengalami penurunan, yaitu mengalami defisit sebesar US\$4,4 miliar. Kinerja tersebut menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami defisit sebesar US\$4,3 miliar maupun triwulan III tahun 2017 yang mengalami surplus sebesar US\$5,4 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit sebesar US\$8,8 miliar. Defisit neraca transaksi berjalan tersebut disebabkan oleh defisit neraca perdagangan yang mencapai US\$0,4 miliar, defisit neraca pendapatan primer yang mencapai US\$8,0 miliar dan defisit jasa-jasa yang mencapai US\$2,2 miliar.</p>

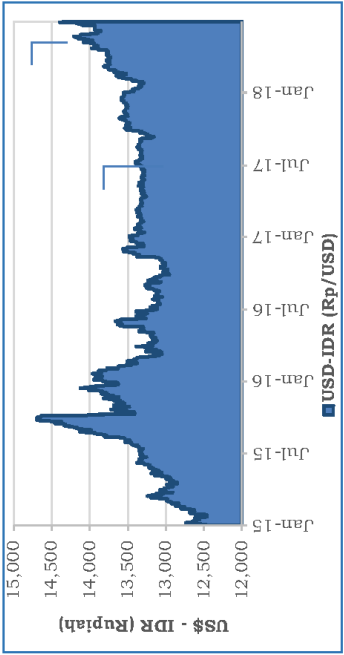
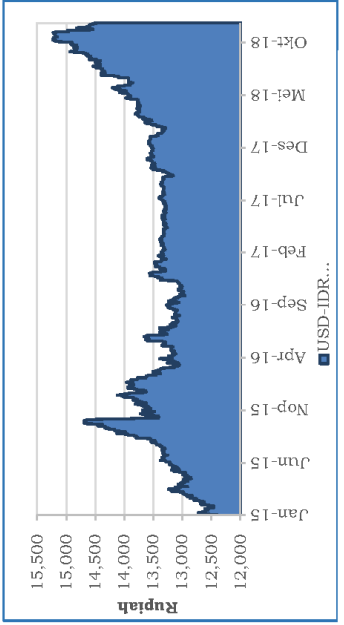
M - 6

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019				PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019			
		2016	2017	Realisasi Triwulan I Tahun 2018	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	Realisasi Triwulan III Tahun 2018	2018 ^{b)}	
22.	Perkembangan Neraca Pembayaran (Perubahan data dan sumber data pada Tabel 2.4. Perkembangan Neraca Pembayaran (Miliar US\$), Halaman II.11)	Transaksi Berjalan (US\$ miliar)	(17,0)	(17,5)	(5,5)	(17,0)	(17,5)	(8,8)	(29,7)
		Transaksi Finansial (US\$ miliar)	29,3	29,5	1,8	29,3	29,5	4,2	15,6
		Cadangan Devisa (US\$ miliar)	116,4	130,2	126,0	116,4	130,2	114,8	116,1
		- dalam bulan impor	8,4	8,3	7,7	8,4	8,3	6,3	6,4
		Sumber: Bank Indonesia (diolah), 2018							
23.	Neraca transaksi modal dan finansial (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 4, Halaman II.11)	Neraca transaksi modal dan finansial mengalami penurunan surplus yang signifikan, yaitu menjadi sebesar US\$1,8 miliar, lebih kecil dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai US\$6,8 miliar. Penurunan surplus di sisi neraca transaksi modal dan finansial ini terutama disebabkan oleh terjadinya <i>net outflow</i> investasi portofolio yang mencapai US\$1,2 miliar.							
24.	Cadangan devisa (Perubahan data pada Paragraf 5, Halaman II.11)	Dengan gambaran tersebut, secara keseluruhan cadangan devisa hingga akhir triwulan I tahun 2018 mencapai US\$126,0 miliar atau setara 7,7 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri. Hingga akhir bulan Juni 2018, cadangan devisa mencapai US\$119,8 miliar atau setara dengan atau 6,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri.							
25.	Moneter (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 7, Halaman II.14)	Memasuki pertengahan 2018, inflasi umum (yoy) mencapai 3,12 persen (yoy) pada bulan Juni 2018. Pergerakan inflasi <i>administered price</i> menunjukkan tren yang semakin menurun dari 8,70 persen per Desember 2017 menjadi 2,88 persen (yoy) pada Juni 2018 (Gambar 2.8). Hal tersebut sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengendalikannya implementasi kebijakan <i>administered price</i> dan meminimasi dampaknya terhadap kenaikan harga. Sebaliknya, inflasi <i>volatile food</i> relatif meningkat dari tahun sebelumnya yaitu mencapai 4,60 persen (yoy) pada Juni 2018, lebih disebabkan oleh faktor musiman dari perayaan Idul Fitri. Sepanjang tahun 2018, beberapa faktor risiko inflasi berasal dari faktor global maupun domestik. Dari sisi global, kenaikan harga beberapa komoditas pangan seperti gandum, jagung, telur, kedelai, cabai, dan minyak dunia memberikan tekanan terhadap pembentukan inflasi nasional terutama komponen <i>volatile food</i> . Selain itu, kenaikan harga beras yang terjadi pada awal tahun 2018 turut memberikan sumbangan terhadap tingginya inflasi komponen harga bergejolak. Pada bulan Juni 2018, beberapa komoditas yang mengalami							
		Pada tahun 2018, tekanan inflasi nasional dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal. Risiko eksternal meliputi gejolak pasokan dan harga beberapa komoditas global (antara lain gandum, jagung, dan minyak dunia), serta volatilitas nilai tukar. Risiko internal meliputi gangguan produksi (cuaca dan hama), ketersediaan pasokan komoditas pangan pokok strategis, hambatan distribusi, kenaikan harga barang dan tarif jasa, serta pengendalian ekspektasi dan permintaan pasar. Dampak risiko tersebut tercermin pada meningkatnya inflasi <i>volatile foods</i> yang mencapai 4,48 persen (YoY) pada Oktober 2018 (Gambar 2.8). Begitu pula inflasi inti mengalami tren peningkatan hingga Oktober 2018. Sebaliknya, pergerakan inflasi <i>administered prices</i> menurun 2,74 persen (YoY). Meskipun menghadapi beberapa tekanan risiko, inflasi tahun 2018 stabil pada rentang sasaran yang ditetapkan. Dukungan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia menjadi kunci							

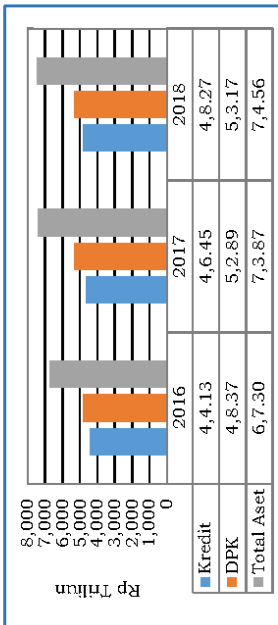
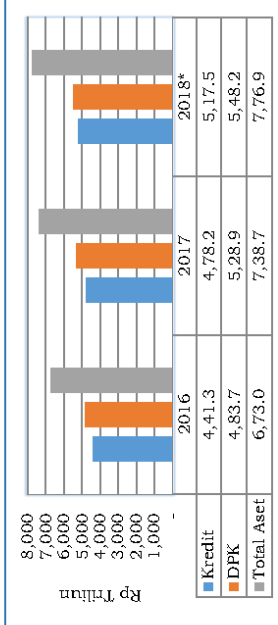
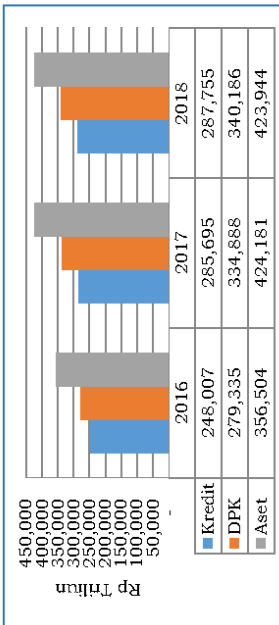
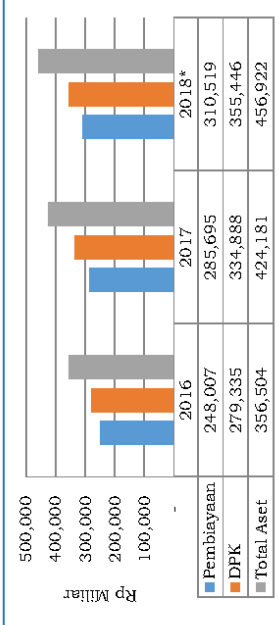
M - 7

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
26.	Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Perubahan data pada Gambar 2.7 Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen), Halaman II.15)	kenaikan harga antara lain: tarif angkutan udara, ikan segar, tarif angkutan antarkota, daging ayam ras, tarif sewa rumah, daging sapi, bawang merah, serta cabai rawit. Pada tahun 2018 dan 2019, tingkat inflasi diperkirakan stabil pada rentang target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3,5±1 persen (yoy).	terkendalinya inflasi pada sasaran yang ditetapkan.
<p data-bbox="457 1814 500 2013">Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Perubahan data pada Gambar 2.7 Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen), Halaman II.15)</p>  <p data-bbox="922 1515 945 1689">Sumber: BPS, 2018</p>		 <p data-bbox="922 767 945 1009">Sumber: BPS, 2018 (diolah).</p>	

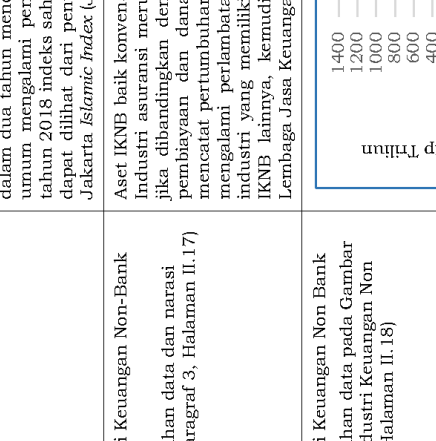
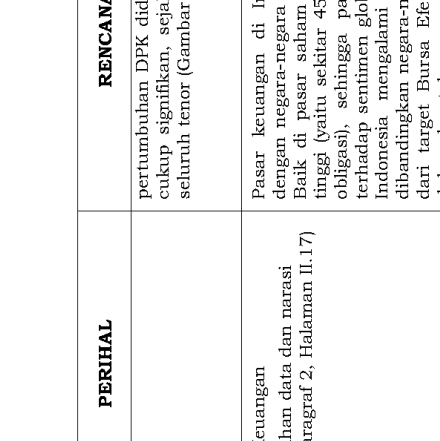
NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
27.	Perkembangan Inflasi berdasarkan Komponen (Perubahan data pada Gambar 2.8 Perkembangan Inflasi berdasarkan Komponen (Persen, yoy), Halaman II.15)	<p>Sumber: BPS, 2018 (diolah).</p>	<p>Sumber: BPS, 2018 (diolah).</p>
28.	Nilai tukar rupiah (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 1, Halaman II.15)	<p>Pada akhir Maret 2017, nilai tukar rupiah menguat 1,12 persen dibandingkan posisi pada akhir tahun 2016. Kondisi tersebut berlanjut hingga memasuki September 2017, rupiah menguat hingga titik terendah selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp13.156 per US\$ pada 11 September 2017. Pergerakan rupiah yang stabil tersebut didukung oleh aliran modal asing ke Indonesia yang cukup tinggi sejalan dengan perkembangan eksternal dan domestik yang positif. Di sisi eksternal, kondisi pasar keuangan global yang relatif kondusif mendorong aliran modal asing ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, sentimen positif kenaikan peringkat kredit Indonesia, stabilitas inflasi, dan tingkat imbal hasil penanaman aset keuangan domestik yang kompetitif merupakan faktor yang memengaruhi aliran modal asing ke Indonesia (Gambar 2.9).</p> <p>Sumber: BPS, 2018 (diolah).</p>	<p>Mulai Maret hingga September 2017, nilai tukar rupiah menguat hingga titik tertinggi selama tahun 2017 yaitu sebesar Rp13.156 per US\$. Dari sisi domestik, sentimen positif kenaikan peringkat kredit Indonesia, stabilitas inflasi, dan tingkat imbal hasil penanaman aset keuangan domestik yang kompetitif merupakan faktor yang memengaruhi aliran modal asing ke Indonesia. Namun demikian, pada akhir tahun 2017, rupiah mengalami depresiasi. Depresiasi rupiah terus berlanjut hingga tahun 2018 hingga mencapai Rp15.238 per US\$ (Gambar 2.9).</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
29.	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Perubahan data pada Gambar 2.9 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap US\$ (Rp/US\$), Halaman II.16)	 <p>Sumber: Bloomberg, 2018</p>	 <p>Sumber: Bloomberg, 2018</p>
30.	Pelemahan rupiah terhadap USD (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.16 serta Paragraf 1, Halaman II.16)	<p>Namun demikian, pada penghujung September hingga akhir tahun 2017, rupiah mengalami depresiasi. Depresiasi tersebut berlanjut hingga akhir Juni 2018 yang menyentuh level Rp14.330 per US\$. Dari sisi eksternal, penguatan dolar Amerika Serikat (AS) secara meluas menyebabkan pelemahan nilai tukar hampir seluruh mata uang dunia. Apresiasi dolar AS terutama disebabkan oleh: (1) perbaikan indikator ekonomi AS; (2) kenaikan suku bunga <i>Federal Fund Reserve</i> (FFR); serta (3) rencana pemotongan pajak AS. Dari sisi domestik, pelemahan rupiah di pertengahan tahun 2018 terutama dipengaruhi oleh peningkatan permintaan valas oleh residen untuk keperluan pembayaran utang luar negeri, impor bahan bakar minyak, serta impor barang modal untuk pembangunan infrastruktur. Kebutuhan impor tersebut menyebabkan defisit transaksi berjalan yang semakin melebar. Meski demikian, sejalan dengan tetap terkendalinya inflasi, kenaikan suku bunga acuan BI, kebijakan menjaga kecukupan likuiditas, serta peningkatan upaya pendalaman pasar keuangan yang mendorong aliran masuk investasi portofolio asing, maka rupiah hingga akhir 2018 diprediksi tetap stabil sesuai dengan fundamental ekonomi dalam menjaga daya saing ekspor.</p>	<p>Faktor utama yang menekan pelemahan rupiah terhadap USD sepanjang 2018 adalah pemulihan kondisi perekonomian Amerika Serikat (AS) yang direspons oleh The Fed dengan menaikkan suku bunga kebijakannya (sebanyak tiga kali hingga Oktober 2018). Selain itu, ketegangan global menempatkan dananya pada aset-aset yang dianggap aman. Hal ini mengakibatkan penguatan dolar AS dan pelemahan mata uang terutama di negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, pelemahan rupiah di tahun 2018 dipengaruhi oleh peningkatan valas untuk keperluan pembayaran utang luar negeri, impor bahan bakar minyak, serta impor barang modal untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini mengakibatkan defisit transaksi berjalan semakin melebar dan menekan nilai tukar.</p> <p>Memasuki November 2018, rupiah kembali menguat. Pada 28 November 2018, rupiah berhasil terapresiasi hingga Rp14.515 per US\$. Penguatan rupiah tersebut memberikan sinyal positif rupiah akan tetap stabil hingga akhir tahun 2018. Kondisi tersebut terwujud atas terlaksananya kebijakan stabilisasi rupiah, antara lain: (1) menaikkan suku bunga acuan; (2) mendorong mekanisme pasar terhadap stabilitas harga; (3) menjaga kecukupan likuiditas pasar keuangan dan perbankan; serta (4) meningkatkan pendalaman pasar keuangan yang mendorong aliran masuk investasi portofolio asing.</p>
31.	Sektor Keuangan (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.16)	<p>Tingginya permodalan perbankan pada tahun 2018 mendorong kestabilan sistem keuangan, meskipun kualitas penyauran kredit sedikit menurun per April 2018. Secara umum, beberapa indikator di dalam sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nongbank tetap</p>	<p>Tingginya permodalan perbankan pada tahun 2018 mendorong kestabilan sistem keuangan. Secara umum, beberapa indikator di dalam sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan nongbank mengalami perbaikan.</p>

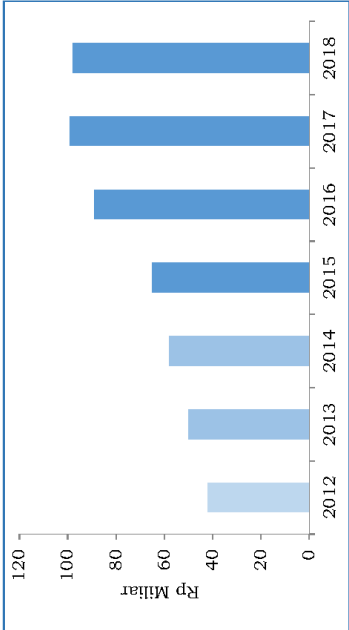
M - 10

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
32.	<p>Indikator Perbankan Konvensional (Perubahan data dan sumber data pada Gambar 2.10 Indikator Perbankan Konvensional, Halaman II.17)</p>	<p>menunjukkan pertumbuhan yang positif, meskipun beberapa indikator masih mengalami perlambatan pertumbuhan</p>  <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018</p>	 <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, September 2018</p>
33.	<p>Indikator Perbankan Syariah (Perubahan data dan sumber data pada Gambar 2.11 Indikator Perbankan Syariah, Halaman II.17)</p>	 <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018</p>	 <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, September 2018</p>
34.	<p>Perbankan (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 1, Halaman II.17)</p>	<p>Kondisi perkembangan sektor perbankan konvensional dan syariah hingga April tahun 2018 tercatat relatif stabil, meskipun beberapa indikator kinerja perbankan mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh tingginya rasio kecukupan modal perbankan konvensional dan syariah yang berada jauh di atas ketentuan minimum konvensional dan syariah serta meningkatnya rasio profitabilitas perbankan konvensional. Sementara itu, kualitas penyaluran kredit perbankan konvensional sedikit mengalami penurunan. Dari sisi intermediasi perbankan, kredit dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan konvensional tercatat mengalami pertumbuhan meskipun sedikit melambat jika dibandingkan dengan akhir tahun 2017. Perlambatan</p>	<p>Kondisi perkembangan sektor perbankan konvensional dan syariah hingga September 2018 relatif terjaga. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh tingginya rasio kecukupan modal perbankan konvensional dan syariah yang berada jauh di atas ketentuan minimum yang ditetapkan yaitu 8 persen, dan meningkatnya rasio profitabilitas perbankan konvensional. Sampai dengan bulan September 2018, penyaluran kredit perbankan konvensional dan pembiayaan syariah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Pada bulan September 2018, tercatat kredit perbankan konvensional tumbuh sebesar 12,9 persen sedangkan pertumbuhan pembiayaan syariah sedikit melambat menjadi sebesar 14,3</p>

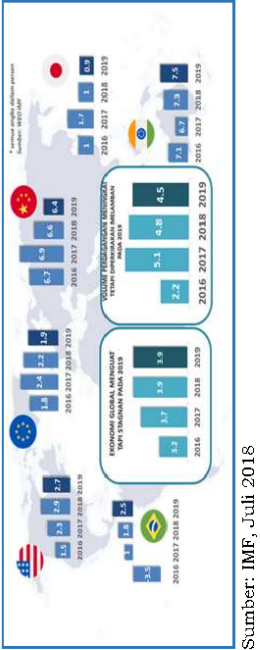
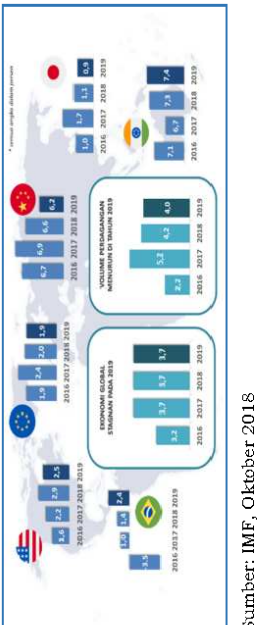
M - 11

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
35.	Pasar Keuangan (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.17)	<p>pertumbuhan DPK didorong oleh perlambatan pertumbuhan deposito yang cukup signifikan, sejalan dengan penurunan suku bunga deposito untuk seluruh tenor (Gambar 2.10 dan Gambar 2.11).</p> <p>Pasar keuangan di Indonesia masih relatif dangkal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Baik di pasar saham maupun obligasi, kepemilikan asing masih cukup tinggi (yaitu sekitar 45,5 persen di pasar saham dan 38,1 persen di pasar obligasi), sehingga pasar modal dan obligasi Indonesia cukup sensitif terhadap sentimen global. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar saham di Indonesia mengalami tren peningkatan meskipun masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara dan masih jauh dari target Bursa Efek Indonesia untuk mencapai angka 10.000 triliun dalam dua tahun mendatang. Nilai kapitalisasi pasar saham syariah secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2016. Akan tetapi, pada awal tahun 2018 indeks saham syariah cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari penurunan nilai kapitalisasi pasar saham syariah baik Jakarta <i>Istamic Index</i> (JII) maupun Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).</p>	<p>persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, pertumbuhan DPK baik pada perbankan konvensional maupun syariah sampai dengan bulan September 2018 mengalami perlambatan yaitu masing-masing hanya tumbuh sebesar 6,6 persen dan 11,6 persen dibandingkan bulan yang sama tahun 2017.</p> <p>Pasar keuangan di Indonesia masih relatif terjaga di tengah tekanan eksternal. Nilai kapitalisasi pasar saham di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Tercatat kapitalisasi pasar saham pada bulan September 2018 menguat sebesar 4,1 persen menjadi Rp6.737 triliun dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. IHSG tercatat mencapai 5.976,6 pada bulan September 2018. Pada pasar saham syariah, nilai kapitalisasi saham syariah sampai dengan September 2018 secara umum mengalami peningkatan. Nilai kapitalisasi pasar saham syariah berdasarkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup kembali menguat sebesar 1,03 persen mencapai Rp3.543,3 triliun pada bulan September 2018 dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Meskipun sempat mengalami gejolak pada awal tahun 2018, penguatan nilai kapitalisasi pasar saham menunjukkan kinerja pasar modal masih baik di tengah tantangan eksternal.</p>
36.	Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 3, Halaman II.17)	<p>Aset IKNB baik konvensional maupun syariah terus mengalami peningkatan. Industri asuransi merupakan industri dengan total aset yang paling tinggi jika dibandingkan dengan IKNB lainnya, kemudian diikuti oleh lembaga pembiayaan dan dana pensiun. IKNB syariah secara keseluruhan juga mencatat pertumbuhan yang positif. Namun pada April 2018, IKNB Syariah mengalami perlambatan. Industri asuransi syariah juga tercatat sebagai industri yang memiliki total aset terbesar jika dibandingkan dengan aset IKNB lainnya, kemudian diikuti oleh Lembaga Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus Syariah (Gambar 2.12 dan Gambar 2.13).</p>	<p>Sampai dengan September 2018, aset IKNB baik konvensional maupun syariah mengalami peningkatan. Aset IKNB konvensional pada bulan September 2018 meningkat mencapai Rp2211,1 triliun terutama didukung peningkatan aset pada industri asuransi. Meskipun mengalami sedikit penurunan pada bulan September 2018, aset IKNB syariah masih memiliki trend peningkatan. Pada bulan September 2018, aset IKNB syariah mencapai Rp96,8 miliar dengan total aset terbesar pada industri asuransi</p>
37.	Industri Keuangan Non Bank (Perubahan data pada Gambar 2.12 Industri Keuangan Non Bank, Halaman II.18)	 <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018 Keterangan: Data IKNB Syariah sampai dengan Februari 2018</p>	 <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, September 2018</p>

M - 12

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
38.	Perkembangan Aset Industri Keuangan Non Bank Syariah (Perubahan data pada Gambar 2.13Perkembangan Aset Industri Keuangan Non Bank Syariah, Halaman II.18)	 <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2018 Keterangan: Data IKNB Syariahah sampai dengan Februari 2018</p>	 <p>Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, September 2018</p>
39.	Kinerja dan Investasi BUMN (Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman II.18)	<p>Ekuitas BUMN juga mengalami peningkatan sebesar 7,2 persen dari tahun 2016 dan laba BUMN pun menunjukkan tren yang positif dengan adanya peningkatan sebesar 4,9 persen dari Rp164 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp172 triliun pada tahun 2017.</p>	<p>Pada tahun 2017, ekuitas BUMN dan laba BUMN juga mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7,2 persen dan 4,9 persen dibandingkan tahun 2016.</p>
40.	Realisasi investasi BUMN (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.18)	<p>Realisasi investasi BUMN tahun 2017 yang dilihat dari realisasi penyaluran belanja modal (capex) menunjukkan sedikit peningkatan dari tahun 2016. Belanja modal BUMN meningkat dari Rp297,85 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp303 triliun pada tahun 2017 atau meningkat sebesar 1,7 persen. Dengan lebih cepat merealisasikan belanja modal, BUMN membantu pemerintah dalam akselerasi proyek-proyek infrastruktur strategis. Capex BUMN pada tahun 2018 diharapkan meningkat sebesar 86 persen atau sebesar Rp260 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.</p>	<p>Pada tahun 2017, realisasi investasi BUMN yang dilihat dari realisasi penyaluran belanja modal (capex) menunjukkan sedikit peningkatan dibanding tahun 2016. Belanja modal BUMN meningkat sebesar 1,7 persen dari Rp297,8 triliun pada tahun 2016 menjadi Rp303,0 triliun pada tahun 2017. Realisasi belanja modal BUMN membantu pemerintah dalam akselerasi perekonomian, antara lain melalui proyek-proyek infrastruktur strategis.</p>
<p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro Sub-bab 2.2.2. Perkiraan Ekonomi Tahun 2019</p>			
41.	Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 (Perubahan data Paragraf 3, Halaman II.18)	<p>Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,2-5,6 persen di tahun 2019 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mampu mencapai 5,3 persen di tahun 2019 melalui kebijakan yang menyeluruh dan tepat sasaran.</p>

M - 13

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		<p>RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019</p> <p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro Sub-bab 2.2.2. Perkiraan Ekonomi Tahun 2019 Sub-bab 2.2.2.1. Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik</p>	
42.	Tantangan dan Risiko Ekonomi Global dan Domestik (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 4, Halaman II.18)	<p>Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,9 persen, tetapi cenderung stagnan jika dibandingkan tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi global tersebut ditopang oleh negara berkembang yang tumbuh sebesar 5,1 persen, sementara negara maju tumbuh 2,2 persen. Pertumbuhan volume perdagangan global diperkirakan tumbuh 4,5 persen, sedikit melambat dibandingkan dengan perkiraan pada tahun 2018 (Gambar 2.14).</p>	<p>Pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2019 diperkirakan sebesar 3,7 persen, stagnan jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Pertumbuhan ekonomi global tersebut ditopang oleh negara berkembang yang tumbuh sebesar 4,7 persen, sementara negara maju tumbuh sebesar 2,1 persen. Pertumbuhan volume perdagangan global diperkirakan tumbuh sebesar 4,0 persen, melambat jika dibandingkan dengan perkiraan pada tahun 2018 (Gambar 2.14).</p>
43.	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Global Tahun 2019 (Perubahan data pada Gambar 2.14 Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi dan Volume Perdagangan Global Tahun 2019 (Persen), Halaman II.19)	 <p>Sumber: IMF, Juli 2018</p>	 <p>Sumber: IMF, Oktober 2018</p>
44.	Tantangan Domestik (Perubahan narasi pada Paragraf 8, Halaman II.20)	<p>Kedua, pertumbuhan kredit perbankan yang rendah menunjukkan masih belum selesainya proses konsolidasi perbankan dan dapat menjadi indikasi belum kuatnya pemulihan aktivitas sektor swasta.</p> <p>Ketiga, kontribusi industri pengolahan/manufaktur terhadap PDB yang terus menurun. Untuk dapat tumbuh tinggi dan di saat yang bersamaan menyerap tenaga kerja yang besar, industri pengolahan harus mampu tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.</p>	<p>Kedua, kontribusi industri pengolahan/manufaktur terhadap PDB yang terus menurun. Untuk dapat tumbuh tinggi dan di saat yang bersamaan menyerap tenaga kerja yang besar, industri pengolahan harus mampu tumbuh lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.</p> <p>Ketiga, tidak berkembangnya industri pengolahan berdampak pada kinerja ekspor yang masih bergantung pada komoditas. Hal ini berdampak pada rendahnya ekspor, sementara impor mengalami tren meningkat.</p>

M - 14

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																																																																																																																																						
	<p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro Sub-bab 2.2.2. Perkiraan Ekonomi Tahun 2019 Sub-bab 2.2.2.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Makro 2019</p>																																																																																																																																																																								
45.	<p>Sasaran Ekonomi Makro 2019 (Perubahan data dan keterangan tabel pada Tabel 2.5 Sasaran Ekonomi Makro 2019, Halaman II.21)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018¹⁾</th> <th>2019¹⁾ (rentang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Perkiraan Besar-besaran Pokok</td> </tr> <tr> <td>Pertumbuhan PDB (%)</td> <td>5,1</td> <td>5,2</td> <td>5,2-5,6</td> </tr> <tr> <td>Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode</td> <td>3,6</td> <td>3,5</td> <td>2,5-4,5</td> </tr> <tr> <td>Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)</td> <td>13.384</td> <td>13.973</td> <td>13.700-14.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Neraca Pembayaran</td> </tr> <tr> <td>Pertumbuhan Ekspor Nonmigas</td> <td>16,3</td> <td>8,5</td> <td>7,0-9,0</td> </tr> <tr> <td>Pertumbuhan Impor Nonmigas</td> <td>14,0</td> <td>14,5</td> <td>9,8-12,7</td> </tr> <tr> <td>Cadangan Devisa (US\$ miliar)</td> <td>130,2</td> <td>125,1</td> <td>125,5-127,8</td> </tr> <tr> <td>- dalam bulan impor</td> <td>8,3</td> <td>7,2</td> <td>6,6-6,8</td> </tr> <tr> <td>Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)</td> <td>1,7</td> <td>2,5-2,7</td> <td>2,5-2,7</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Keuangan Negara</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Perpajakan (% PDB)</td> <td>9,9</td> <td>10,5</td> <td>10,8-11,3</td> </tr> <tr> <td>Belanja Modal (% PDB)</td> <td>1,5</td> <td>1,3</td> <td>1,5-1,7</td> </tr> <tr> <td>Subsidi Energi (% PDB)</td> <td>0,7</td> <td>0,6</td> <td>0,6-0,7</td> </tr> <tr> <td>Keseimbangan Primer (% PDB)</td> <td>(0,9)</td> <td>(0,6)</td> <td>(0,3) - 0,04</td> </tr> <tr> <td>Surplus/Defisit APBN (% PDB)</td> <td>(2,51)</td> <td>(2,12)</td> <td>(1,9)-(1,6)</td> </tr> <tr> <td>Stok Utang Pemerintah (% PDB)</td> <td>29,38</td> <td>29,08</td> <td>28,80-29,20</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Investasi</td> </tr> <tr> <td>Peringkat Indonesia pada EODB</td> <td>72</td> <td>Menuju 40</td> <td>Menuju 40</td> </tr> <tr> <td>Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)</td> <td>6,2</td> <td>7,3</td> <td>6,9-7,7</td> </tr> <tr> <td>Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)</td> <td>692,8</td> <td>765,0</td> <td>833,0-870,0</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾ (rentang)	Perkiraan Besar-besaran Pokok			Pertumbuhan PDB (%)	5,1	5,2	5,2-5,6	Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,6	3,5	2,5-4,5	Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	13.384	13.973	13.700-14.000	Neraca Pembayaran			Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	16,3	8,5	7,0-9,0	Pertumbuhan Impor Nonmigas	14,0	14,5	9,8-12,7	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	130,2	125,1	125,5-127,8	- dalam bulan impor	8,3	7,2	6,6-6,8	Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	1,7	2,5-2,7	2,5-2,7	Keuangan Negara			Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,9	10,5	10,8-11,3	Belanja Modal (% PDB)	1,5	1,3	1,5-1,7	Subsidi Energi (% PDB)	0,7	0,6	0,6-0,7	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,9)	(0,6)	(0,3) - 0,04	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,51)	(2,12)	(1,9)-(1,6)	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	29,38	29,08	28,80-29,20	Investasi			Peringkat Indonesia pada EODB	72	Menuju 40	Menuju 40	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,2	7,3	6,9-7,7	Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	692,8	765,0	833,0-870,0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018¹⁾</th> <th>2019¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Perkiraan Besar-besaran Pokok</td> </tr> <tr> <td>Pertumbuhan PDB (%)</td> <td>5,1</td> <td>5,2</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td>Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode</td> <td>3,6</td> <td>3,2</td> <td>3,5</td> </tr> <tr> <td>Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$): Rata-Rata</td> <td>13.384</td> <td>14.300</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Neraca Pembayaran</td> </tr> <tr> <td>Pertumbuhan Ekspor Nonmigas</td> <td>16,3</td> <td>8,9</td> <td>8,0</td> </tr> <tr> <td>Pertumbuhan Impor Nonmigas</td> <td>14,0</td> <td>18,7</td> <td>11,0</td> </tr> <tr> <td>Cadangan Devisa (US\$ miliar)</td> <td>130,2</td> <td>116,1</td> <td>119,7</td> </tr> <tr> <td>- dalam bulan impor</td> <td>8,3</td> <td>6,4</td> <td>6,0</td> </tr> <tr> <td>Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)</td> <td>1,7</td> <td>2,5-3,0</td> <td>2,5-3,0</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Keuangan Negara</td> </tr> <tr> <td>Penerimaan Perpajakan (% PDB)</td> <td>9,9</td> <td>10,5</td> <td>11,08</td> </tr> <tr> <td>Belanja Modal (% PDB)</td> <td>1,5</td> <td>1,3</td> <td>1,20</td> </tr> <tr> <td>Subsidi Energi (% PDB)</td> <td>0,7</td> <td>1,1</td> <td>1,00</td> </tr> <tr> <td>Keseimbangan Primer (% PDB)</td> <td>(0,9)</td> <td>(0,4)</td> <td>(0,12)</td> </tr> <tr> <td>Surplus/Defisit APBN (% PDB)</td> <td>(2,51)</td> <td>(2,12)</td> <td>(1,84)</td> </tr> <tr> <td>Stok Utang Pemerintah (% PDB)</td> <td>29,38</td> <td>29,08</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Investasi</td> </tr> <tr> <td>Peringkat Indonesia pada EODB</td> <td>72</td> <td>Menuju 40</td> <td>Menuju 40</td> </tr> <tr> <td>Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)</td> <td>6,2</td> <td>7,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>Realisasi investasi PMA dan PMDN</td> <td>692,8</td> <td>765,0</td> <td>833,0 -</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	Perkiraan Besar-besaran Pokok			Pertumbuhan PDB (%)	5,1	5,2	5,3	Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,6	3,2	3,5	Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$): Rata-Rata	13.384	14.300	15.000	Neraca Pembayaran			Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	16,3	8,9	8,0	Pertumbuhan Impor Nonmigas	14,0	18,7	11,0	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	130,2	116,1	119,7	- dalam bulan impor	8,3	6,4	6,0	Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	1,7	2,5-3,0	2,5-3,0	Keuangan Negara			Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,9	10,5	11,08	Belanja Modal (% PDB)	1,5	1,3	1,20	Subsidi Energi (% PDB)	0,7	1,1	1,00	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,9)	(0,4)	(0,12)	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,51)	(2,12)	(1,84)	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	29,38	29,08	30,00	Investasi			Peringkat Indonesia pada EODB	72	Menuju 40	Menuju 40	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,2	7,0	7,0	Realisasi investasi PMA dan PMDN	692,8	765,0	833,0 -
2017	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾ (rentang)																																																																																																																																																																							
Perkiraan Besar-besaran Pokok																																																																																																																																																																									
Pertumbuhan PDB (%)	5,1	5,2	5,2-5,6																																																																																																																																																																						
Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,6	3,5	2,5-4,5																																																																																																																																																																						
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$)	13.384	13.973	13.700-14.000																																																																																																																																																																						
Neraca Pembayaran																																																																																																																																																																									
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	16,3	8,5	7,0-9,0																																																																																																																																																																						
Pertumbuhan Impor Nonmigas	14,0	14,5	9,8-12,7																																																																																																																																																																						
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	130,2	125,1	125,5-127,8																																																																																																																																																																						
- dalam bulan impor	8,3	7,2	6,6-6,8																																																																																																																																																																						
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	1,7	2,5-2,7	2,5-2,7																																																																																																																																																																						
Keuangan Negara																																																																																																																																																																									
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,9	10,5	10,8-11,3																																																																																																																																																																						
Belanja Modal (% PDB)	1,5	1,3	1,5-1,7																																																																																																																																																																						
Subsidi Energi (% PDB)	0,7	0,6	0,6-0,7																																																																																																																																																																						
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,9)	(0,6)	(0,3) - 0,04																																																																																																																																																																						
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,51)	(2,12)	(1,9)-(1,6)																																																																																																																																																																						
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	29,38	29,08	28,80-29,20																																																																																																																																																																						
Investasi																																																																																																																																																																									
Peringkat Indonesia pada EODB	72	Menuju 40	Menuju 40																																																																																																																																																																						
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,2	7,3	6,9-7,7																																																																																																																																																																						
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	692,8	765,0	833,0-870,0																																																																																																																																																																						
2017	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾																																																																																																																																																																							
Perkiraan Besar-besaran Pokok																																																																																																																																																																									
Pertumbuhan PDB (%)	5,1	5,2	5,3																																																																																																																																																																						
Laju inflasi, IHK (%): Akhir Periode	3,6	3,2	3,5																																																																																																																																																																						
Nilai Tukar Nominal (Rp/US\$): Rata-Rata	13.384	14.300	15.000																																																																																																																																																																						
Neraca Pembayaran																																																																																																																																																																									
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas	16,3	8,9	8,0																																																																																																																																																																						
Pertumbuhan Impor Nonmigas	14,0	18,7	11,0																																																																																																																																																																						
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	130,2	116,1	119,7																																																																																																																																																																						
- dalam bulan impor	8,3	6,4	6,0																																																																																																																																																																						
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	1,7	2,5-3,0	2,5-3,0																																																																																																																																																																						
Keuangan Negara																																																																																																																																																																									
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,9	10,5	11,08																																																																																																																																																																						
Belanja Modal (% PDB)	1,5	1,3	1,20																																																																																																																																																																						
Subsidi Energi (% PDB)	0,7	1,1	1,00																																																																																																																																																																						
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,9)	(0,4)	(0,12)																																																																																																																																																																						
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,51)	(2,12)	(1,84)																																																																																																																																																																						
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	29,38	29,08	30,00																																																																																																																																																																						
Investasi																																																																																																																																																																									
Peringkat Indonesia pada EODB	72	Menuju 40	Menuju 40																																																																																																																																																																						
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,2	7,0	7,0																																																																																																																																																																						
Realisasi investasi PMA dan PMDN	692,8	765,0	833,0 -																																																																																																																																																																						

M - 15

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Target Pembangunan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tingkat Kemiskinan (%)</td> <td>10,1</td> <td>9,82</td> <td>8,5-9,5</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</td> <td>5,5</td> <td>5,13</td> <td>4,8 - 5,2</td> </tr> <tr> <td>Rasio Gini (nilai)</td> <td>0,391</td> <td>0,389</td> <td>0,38-0,39</td> </tr> <tr> <td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)</td> <td>70,81</td> <td>71,50</td> <td>71,98</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: KemPPN/Bappenas, BPS, Kemenkeu, 2018 Keterangan: *) Berdasarkan outlook 2018 (angka neraca pembayaran berdasarkan perhitungan Bappenas 2018); **) Angka sasaran</p>	Target Pembangunan				Tingkat Kemiskinan (%)	10,1	9,82	8,5-9,5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,13	4,8 - 5,2	Rasio Gini (nilai)	0,391	0,389	0,38-0,39	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	70,81	71,50	71,98	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Target Pembangunan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tingkat Kemiskinan (%)</td> <td>10,1</td> <td>9,82</td> <td>8,5-9,5</td> </tr> <tr> <td>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</td> <td>5,5</td> <td>5,34</td> <td>4,8 - 5,2</td> </tr> <tr> <td>Rasio Gini (nilai)</td> <td>0,391</td> <td>0,389</td> <td>0,380-0,385</td> </tr> <tr> <td>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)</td> <td>70,81</td> <td>71,50</td> <td>71,98</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: KemPPN/Bappenas, BPS, Kemenkeu, 2018 Keterangan: *) Berdasarkan outlook Bappenas per November 2018 **) Angka sasaran</p>	Target Pembangunan				Tingkat Kemiskinan (%)	10,1	9,82	8,5-9,5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,34	4,8 - 5,2	Rasio Gini (nilai)	0,391	0,389	0,380-0,385	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	70,81	71,50	71,98
Target Pembangunan																																											
Tingkat Kemiskinan (%)	10,1	9,82	8,5-9,5																																								
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,13	4,8 - 5,2																																								
Rasio Gini (nilai)	0,391	0,389	0,38-0,39																																								
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	70,81	71,50	71,98																																								
Target Pembangunan																																											
Tingkat Kemiskinan (%)	10,1	9,82	8,5-9,5																																								
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,5	5,34	4,8 - 5,2																																								
Rasio Gini (nilai)	0,391	0,389	0,380-0,385																																								
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	70,81	71,50	71,98																																								
46.	Mempertahankan Momentum Pertumbuhan Ekonomi di Tengah Tahun Politik Sisi Permintaan (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.22)	Pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2-5,6 persen (yoy)	Pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen (yoy) ditempuh dengan cara meningkatkan daya saing ekspor, melanjutkan momentum peningkatan investasi, dan memperkuat konsumsi masyarakat.																																								
47.	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran 2019 (Perubahan data dan sumber data pada Tabel 2.6 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Pengeluaran 2019 (Persen), Halaman II.22)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>2019 (Rentang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan PDB</td> <td>5,2-5,6</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Rumah Tangga</td> <td>5,0-5,2</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi LNPR</td> <td>8,4-9,7</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Pemerintah</td> <td>2,8-3,7</td> </tr> <tr> <td>Investasi (PMTB)</td> <td>6,9-7,7</td> </tr> <tr> <td>Ekspor Barang dan Jasa</td> <td>5,5-6,6</td> </tr> <tr> <td>Impor Barang dan Jasa</td> <td>5,6-6,7</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: Perhitungan Kemenkeu dan Bappenas, 2018</p>	Uraian	2019 (Rentang)	Pertumbuhan PDB	5,2-5,6	Konsumsi Rumah Tangga	5,0-5,2	Konsumsi LNPR	8,4-9,7	Konsumsi Pemerintah	2,8-3,7	Investasi (PMTB)	6,9-7,7	Ekspor Barang dan Jasa	5,5-6,6	Impor Barang dan Jasa	5,6-6,7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan PDB</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR</td> <td>5,1</td> </tr> <tr> <td>Konsumsi Pemerintah</td> <td>5,4</td> </tr> <tr> <td>Investasi (PMTB)</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>Ekspor Barang dan Jasa</td> <td>6,3</td> </tr> <tr> <td>Impor Barang dan Jasa</td> <td>7,1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: UU APBN 2019</p>	Uraian	2019	Pertumbuhan PDB	5,3	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR	5,1	Konsumsi Pemerintah	5,4	Investasi (PMTB)	7,0	Ekspor Barang dan Jasa	6,3	Impor Barang dan Jasa	7,1										
Uraian	2019 (Rentang)																																										
Pertumbuhan PDB	5,2-5,6																																										
Konsumsi Rumah Tangga	5,0-5,2																																										
Konsumsi LNPR	8,4-9,7																																										
Konsumsi Pemerintah	2,8-3,7																																										
Investasi (PMTB)	6,9-7,7																																										
Ekspor Barang dan Jasa	5,5-6,6																																										
Impor Barang dan Jasa	5,6-6,7																																										
Uraian	2019																																										
Pertumbuhan PDB	5,3																																										
Konsumsi Rumah Tangga dan LNPR	5,1																																										
Konsumsi Pemerintah	5,4																																										
Investasi (PMTB)	7,0																																										
Ekspor Barang dan Jasa	6,3																																										
Impor Barang dan Jasa	7,1																																										

M - 16

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
48.	Upaya memperkuat konsumsi masyarakat (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 3, Halaman II.22)	Upaya memperkuat konsumsi masyarakat diharapkan mampu mendorong peningkatan konsumsi masyarakat di sekitar 5,0-5,2 persen (yoy).	Upaya memperkuat konsumsi masyarakat diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga dan LNPRRT tumbuh sebesar 5,1 persen (yoy).
49.	Upaya memperkuat konsumsi masyarakat (Perubahan data dan narasi pada Poin 8, Halaman II.23)	... (8) menangkap perubahan pola konsumsi masyarakat yang bergeser ke aktivitas hiburan dan pariwisata melalui perluasan pengembangan destinasi domestik terutama dari segi perbaikan fasilitas pendukung di sekitar destinasi dan kebijakan moneter dan makroprudensial yang lebih longgar. Memperkuat laju konsumsi LNPRRT yang diharapkan mampu tumbuh 8,4 – 9,7 persen (yoy) di tahun Pemilihan Presiden (pilpres) sebagai sumber pertumbuhan potensial yang dihasilkan oleh organisasi kemasyarakatan dalam belanja untuk keperluan pilpres.	... 8) menangkap perubahan pola konsumsi masyarakat yang bergeser ke aktivitas hiburan dan pariwisata melalui perluasan pengembangan destinasi domestik terutama dari segi perbaikan fasilitas pendukung di sekitar destinasi. Laju konsumsi LNPRRT diperkirakan akan meningkat di tahun Pemilihan Presiden (pilpres) seiring dengan peningkatan belanja untuk keperluan kampanye pilpres.
50.	Mempertajam konsumsi pemerintah (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.23)	Dalam rangka merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing. Hal ini dalam rangka mewujudkan pertumbuhan berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja serta pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Sasaran keuangan negara tahun 2019 salah satunya pada sisi pendapatan negara. Penerimaan perpajakan sebagai komponen utama pendapatan negara menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal. Penerimaan perpajakan diperkirakan akan berada dalam rentang 10,8-11,3 persen PDB. Dengan kecenderungan meningkatnya harga minyak dunia serta beberapa komoditas lainnya dengan <i>liftirig</i> yang diperkirakan menurun, PNBP diproyeksikan akan berada pada kisaran 1,8-2,1 persen PDB pada tahun 2019. Dari sisi pengeluaran negara, pemerintah terus berupaya mengurangi belanja-belanja yang kurang produktif. Pada tahun 2019, belanja negara diperkirakan sebesar 14,2-15,4 persen PDB. Belanja modal untuk pembangunan infrastruktur diproyeksikan sebesar 1,5-1,7 persen PDB. Sementara itu, subsidi tahun 2019 diproyeksikan sebesar 0,9-1,1 persen PDB, dengan subsidi energi diproyeksikan sebesar 0,6-0,7 persen PDB. Pada tahun 2019, transfer ke daerah dan dana desa diproyeksikan sebesar 4,9-5,3 persen PDB. Dana Desa akan terus ditingkatkan untuk memenuhi amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 sehingga diupayakan mencapai 10 persen dari dan di luar Dana Transfer ke Daerah. Pada sisi pembiayaan, dengan perkiraan adanya peningkatan penerimaan negara dan belanja yang lebih efisien dan berkualitas, diharapkan defisit anggaran dapat dikendalikan dan	Dalam rangka merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target-target pembangunan yang ditetapkan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing, meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Pemerintah menstimulus perekonomian melalui, antara lain: (i) penguatan kualitas belanja produktif dan belanja prioritas; (ii) efektivitas program perlindungan sosial dan subsidi; dan (iii) penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Salah satu upaya penguatan kualitas desentralisasi fiskal melalui transfer ke daerah dan dana desa yang diproyeksikan mencapai 5,1 persen PDB. Dengan demikian, konsumsi pemerintah diproyeksikan tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy).

M - 17

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																																												
51.	Melanjutkan momentum penguatan investasi (Perubahan data pada Paragraf 6, Halaman II.23)	<p>diperkecil. Keseimbangan primer juga diupayakan semakin mengecil menuju positif sehingga keberlanjutan fiskal akan terjaga. Defisit anggaran diperkirakan mencapai -1,6 hingga -1,9 persen PDB dan rasio utang diperkirakan terjadi pada rentang 28,80-29,20 persen PDB. Oleh karena itu, konsumsi pemerintah diharapkan mampu tumbuh 2,8 - 3,7 persen (yoy).</p> <p>Melanjutkan momentum penguatan investasi untuk mencapai pertumbuhan 6,9-7,7 persen (yoy) dapat dilakukan melalui:</p>	<p>Melanjutkan momentum penguatan investasi untuk mencapai pertumbuhan 7,0 persen (yoy) dapat dilakukan melalui:</p>																																																																												
52.	Upaya memperkuat daya saing ekspor (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.24)	<p>Upaya memperkuat daya saing ekspor sehingga dapat tumbuh 5,5-6,6 persen (yoy) dapat dicapai dengan berbagai aktivitas, di antaranya:</p>	<p>Upaya memperkuat daya saing ekspor sehingga dapat tumbuh 6,3 persen (yoy) dapat dicapai dengan berbagai aktivitas, di antaranya:</p>																																																																												
53.	Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2019 (Perubahan data dan sumber data pada Tabel 2.7 Sasaran Pertumbuhan PDB Sisi Produksi 2019 (Persen), Halaman II.24)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="691 1031 732 1714">Uraian</th> <th data-bbox="732 1031 773 1714">2019 (Rentang)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="732 1031 773 1714">Pertumbuhan PDB</td><td data-bbox="773 1031 797 1714">5,2-5,6</td></tr> <tr><td data-bbox="797 1031 837 1714">Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</td><td data-bbox="837 1031 862 1714">3,7-4,0</td></tr> <tr><td data-bbox="862 1031 902 1714">Pertambangan dan Penggalian</td><td data-bbox="902 1031 927 1714">0,6-0,8</td></tr> <tr><td data-bbox="927 1031 967 1714">Industri Pengolahan</td><td data-bbox="967 1031 992 1714">4,9-5,4</td></tr> <tr><td data-bbox="992 1031 1032 1714">Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es</td><td data-bbox="1032 1031 1057 1714">6,0-6,4</td></tr> <tr><td data-bbox="1057 1031 1097 1714">Pengadaan Air</td><td data-bbox="1097 1031 1122 1714">4,9-5,5</td></tr> <tr><td data-bbox="1122 1031 1162 1714">Konstruksi</td><td data-bbox="1162 1031 1187 1714">6,4-7,0</td></tr> <tr><td data-bbox="1187 1031 1227 1714">Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor</td><td data-bbox="1227 1031 1252 1714">5,3-5,7</td></tr> <tr><td data-bbox="1252 1031 1292 1714">Transportasi dan Pergudangan</td><td data-bbox="1292 1031 1317 1714">8,7-9,0</td></tr> <tr><td data-bbox="1317 1031 1357 1714">Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</td><td data-bbox="1357 1031 1382 1714">6,0-6,4</td></tr> <tr><td data-bbox="1382 1031 1422 1714">Informasi dan Komunikasi</td><td data-bbox="1422 1031 1446 1714">10,3-11,1</td></tr> <tr><td data-bbox="1446 1031 1487 1714">Jasa Keuangan</td><td data-bbox="1487 1031 1511 1714">7,8-8,4</td></tr> <tr><td data-bbox="1511 1031 1552 1714">Real Estate</td><td data-bbox="1552 1031 1576 1714">4,3-4,7</td></tr> <tr><td data-bbox="1576 1031 1617 1714">Jasa Perusahaan</td><td data-bbox="1617 1031 1624 1714">8,2-8,4</td></tr> <tr><td data-bbox="1641 1031 1624 1714">Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib</td><td data-bbox="1682 1031 1624 1714">3,9-4,2</td></tr> <tr><td data-bbox="1706 1031 1624 1714">Jasa Pendidikan</td><td data-bbox="1747 1031 1624 1714">5,8-6,2</td></tr> <tr><td data-bbox="1771 1031 1624 1714">Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</td><td data-bbox="1812 1031 1624 1714">8,1-8,4</td></tr> <tr><td data-bbox="1836 1031 1624 1714">Jasa Lainnya</td><td data-bbox="1877 1031 1624 1714">8,6-9,1</td></tr> </tbody> </table>	Uraian	2019 (Rentang)	Pertumbuhan PDB	5,2-5,6	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,7-4,0	Pertambangan dan Penggalian	0,6-0,8	Industri Pengolahan	4,9-5,4	Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es	6,0-6,4	Pengadaan Air	4,9-5,5	Konstruksi	6,4-7,0	Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,3-5,7	Transportasi dan Pergudangan	8,7-9,0	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,0-6,4	Informasi dan Komunikasi	10,3-11,1	Jasa Keuangan	7,8-8,4	Real Estate	4,3-4,7	Jasa Perusahaan	8,2-8,4	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,9-4,2	Jasa Pendidikan	5,8-6,2	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,1-8,4	Jasa Lainnya	8,6-9,1	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="691 363 732 1031">Uraian</th> <th data-bbox="732 363 773 1031">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td data-bbox="732 363 773 1031">Pertumbuhan PDB</td><td data-bbox="773 363 797 1031">5,3</td></tr> <tr><td data-bbox="797 363 837 1031">Pertanian, Kehutanan dan Perikanan</td><td data-bbox="837 363 862 1031">3,8</td></tr> <tr><td data-bbox="862 363 902 1031">Pertambangan dan Penggalian</td><td data-bbox="902 363 927 1031">0,6</td></tr> <tr><td data-bbox="927 363 967 1031">Industri Pengolahan</td><td data-bbox="967 363 992 1031">5,1</td></tr> <tr><td data-bbox="992 363 1032 1031">Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es</td><td data-bbox="1032 363 1057 1031">6,1</td></tr> <tr><td data-bbox="1057 363 1097 1031">Pengadaan Air</td><td data-bbox="1097 363 1122 1031">5,0</td></tr> <tr><td data-bbox="1122 363 1162 1031">Konstruksi</td><td data-bbox="1162 363 1187 1031">6,6</td></tr> <tr><td data-bbox="1187 363 1227 1031">Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor</td><td data-bbox="1227 363 1252 1031">5,3</td></tr> <tr><td data-bbox="1252 363 1292 1031">Transportasi dan Pergudangan</td><td data-bbox="1292 363 1317 1031">8,8</td></tr> <tr><td data-bbox="1317 363 1357 1031">Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</td><td data-bbox="1357 363 1382 1031">6,1</td></tr> <tr><td data-bbox="1382 363 1422 1031">Informasi dan Komunikasi</td><td data-bbox="1422 363 1446 1031">10,4</td></tr> <tr><td data-bbox="1446 363 1487 1031">Jasa Keuangan</td><td data-bbox="1487 363 1511 1031">7,9</td></tr> <tr><td data-bbox="1511 363 1552 1031">Real Estate</td><td data-bbox="1552 363 1576 1031">4,3</td></tr> <tr><td data-bbox="1576 363 1617 1031">Jasa Perusahaan</td><td data-bbox="1617 363 1624 1031">8,2</td></tr> <tr><td data-bbox="1641 363 1624 1031">Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib</td><td data-bbox="1682 363 1624 1031">4,0</td></tr> <tr><td data-bbox="1706 363 1624 1031">Jasa Pendidikan</td><td data-bbox="1747 363 1624 1031">5,9</td></tr> <tr><td data-bbox="1771 363 1624 1031">Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</td><td data-bbox="1812 363 1624 1031">8,2</td></tr> <tr><td data-bbox="1836 363 1624 1031">Jasa Lainnya</td><td data-bbox="1877 363 1624 1031">8,8</td></tr> </tbody> </table>	Uraian	2019	Pertumbuhan PDB	5,3	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,8	Pertambangan dan Penggalian	0,6	Industri Pengolahan	5,1	Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es	6,1	Pengadaan Air	5,0	Konstruksi	6,6	Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,3	Transportasi dan Pergudangan	8,8	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,1	Informasi dan Komunikasi	10,4	Jasa Keuangan	7,9	Real Estate	4,3	Jasa Perusahaan	8,2	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,0	Jasa Pendidikan	5,9	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,2	Jasa Lainnya	8,8
Uraian	2019 (Rentang)																																																																														
Pertumbuhan PDB	5,2-5,6																																																																														
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,7-4,0																																																																														
Pertambangan dan Penggalian	0,6-0,8																																																																														
Industri Pengolahan	4,9-5,4																																																																														
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es	6,0-6,4																																																																														
Pengadaan Air	4,9-5,5																																																																														
Konstruksi	6,4-7,0																																																																														
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,3-5,7																																																																														
Transportasi dan Pergudangan	8,7-9,0																																																																														
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,0-6,4																																																																														
Informasi dan Komunikasi	10,3-11,1																																																																														
Jasa Keuangan	7,8-8,4																																																																														
Real Estate	4,3-4,7																																																																														
Jasa Perusahaan	8,2-8,4																																																																														
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,9-4,2																																																																														
Jasa Pendidikan	5,8-6,2																																																																														
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,1-8,4																																																																														
Jasa Lainnya	8,6-9,1																																																																														
Uraian	2019																																																																														
Pertumbuhan PDB	5,3																																																																														
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,8																																																																														
Pertambangan dan Penggalian	0,6																																																																														
Industri Pengolahan	5,1																																																																														
Pengadaan Listrik dan Gas, dan Produksi Es	6,1																																																																														
Pengadaan Air	5,0																																																																														
Konstruksi	6,6																																																																														
Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,3																																																																														
Transportasi dan Pergudangan	8,8																																																																														
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,1																																																																														
Informasi dan Komunikasi	10,4																																																																														
Jasa Keuangan	7,9																																																																														
Real Estate	4,3																																																																														
Jasa Perusahaan	8,2																																																																														
Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	4,0																																																																														
Jasa Pendidikan	5,9																																																																														
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,2																																																																														
Jasa Lainnya	8,8																																																																														

M - 18

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		Sumber: Perhitungan Bappenas dan Kemenkeu, 2018	Sumber: UU APBN 2019
54.	Sektor Pertanian (Perubahan data pada Paragraf 3, Halaman II.24)	Sektor pertanian dalam arti luas diharapkan mampu tumbuh 3,7-4,0 persen, didorong oleh:	Sektor pertanian dalam arti luas diharapkan mampu tumbuh 3,8 persen, didorong oleh:
55.	Sektor industri pengolahan (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.25)	Sektor industri pengolahan diharapkan mampu tumbuh mencapai 4,9-5,4 persen (yoy) yang akan ditempuh dengan berbagai upaya dan kebijakan seperti:	Sektor industri pengolahan diharapkan mampu tumbuh mencapai 5,1 persen (yoy) yang akan ditempuh dengan berbagai upaya dan kebijakan seperti:
56.	Sektor informasi dan komunikasi (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.25)	Sektor informasi dan komunikasi diharapkan tumbuh 10,3-11,1 persen (yoy), didorong oleh:	Sektor informasi dan komunikasi diharapkan tumbuh 10,4 persen (yoy), didorong oleh:
57.	Sektor jasa keuangan dan asuransi (Perubahan data pada Paragraf 3, Halaman II.25)	Sektor jasa keuangan dan asuransi sebagai pendukung aspek pembiayaan, akses, dan transaksi keuangan baik perbankan maupun nonperbankan yang diharapkan tumbuh 7,8-8,4 persen (yoy), melalui:	Sektor jasa keuangan dan asuransi sebagai pendukung aspek pembiayaan, akses, dan transaksi keuangan baik perbankan maupun nonperbankan yang diharapkan tumbuh 7,9 persen (yoy), melalui:
58.	Sektor perdagangan (Perubahan data pada Paragraf 4, Halaman II.25)	Sektor perdagangan yang harus diperkuat baik untuk perdagangan konvensional (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) sehingga diharapkan sektor ini mampu tumbuh 5,3-5,7 persen (yoy) dengan didorong oleh berbagai kebijakan yang tepat, seperti:	Sektor perdagangan yang harus diperkuat baik untuk perdagangan konvensional (<i>offline</i>) maupun daring (<i>online</i>) sehingga diharapkan sektor ini mampu tumbuh 5,3 persen (yoy) dengan didorong oleh berbagai kebijakan yang tepat, seperti:
59.	Sektor konstruksi (Perubahan data pada Paragraf 5, Halaman II.25)	Sektor konstruksi diharapkan tumbuh 6,4-7,0 persen (yoy) dengan didorong oleh:	Sektor konstruksi diharapkan tumbuh 6,6 persen (yoy) dengan didorong oleh:
60.	Sektor transportasi dan pergudangan (Perubahan data pada Paragraf 6, Halaman II.25)	Sektor transportasi dan pergudangan akan didukung oleh perbaikan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antarwilayah serta arus lalu lintas barang dan penumpang sehingga diharapkan mampu tumbuh 8,7-9,0 persen (yoy) dengan didorong oleh:	Sektor transportasi dan pergudangan akan didukung oleh perbaikan infrastruktur yang meningkatkan konektivitas antarwilayah serta arus lalu lintas barang dan penumpang sehingga diharapkan mampu tumbuh 8,8 persen (yoy) dengan didorong oleh:
61.	Sektor pengadaan listrik, gas dan produksi es (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman II.26)	Sektor pengadaan listrik, gas dan produksi es diperkirakan akan tumbuh 6,0-6,4 persen (yoy) seiring pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan ketersediaan energi bagi rumah tangga dan industri.	Sektor pengadaan listrik, gas dan produksi es diperkirakan akan tumbuh 6,1 persen (yoy) seiring pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan ketersediaan energi bagi rumah tangga dan industri.
62.	Menjaga Stabilitas Makroekonomi di Tengah Tekanan Eksternal (Perubahan data dan narasi pada paragraf 2, Halaman II.26)	Di tengah tekanan eksternal, terutama normalisasi kebijakan moneter di negara maju, stabilitas ekonomi tetap terjaga. Hal ini tercermin dari defisit neraca transaksi berjalan yang masih berada dalam batas aman, meskipun diperkirakan meningkat seiring peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Penerimaan ekspor barang tahun 2019 diperkirakan mencapai US\$192,7-200,9 miliar, didorong oleh penerimaan dari ekspor nonmigas yang mencapai US\$174,2-180,8 miliar seiring dengan implementasi kebijakan	Di tengah tekanan eksternal, terutama normalisasi kebijakan moneter di negara maju, stabilitas ekonomi tetap terjaga. Hal ini tercermin dari defisit neraca transaksi berjalan yang masih berada dalam batas aman, meskipun diperkirakan meningkat seiring peningkatan aktivitas ekonomi domestik. Penerimaan ekspor barang tahun 2019 diperkirakan mencapai US\$200,8 miliar, didorong oleh penerimaan dari ekspor nonmigas yang mencapai US\$181,0 miliar seiring dengan implementasi kebijakan

M - 19

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		<p>diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar ekspor yang telah ada (<i>existing market</i>). Sementara itu, pengeluaran impor barang diperkirakan mencapai US\$182,9-192,2 miliar, didorong oleh besarnya impor nonmigas yang diperkirakan sebesar US\$156,1-165,2 miliar sebagai hasil dari peningkatan aktivitas produksi dalam negeri dan investasi. Dengan defisit neraca perdagangan jasa yang diperkirakan meningkat menjadi US\$9,5-9,9 miliar, maka neraca transaksi berjalan pada tahun 2019 diperkirakan defisit sebesar US\$29,1-32,1 miliar atau 2,5-2,7 persen terhadap PDB.</p> <p>Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap dapat ditutupi oleh neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap surplus di tahun 2019 karena prospek perekonomian domestik yang semakin baik. Arus masuk investasi langsung (neto) diperkirakan masih cukup kuat pada kisaran US\$20,6-20,9 miliar, didukung oleh semakin membaiknya iklim investasi, meningkatnya kemudahan berusaha di Indonesia, serta daya tarik ekonomi Indonesia sebagai pasar yang besar dan berkembang. Namun, pemulihan negara terutama AS dapat berisiko terhadap melambatnya arus masuk investasi portofolio (neto) ke Indonesia sehingga pertumbuhannya akan cenderung moderat. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2019 diperkirakan mencapai US\$0,6-0,9 miliar dengan cadangan devisa mencapai US\$125,5-127,8 miliar.</p> <p>Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat harga yang stabil. Pada tahun 2019, inflasi diperkirakan menghadapi risiko dari dampak kebijakan lanjutan harga-harga yang dikendalikan (<i>administered price</i>) dan adanya peningkatan harga komoditas pangan global dan minyak dunia. Namun, dampak peningkatan inflasi tidak sebesar pada tahun 2018, sehingga target inflasi 2019 berada pada rentang 2,5-4,5 persen. Sementara itu, nilai tukar diperkirakan akan berada di sekitar Rp13.700-14.000 per US\$ dengan kecenderungan depresiasi seiring dengan normalisasi kebijakan ekonomi negara-negara maju. Akan tetapi, nilai tukar rupiah diperkirakan masih sesuai fundamentalnya dengan tingkat volatilitas yang rendah, sehingga dapat tetap menjaga kepercayaan pasar dan daya saing ekspor.</p> <p>Stabil dan rendahnya inflasi pada tahun 2019 akan didukung oleh stabilitas di semua komponen inflasi baik harga bergejolak, harga yang diatur pemerintah, maupun inflasi inti. Secara umum, arah dan strategi kebijakan pengendalian inflasi nasional difokuskan pada: (1) pengendalian inflasi pangan (beras dan hortikultura) melalui upaya peningkatan pasokan, teknologi pasca panen, kerja sama antardaerah, serta penguatan koordinasi melalui Tim Pengendali Inflasi Nasional (TPIN); (2) mitigasi <i>second round effect</i> dari kenaikan harga minyak dunia terhadap kenaikan harga minyak</p>	<p>diversifikasi ekspor dan pendalaman pasar ekspor yang telah ada (<i>existing market</i>). Sementara itu, pengeluaran impor barang diperkirakan mencapai US\$198,1 miliar, didorong oleh besarnya impor nonmigas yang diperkirakan sebesar US\$166,3 miliar sebagai hasil dari peningkatan aktivitas produksi dalam negeri dan investasi. Dengan defisit neraca perdagangan jasa yang diperkirakan meningkat menjadi US\$8,2 miliar, maka neraca transaksi berjalan pada tahun 2019 diperkirakan defisit sebesar US\$31,3 miliar atau 2,5-3,0 persen terhadap PDB.</p> <p>Defisit transaksi berjalan diperkirakan tetap dapat ditutupi oleh neraca transaksi modal dan finansial yang diperkirakan tetap surplus di tahun 2019 karena prospek perekonomian domestik yang semakin baik. Arus masuk investasi langsung (neto) diperkirakan masih cukup kuat pada kisaran US\$19,5 miliar, didukung oleh semakin membaiknya iklim investasi, meningkatnya kemudahan berusaha di Indonesia, serta daya tarik ekonomi Indonesia sebagai pasar yang besar dan berkembang. Namun, pemulihan negara maju terutama AS dapat berisiko terhadap melambatnya arus masuk investasi portofolio (neto) ke Indonesia sehingga pertumbuhannya akan cenderung moderat. Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2019 diperkirakan mencapai US\$3,6 miliar dengan cadangan devisa mencapai US\$119,7 miliar.</p> <p>Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat harga yang terkendali. Pada tahun 2019, inflasi diperkirakan masih menghadapi risiko eksternal berupa kebijakan moneter AS dan penguatan USD, serta ketidakpastian pasar komoditas dan keuangan global. Selain itu, ekonomi dalam negeri akan menghadapi tahun politik dan tantangan untuk melanjutkan kebijakan <i>administered prices</i>. Untuk itu, tingkat inflasi diperkirakan sebesar 3,5 persen.</p> <p>Kebijakan stabilitas harga diarahkan pada: (1) meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian baik on-farm maupun off-farm (termasuk pengelolaan pascapanen); (2) melakukan pembenahan tata niaga pangan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital; (3) mempercepat pembangunan infrastruktur pangan dan konektivitas; (4) menjaga ketersediaan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui kerja sama antardaerah dan optimalisasi pemanfaatan dana Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CHSP) dan APBD untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); (5) mitigasi <i>second round effect</i> kebijakan <i>Administered Price</i>; (6) intervensi harga di pasar yang efektif dan tepat sasaran; (7) memastikan ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu penyaluran subsidi program (seperti ongkos angkut, tol laut, dan pupuk); (8) meningkatkan</p>

M - 20

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
63.	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan (Perubahan data pada Paragraf 2, Halaman II.27)	domestik, tarif transportasi, serta TTL; (3) penguatan kualitas statistik inflasi melalui penyempurnaan metodologi perhitungan inflasi, komitmen K/L untuk memperkuat data sekunder, dan harmonisasi data harga 10 komoditas pangan strategis; (4) percepatan pembangunan infrastruktur; dan 5) pembenahan tata niaga pangan melalui penguatan kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital.	kualitas data (produksi, harga, dan neraca arus barang) komoditas dan metodologi perhitungan inflasi; dan (9) meningkatkan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Selanjutnya, tekanan nilai tukar relatif membaik dan masih terdapat potensi apresiasi sehingga nilai tukar diperkirakan sebesar Rp15.000 per US\$. Upaya stabilisasi nilai tukar diarahkan pada sinergi bauran kebijakan moneter dan makroekonomi oleh Pemerintah dan Bank Indonesia.
64.	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan (Perubahan data pada Paragraf 3, Halaman II.28)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2000-2016 hanya 5,3 persen,	Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2000-2017 hanya 5,3 persen, sedangkan pada masa orde baru rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai lebih dari 7,0 persen.
65.	Kebutuhan Investasi (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.29)	Tingkat ketimpangan antarkelompok pendapatan yang diukur dengan rasio <i>gini</i> juga diharapkan dapat diturunkan pada kisaran 0,38-0,39 pada tahun 2019.	Tingkat ketimpangan antarkelompok pendapatan yang diukur dengan rasio <i>gini</i> juga diharapkan dapat diturunkan pada kisaran 0,380-0,385 pada tahun 2019.
	<p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional</p> <p>Sub-bab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro</p> <p>Sub-bab 2.2.3. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan</p> <p>Sub-bab 2.2.3.1. Kebutuhan Investasi</p>	<p>Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2019, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5.557,4-5.606,8 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah akan menyumbang sebesar 7,3-7,9 persen. Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang sebesar Rp448,7-727,8 triliun, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sebesar Rp4.397,5-4.701,4 triliun, dengan target realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri (PMA dan PMDN) sebesar Rp833,0-870,0 triliun (Tabel 2.8).</p>	<p>Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2019, kebutuhan investasi yang diperlukan sekitar Rp5.575,4 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, investasi pemerintah akan menyumbang sekitar 6,5 persen. Selain dari pemerintah, belanja modal BUMN diharapkan dapat menyumbang sekitar Rp449,5 triliun, sedangkan sisanya akan berasal dari swasta sebesar Rp4.764,9 triliun, termasuk target penanaman modal asing dan dalam negeri (PMA/PMDN) sebesar Rp833,0-870,0 triliun (Tabel 2.8).</p>

M - 21

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019			PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019		
		Uraian	Nilai (Rp Triliun)	Share (Persen)	Uraian	Nilai (Rp Triliun)	Share (Persen)
66.	Kebutuhan Investasi 2019 (Perubahan data pada Tabel 2.8 Kebutuhan Investasi 2019, Halaman II.29)						
		Total Kebutuhan Investasi	5.557,4-5.606,8	100,0	Total Kebutuhan Investasi	5.575,4	100,0
		a. Investasi Pemerintah	407,3-481,5	7,3-7,9	a. Investasi Pemerintah	361,1	6,5
		b. Investasi BUMN	448,7-727,8	8,1-10,2	b. Investasi BUMN	449,5	8,1
		c. Investasi Swasta	4.397,5-4.701,4	81,9-84,6	c. Investasi Swasta	4.764,9	85,5
		Sumber: Perhitungan Bappenas, 2018					
	Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.2. Kerangka Ekonomi Makro Sub-bab 2.2.3. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan Sub-bab 2.2.3.2. Sumber Pembiayaan						
67.	Sumber Pembiayaan (Perubahan data pada Paragraf 3, Halaman II.29)						
		Total Kebutuhan Investasi	66,1-72,3	100,0	Total Kebutuhan Investasi	74,0	100,0
		a. Investasi Pemerintah	4,4-4,5	6,6-6,2	a. Investasi Pemerintah	4,4	5,9
		b. Investasi BUMN	4,4-4,5	6,6-6,2	b. Investasi BUMN	4,4	5,9
		c. Investasi Swasta	57,3-63,3	86,4-87,8	c. Investasi Swasta	65,2	88,1
		Sumber: Perhitungan Bappenas, 2018					
68.	Sumber Pembiayaan Investasi 2019 (Perubahan data pada Tabel 2.9 Sumber Pembiayaan Investasi 2019, Halaman II.29)						
		Total Kebutuhan Investasi	74,0	100,0	Total Kebutuhan Investasi	74,0	100,0
		a. Investasi Pemerintah	4,4	5,9	a. Investasi Pemerintah	4,4	5,9
		b. Investasi BUMN	4,4	5,9	b. Investasi BUMN	4,4	5,9
		c. Investasi Swasta	65,2	88,1	c. Investasi Swasta	65,2	88,1
		Sumber: Perhitungan Bappenas, 2018					

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																																																																
69.	<p>Realisasi dan Perkiraan Kontribusi Wilayah Terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2015-2019 (Perubahan data pada Tabel 2.10 Realisasi dan Perkiraan Kontribusi Wilayah Terhadap Perekonomian Nasional Tahun 2015-2019, Halaman II.30)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wilayah</th> <th>2015^(*)</th> <th>2016^(*)</th> <th>2017^(*)</th> <th>2018^(**)</th> <th>2019^(**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pulau Sumatera</td> <td>22,18</td> <td>22,02</td> <td>21,66</td> <td>21,68</td> <td>21,63</td> </tr> <tr> <td>Pulau Jawa + Bali</td> <td>59,85</td> <td>60,06</td> <td>60,05</td> <td>59,94</td> <td>59,76</td> </tr> <tr> <td>Kepulauan Nusa Tenggara</td> <td>1,56</td> <td>1,58</td> <td>1,56</td> <td>1,55</td> <td>1,57</td> </tr> <tr> <td>Pulau Kalimantan</td> <td>8,16</td> <td>7,86</td> <td>8,20</td> <td>8,19</td> <td>8,30</td> </tr> <tr> <td>Pulau Sulawesi</td> <td>5,91</td> <td>6,04</td> <td>6,11</td> <td>6,19</td> <td>6,27</td> </tr> <tr> <td>Kepulauan Maluku</td> <td>0,52</td> <td>0,52</td> <td>0,52</td> <td>0,53</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>Pulau Papua</td> <td>1,83</td> <td>1,91</td> <td>1,91</td> <td>1,91</td> <td>1,94</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: BPS (diolah) Keterangan: *) Tahun 2015-2017 merupakan angka realisasi, **) Tahun 2018-2019 merupakan angka perkiraan</p>	Wilayah	2015 ^(*)	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)	Pulau Sumatera	22,18	22,02	21,66	21,68	21,63	Pulau Jawa + Bali	59,85	60,06	60,05	59,94	59,76	Kepulauan Nusa Tenggara	1,56	1,58	1,56	1,55	1,57	Pulau Kalimantan	8,16	7,86	8,20	8,19	8,30	Pulau Sulawesi	5,91	6,04	6,11	6,19	6,27	Kepulauan Maluku	0,52	0,52	0,52	0,53	0,54	Pulau Papua	1,83	1,91	1,91	1,91	1,94	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wilayah</th> <th>2015^(*)</th> <th>2016^(*)</th> <th>2017^(*)</th> <th>2018^(**)</th> <th>2019^(**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pulau Sumatera</td> <td>22,18</td> <td>22,02</td> <td>21,66</td> <td>21,71</td> <td>21,35</td> </tr> <tr> <td>Pulau Jawa + Bali</td> <td>59,85</td> <td>60,06</td> <td>60,05</td> <td>60,04</td> <td>60,32</td> </tr> <tr> <td>Kepulauan Nusa Tenggara</td> <td>1,56</td> <td>1,58</td> <td>1,56</td> <td>1,55</td> <td>1,55</td> </tr> <tr> <td>Pulau Kalimantan</td> <td>8,16</td> <td>7,86</td> <td>8,20</td> <td>8,17</td> <td>8,11</td> </tr> <tr> <td>Pulau Sulawesi</td> <td>5,91</td> <td>6,04</td> <td>6,11</td> <td>6,12</td> <td>6,24</td> </tr> <tr> <td>Kepulauan Maluku</td> <td>0,52</td> <td>0,52</td> <td>0,52</td> <td>0,52</td> <td>0,52</td> </tr> <tr> <td>Pulau Papua</td> <td>1,83</td> <td>1,91</td> <td>1,91</td> <td>1,88</td> <td>1,91</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: BPS (diolah) Keterangan: *) Tahun 2015-2017 merupakan angka realisasi; **) Tahun 2018-2019 merupakan angka perkiraan</p>	Wilayah	2015 ^(*)	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)	Pulau Sumatera	22,18	22,02	21,66	21,71	21,35	Pulau Jawa + Bali	59,85	60,06	60,05	60,04	60,32	Kepulauan Nusa Tenggara	1,56	1,58	1,56	1,55	1,55	Pulau Kalimantan	8,16	7,86	8,20	8,17	8,11	Pulau Sulawesi	5,91	6,04	6,11	6,12	6,24	Kepulauan Maluku	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	Pulau Papua	1,83	1,91	1,91	1,88	1,91
Wilayah	2015 ^(*)	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)																																																																																														
Pulau Sumatera	22,18	22,02	21,66	21,68	21,63																																																																																														
Pulau Jawa + Bali	59,85	60,06	60,05	59,94	59,76																																																																																														
Kepulauan Nusa Tenggara	1,56	1,58	1,56	1,55	1,57																																																																																														
Pulau Kalimantan	8,16	7,86	8,20	8,19	8,30																																																																																														
Pulau Sulawesi	5,91	6,04	6,11	6,19	6,27																																																																																														
Kepulauan Maluku	0,52	0,52	0,52	0,53	0,54																																																																																														
Pulau Papua	1,83	1,91	1,91	1,91	1,94																																																																																														
Wilayah	2015 ^(*)	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)																																																																																														
Pulau Sumatera	22,18	22,02	21,66	21,71	21,35																																																																																														
Pulau Jawa + Bali	59,85	60,06	60,05	60,04	60,32																																																																																														
Kepulauan Nusa Tenggara	1,56	1,58	1,56	1,55	1,55																																																																																														
Pulau Kalimantan	8,16	7,86	8,20	8,17	8,11																																																																																														
Pulau Sulawesi	5,91	6,04	6,11	6,12	6,24																																																																																														
Kepulauan Maluku	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52																																																																																														
Pulau Papua	1,83	1,91	1,91	1,88	1,91																																																																																														
70.	<p>Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Papua Tahun 2019 (Perubahan data pada Paragraf 6, Halaman II.32)</p>	<p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah Sub-bab 2.3.1. Arah Pengembangan Wilayah Papua</p>	<p>Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Papua terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 1,94 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,92 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 24,39 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,51 persen (Gambar 2.17).</p>																																																																																																
71.	<p>Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Papua Tahun 2019 (Perubahan data pada Gambar 2.17 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Papua Tahun 2019, Halaman II.33)</p>	<p>Gambar 2.17 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Papua Tahun 2019</p>	<p>Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Papua terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 1,91 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,58 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 24,52 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,51 persen (Gambar 2.17).</p> <p>Gambar perubahan pada Lampiran II.</p>																																																																																																

M - 23

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
72.	<p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah Sub-bab 2.3.2. Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Maluku</p> <p>Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019 (Perubahan data pada Paragraf 8, Halaman II.34)</p>	<p>Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Kepulauan Maluku terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 0,53 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,74 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 11,03 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 6,89 persen (Gambar 2.18).</p>	<p>Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Kepulauan Maluku terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 0,52 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,08 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 12,25 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 6,89 persen (Gambar 2.18).</p>
73.	<p>Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019 (Perubahan data pada Gambar 2.18 Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019, Halaman II.35)</p>	<p>Gambar 2.18 Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019</p>	<p>Gambar perubahan pada Lampiran II.</p>
74.	<p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah Sub-bab 2.3.3. Arah Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara</p> <p>Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019 (Perubahan data pada Paragraf 7, Halaman II.36).</p>	<p>Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 1,57 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,94 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 20,71 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 3,99 persen (Gambar 2.19).</p>	<p>Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 1,55 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,95 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 21,81 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 3,99 persen (Gambar 2.19).</p>
75.	<p>Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019 (Terdapat perubahan data pada Gambar 2.19 Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019, Halaman II.37)</p>	<p>Gambar 2.19 Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019</p>	<p>Gambar perubahan pada Lampiran II.</p>

M - 24

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
	<p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah Sub-bab 2.3.4. Arah Pengembangan Wilayah Pulau Sulawesi</p>		
76.	<p>Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019 (Perubahan data pada Paragraf 7, Halaman II.38)</p>	<p>Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Sulawesi terhadap perekonomian Nasional diperkirakan dapat mencapai 6,27 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 7,14 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 7,14 persen, dengan TPT 4,60 persen (Gambar 2.20)</p>	<p>Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Sulawesi terhadap perekonomian Nasional diperkirakan dapat mencapai 6,24 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,72 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 10,15 persen, dengan TPT 4,60 persen (Gambar 2.20).</p>
77.	<p>Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019 (Perubahan data pada Gambar 2.20 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019, Halaman II.40)</p>	<p>Gambar 2.20 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019</p>	<p>Gambar perubahan pada Lampiran II.</p>
	<p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah Sub-bab 2.3.5. Arah Pengembangan Wilayah Pulau Kalimantan</p>		
78.	<p>Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019 (Perubahan data pada Paragraf 6, Halaman II.41)</p>	<p>Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Kalimantan terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 8,30 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,41 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 4,68 persen, dengan TPT 5,10 persen (Gambar 2.21).</p>	<p>Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Kalimantan terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 8,11 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,10 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 5,51 persen, dengan TPT 5,10 persen (Gambar 2.21).</p>
79.	<p>Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019 (Perubahan data pada Gambar 2.21 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019, Halaman II.42)</p>	<p>Gambar 2.21 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019</p>	<p>Gambar perubahan pada Lampiran II.</p>
	<p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.3. Arah Pengembangan Wilayah Sub-bab 2.3.6. Arah Pengembangan Wilayah Pulau Jawa dan Bali</p>		
80.	<p>Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019</p>	<p>Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Jawa dan Bali terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 59,76 persen, dengan</p>	<p>Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Jawa dan Bali terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 60,32 persen, dengan</p>

M - 25

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																			
81.	Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019 (Perubahan data pada Gambar 2.22 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019, Halaman II.46)	Gambar 2.22 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019	Gambar perubahan pada Lampiran II.																																			
82.	Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019 (Perubahan data pada Paragraf 4, Halaman II.47)	Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Sumatera terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 21,63 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 9,01 persen, dengan TPT 5,85 persen (Gambar 2.23).	Pada tahun 2019 kontribusi wilayah Pulau Sumatera terhadap perekonomian nasional diperkirakan dapat mencapai 21,35 persen, dengan laju pertumbuhan ekonomi sebesar 4,60 persen. Sementara itu untuk tingkat kemiskinan, diperkirakan 9,71 persen, dengan TPT 5,85 persen (Gambar 2.23).																																			
83.	Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019 (Perubahan data pada Gambar 2.23 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019, Halaman II.48)	Gambar 2.23 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019	Gambar perubahan pada Lampiran II.																																			
84.	Pondasi Pembangunan (Perubahan data pada Tabel 2.11 Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2019, Halaman II.49)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 1614 727 1716">PN</th> <th data-bbox="678 1390 727 1614">Prioritas Nasional</th> <th colspan="3" data-bbox="678 1041 727 1390">Alokasi Prioritas Nasional (Rp. Triliun)</th> </tr> <tr> <td data-bbox="678 1614 727 1716"></td> <td data-bbox="678 1390 727 1614"></td> <th data-bbox="678 1265 727 1390">Belanja K/L</th> <th data-bbox="678 1166 727 1265">KPPU-AP)</th> <th data-bbox="678 1041 727 1166">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 1614 727 1716">01</td> <td data-bbox="678 1390 727 1614">Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</td> <td data-bbox="678 1265 727 1390">185.185,1</td> <td data-bbox="678 1166 727 1265">0,0</td> <td data-bbox="678 1041 727 1166">185.185,1</td> </tr> </tbody> </table>	PN	Prioritas Nasional	Alokasi Prioritas Nasional (Rp. Triliun)					Belanja K/L	KPPU-AP)	Jumlah	01	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	185.185,1	0,0	185.185,1	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="678 966 727 1031">PN</th> <th data-bbox="678 692 727 966">Prioritas Nasional</th> <th colspan="3" data-bbox="678 393 727 692">Alokasi Prioritas Nasional (Rp. Triliun)</th> </tr> <tr> <td data-bbox="678 966 727 1031"></td> <td data-bbox="678 692 727 966"></td> <th data-bbox="678 568 727 692">Belanja K/L</th> <th data-bbox="678 468 727 568">KPPU-AP)</th> <th data-bbox="678 393 727 568">Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="678 966 727 1031">01</td> <td data-bbox="678 692 727 966">Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar</td> <td data-bbox="678 568 727 692">205,1</td> <td data-bbox="678 468 727 568">0,0</td> <td data-bbox="678 393 727 568">205,1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 966 727 1031">02</td> <td data-bbox="678 692 727 966">Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman</td> <td data-bbox="678 568 727 692">45,6</td> <td data-bbox="678 468 727 568">8,5</td> <td data-bbox="678 393 727 568">54,1</td> </tr> </tbody> </table>	PN	Prioritas Nasional	Alokasi Prioritas Nasional (Rp. Triliun)					Belanja K/L	KPPU-AP)	Jumlah	01	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	205,1	0,0	205,1	02	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	45,6	8,5	54,1
PN	Prioritas Nasional	Alokasi Prioritas Nasional (Rp. Triliun)																																				
		Belanja K/L	KPPU-AP)	Jumlah																																		
01	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	185.185,1	0,0	185.185,1																																		
PN	Prioritas Nasional	Alokasi Prioritas Nasional (Rp. Triliun)																																				
		Belanja K/L	KPPU-AP)	Jumlah																																		
01	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	205,1	0,0	205,1																																		
02	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	45,6	8,5	54,1																																		
	Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.4. Pendanaan Pembangunan																																					

M - 26

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
02	Peningkatan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	50.165,1	21,0
03	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	23.233,4	43,9
04	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	44.507,3	64,5
05	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	64.331,0	64,5
	Jumlah	367.421,9	380,1
	Jumlah	7.163,0	8,5
	Jumlah	374.584,9	388,6
	Sumber: SB Pagu Anggaran TA 2019 (diolah), 2018.		
	Keterangan :		
	1. Rincian Proyek Prioritas beserta alokasi anggarannya masih bersifat sementara. Penajaman dan pemutakhiran proyek prioritas dan alokasinya akan dilakukan dalam proses selanjutnya hingga penetapan APBN, termasuk integrasi sumber-sumber pendanaan lainnya.		
	2. Rincian proyek prioritas di masing-masing K/L menjadi lampiran dalam Surat Bersama (SB) Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Anggaran TA 2019 serta Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Daftar Proyek Prioritas.		
	3. Belanja K/L adalah Belanja Negara yang dikelompokkan menurut organisasi dan fungsi K/L serta digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan K/L.		
	4. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha - <i>Availability Payment</i> (KPB-U-AP) adalah Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur yang pembayarannya dilakukan secara berkala oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPB-U.		
	5. Rincian Integrasi: Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2019 menjadi bagian dari Suplemen RKP.		
	Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional		
	Sub-bab 2.4. Pendanaan Pembangunan		
	Sub-bab 2.4.1. Pagu Belanja Kementerian/Lembaga		
85.	Pagu Belanja Kementerian/Lembaga (Perubahan data dan narasi)	57.228,1	21,0

Sumber:
a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018
b) KPB-U-AP : Public Private Partnership (PPP) *Project Pipeline* (diolah), 2018
Keterangan: *) Terdapat potensi KPB-U lainnya diluar KPB-U - AP

M - 27

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
	pada Paragraf 2, Halaman II.50)	sasaran Prioritas Bidang RPJMN 2015-2019 yang dialokasikan sebesar Rp130,4 triliun. Dengan demikian, total Belanja K/L untuk mendanai seluruh sasaran pembangunan adalah sejumlah Rp497,8 triliun atau 85 persen dari total Belanja Non-Operasional K/L.	lokasi, target, dan instansi pelaksana yang jelas untuk mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional. Hal ini dilakukan mengingat aspek pengendalian terutama untuk pendanaan prioritas nasional menjadi perhatian di dalam pengalokasian belanja K/L.
86.	Suplemen Matrik Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional	Tabel 1 Total alokasi prioritas nasional Rp. 374,6 M	Tabel 1 Total alokasi prioritas nasional Rp 388,6 M (Suplemen Matrik Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional pada Lampiran III)
	Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.4. Pendanaan Pembangunan Sub-bab 2.4.2. Dana Transfer Sub-bab 2.4.2.1. Dana Perimbangan		
87.	Bidang, Subbidang, dan Menu Kegiatan DAK Fisik Tahun 2019 (Perubahan narasi pada Tabel 2.12 Bidang, Subbidang, dan Menu Kegiatan DAK Fisik Tahun 2019, Halaman II.53)	Arah kebijakan DAK-Reguler Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan • Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas 	Arah kebijakan DAK-Reguler Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dalam rangka pemenuhan secara bertahap standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan • Meningkatkan ketersediaan/keterjaminan akses, dan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang berkualitas. • Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga dan prestasi olahraga melalui penyediaan prasarana olahraga berupa bangunan Gedung Olahraga (GOR) dan penyediaan sarannya • Meningkatkan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial serta meningkatkan budaya gemar membaca melalui kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan
	Menu kegiatan DAK - Reguler Subbidang Olahraga 1. Pembangunan Prasarana Gedung Olahraga	Menu kegiatan DAK - Reguler Subbidang Olahraga 1. Pembangunan Prasarana Gedung Olahraga	Menu kegiatan DAK - Reguler Subbidang Olahraga 1. Pembangunan Prasarana Gedung Olahraga (termasuk penyediaan sarannya).
	Arah kebijakan DAK - Reguler Jalan Membangun daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang menunjang konektivitas system jaringan transportasi	Arah kebijakan DAK - Reguler Jalan Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang menunjang konektivitas sistem jaringan transportasi dan mobilitas ke fasilitas-fasilitas	Arah kebijakan DAK - Reguler Jalan Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan kondisi mantap jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota yang menunjang konektivitas sistem jaringan transportasi dan mobilitas ke fasilitas-fasilitas

M - 28

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		<p>dan mobilitas ke fasilitas-fasilitas pelayanan dasar public serta pusat-pusat pertumbuhan/perekonomian daerah. Tujuan adalah mendukung peningkatan kondisi jalan daerah (jalan provinsi, jalan kabupaten/kota) sesuai dengan target RPJMN 2015-2019</p> <p>Menu Kegiatan DAK – Afirmasi</p> <p>Subbidang Sekolah Menengah Atas (SMA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA 2. Pembangunan Asrama Siswa beserta perabotnya 	<p>pelayanan dasar publik serta pusat-pusat pertumbuhan/perekonomian daerah, sesuai dengan target RPJMN 2015-2019</p> <p>Menu Kegiatan DAK – Afirmasi</p> <p>Subbidang Sekolah Menengah Atas (SMA)</p> <p>Pembangunan Rumah Dinas Guru dan Asrama Siswa SMA</p>
		<p>Menu Kegiatan DAK – Afirmasi</p> <p>Subbidang Sekolah Menengah Atas (SMA)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Rumah Dinas Guru SMA 2. Pembangunan Asrama Siswa beserta perabotnya 	<p>Menu Kegiatan DAK – Afirmasi</p> <p>Air Minum Perdesaan (kawasan khusus):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun 2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum 3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
		<p>Menu kegiatan DAK – Afirmasi</p> <p>Air Minum Perkotaan (untuk kawasan kumuh dan SPAM regional):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun 2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum 3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun 	<p>Menu kegiatan DAK – Afirmasi</p> <p>Air Minum Perdesaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun 2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum 3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun
		<p>Menu kegiatan DAK – Penugasan</p> <p>Air Minum Perkotaan (untuk kawasan kumuh dan SPAM regional):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun 2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum 3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun <p>Air Minum Perdesaan (untuk perluasan PAMSIMAS):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS 2. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangunkhusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS 	<p>Menu kegiatan DAK – Penugasan</p> <p>Air Minum Perkotaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun 2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan air minum 3. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun <p>Air Minum Perdesaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perluasan SPAM perpipaan melalui pemanfaatan <i>idle capacity</i> Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terbangun khusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS 2. Peningkatan SPAM melalui penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangunkhusus untuk Desa yang sudah melaksanakan PAMSIMAS
		<p>Arah kebijakan DAK – Penugasan</p> <p>Jalan</p>	<p>Arah kebijakan DAK – Penugasan</p> <p>Jalan</p>

M - 29

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
	<p>Jalan</p> <p>Membantu daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat terhadap Kawasan PN (KI, KEK, KSPN, Wilayah <i>Debofeneking</i>, Daerah Tertinggal, Daerah Perbatasan Negara) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional (simpul-simpul transportasi dan jalur logistik nasional), serta mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat pada Kawasan PN (KI, KEK, KSPN, Wilayah <i>Debofeneking</i>, Daerah Tertinggal, dan Daerah Perbatasan Negara) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional (simpul-simpul transportasi dan jalur logistik nasional), serta mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat</p>	<p>Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi melalui peningkatan konektivitas, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat pada Kawasan PN (KI, KEK, KSPN, Wilayah <i>Debofeneking</i>, Daerah Tertinggal, dan Daerah Perbatasan Negara) yang terintegrasi dalam sistem jaringan transportasi nasional (simpul-simpul transportasi dan jalur logistik nasional), serta mendukung percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat</p>
	<p>Arah kebijakan DAK – Penugasan</p> <p>Pariwisata</p> <p>Membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi PN.</p>	<p>Arah kebijakan DAK – Penugasan</p> <p>Pariwisata</p> <p>Membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi PN.</p>	<p>Arah kebijakan DAK – Penugasan</p> <p>Pariwisata</p> <p>Membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan 10 Destinasi Prioritas dan KSPN Toraja</p>
	<p>Arah kebijakan DAK – Penugasan</p> <p>Lingkungan Hidup dan Kesehatan Subbidang Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang ditutamakan mendukung PN kesehatan, perumahan dan permukiman air bersih dan sanitasi. Pariwisata, daerah tertinggal, perbatasan dan transmigrasi. 2. Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019. 3. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah 	<p>Arah kebijakan DAK – Penugasan</p> <p>Lingkungan Hidup dan Kesehatan Subbidang Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang ditutamakan mendukung PN kesehatan, perumahan dan permukiman air bersih dan sanitasi. Pariwisata, daerah tertinggal, perbatasan dan transmigrasi. 2. Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019. 3. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah 	<p>Arah kebijakan DAK – Penugasan</p> <p>Lingkungan Hidup dan Kesehatan Subbidang Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 dan Nawacita yang ditutamakan mendukung PN kesehatan, perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi, pariwisata, daerah tertinggal, serta perbatasan dan transmigrasi. 2. Mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKHL) sebesar 66,5-68,5 di tahun 2019. 3. Melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah
	<p>Menu kegiatan DAK - Penugasan</p> <p>Subbidang Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukung 2. Pengadaan Alat Angkut Sampah <i>dump truck</i> 3. Pengadaan Alat Angkut Sampah <i>arm roll</i> 4. Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran Air Limbah Cair melalui IPAL USK 5. Pengadaan Alat/Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, 	<p>Menu kegiatan DAK – Penugasan</p> <p>Subbidang Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukung (Bank Sampah, Rumah Pengomposan, Alat Angkut Sampah <i>Dump Truck</i>, dan Alat Angkut Sampah <i>Arm Roll</i>) 2. Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran Air Limbah Cair (IPAL Usaha Skala Kecil, Alat/Sistem Pemantauan Kualitas Air secara Kontinyu, Otomatis, dan Online, dan Peralatan Laboratorium untuk Uji 	<p>Menu kegiatan DAK – Penugasan</p> <p>Subbidang Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Sampah serta Sarana Prasarana Pendukung (Bank Sampah, Rumah Pengomposan, Alat Angkut Sampah <i>Dump Truck</i>, dan Alat Angkut Sampah <i>Arm Roll</i>) 2. Pengurangan dan Pengendalian Beban Pencemaran Air Limbah Cair (IPAL Usaha Skala Kecil, Alat/Sistem Pemantauan Kualitas Air secara Kontinyu, Otomatis, dan Online, dan Peralatan Laboratorium untuk Uji

M - 30

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
	<p>Otomatis, dan <i>Online</i></p> <p>6. Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Air</p> <p>7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Emas Non-Merkuri</p> <p>8. Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Merkuri</p> <p>9. Pengadaan Pencemaran Udara di Prov/Kab/Kota Metropolitan, Besar, dan Ibukota Provinsi Rawan KARHUTLA</p>	<p>2. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai <i>equalization grant</i>) yang ditunjukkan oleh <i>Index Williamson</i> yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.</p> <p>Adapun kebijakan DAU Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :</p> <p>a. menyempurnakan formula DAU dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar (gaji PNSD) dan Celah Fiskal, sehingga semakin fokus pada tujuan pemerataan kemampuan fiskal antardaerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat di daerah;</p> <p>b. mempertahankan afirmasi kepada daerah kepulauan dengan tetap memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah menjadi 100 persen;</p> <p>c. pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat berubah sesuai perubahan PDN Neto; dan</p> <p>d. mengarahkan minimal 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi.</p>	<p>Kualitas Air)</p> <p>3. Pengendalian Merkuri pada Pertambangan Emas Rakyat (Sarana dan Prasarana Pengolahan Emas Non-Merkuri dan Peralatan Laboratorium untuk Uji Kualitas Merkuri)</p> <p>4. Pengendalian Pencemaran Udara di Prov/Kab/Kota Metropolitan, Besar, dan Ibukota Provinsi Rawan KARHUTLA (Peralatan Stasiun Pemantau Tetap dan Regional Center Pemantau Kualitas Udara)</p> <p>2. Dana Alokasi Umum (DAU)</p> <p>Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah (sebagai <i>equalization grant</i>) yang ditunjukkan oleh Indeks Williamson yang paling optimal dengan mengevaluasi bobot Alokasi Dasar dan/atau variabel kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dengan arah mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah. DAU Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:</p> <p>a. DAU yang dialokasikan berdasarkan formula; dan</p> <p>b. DAU Tambahan yang dialokasikan untuk dukungan pendanaan keurahan dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana keurahan dan pemberdayaan masyarakat di keurahan.</p> <p>Adapun kebijakan DAU Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Pagu DAU nasional dalam APBN bersifat final untuk memberikan kepastian pendanaan bagi APBD mengingat sampai saat ini sebagian besar sumber pendapatan daerah masih bergantung dari alokasi DAU;</p> <p>b. Penyempurnaan formula DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar (gaji PNSD) yang telah memperhitungkan Gaji Reguler, termasuk Kenaikan Gaji 5%, Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR), serta formasi Calon PNSD, bobot variabel kebutuhan fiskal daerah, bobot variabel kapasitas fiskal daerah, serta memperbaiki indeks pemerataan kemampuan fiskal antardaerah agar setiap daerah mempunyai kemampuan yang sama untuk menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan publik;</p> <p>c. Penyesuaian proporsi pembagian pagu alokasi DAU nasional untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhitungkan beban pengalihan urusan antartingkat pemerintahan dengan porsi DAU provinsi sebesar 14,1 persen dan kabupaten/kota sebesar 85,9 persen;</p>

M - 31

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
88.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik (Perubahan matriks pada Paragraf 3, Halaman II.63)	2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka tahun 2019 dilakukan perbaikan arah kebijakan dalam pengelolaan DAK Non-Fisik, antara lain melalui: a. ... kesehatan penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran penerima dan <i>unit cost</i> ; b. penyempurnaan pengalokasian melalui pemutakhiran data sasaran penerima dan <i>unit cost</i> ; c. pengalokasian berdasarkan peningkatan kualitas kinerja; d. penguatan penerapan penyaluran berbasis kinerja untuk seluruh jenis DAK Non-Fisik dan peningkatan efektivitas pemantauan penggunaan serta upaya mengurangi SILPA DAK Non-Fisik di daerah; dan e. mendorong pemanfaatan media teknologi informasi untuk peningkatan output layanan dan efisiensi biaya layanan.	d. Pemberian afirmasi kebijakan untuk memberikan bobot luas wilayah laut dalam variabel luas wilayah sebesar 100 persen tetap dipertahankan; dan e. Pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU (DAU dan DBH) untuk membiayai belanja infrastruktur dalam rangka mendorong percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perekonomian daerah, disertai penggiatan berupa penganan sanksi atas kepatuhan penyampaian laporan dan pemenuhan alokasi minimal DTU untuk infrastruktur tersebut. 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, maka tahun 2019 dilakukan perbaikan arah kebijakan dalam pengelolaan DAK Non-Fisik, antara lain melalui: a. pengalokasian disesuaikan dengan kebutuhan riil di daerah, berdasarkan jumlah sasaran yang dibutuhkan untuk mencapai SPM, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan pemutakhiran data sasaran penerima dan <i>unit cost</i> ; b. perbaikan kualitas kinerja untuk seluruh bidang DAK Non Fisik melalui: (i). Pengalokasian berbasis kinerja (dimulai dengan alokasi BOS berbasis kinerja sekolah); dan (ii). Penyaluran berbasis kinerja dan peningkatan efektivitas pemantauan penggunaan serta upaya mengurangi SILPA DAK Non Fisik di daerah; c. mendorong penggunaan dukungan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas layanan publik di daerah; d. penguatan kebijakan afirmasi dalam mengalokasikan DAK Nonfisik untuk daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal); dan e. penambahan jenis DAK Nonfisik jenis baru yaitu BOP Kesetaraan, BOP Museum dan Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataaan, dan Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS).
89.	Jenis DAK Non-Fisik (Perubahan matriks pada Paragraf 3, Halaman II.63)	Jenis DAK Non-Fisik adalah : e. ... Diberikan kepada PNSD di daerah khusus yakni desa sangat tertinggal sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas; h. ... Dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM;	Jenis DAK Non-Fisik adalah : e. Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD di Daerah Khusus. Diberikan kepada guru garis depan (GGD) dan guru PNSD di daerah khusus yakni desa sangat tertinggal sebagai kompensasi atas kesulitan hidup dalam melaksanakan tugas; h. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (P2UKM). Dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas SDM Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

M - 32

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		<p>k. Dana Biaya Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik/PLTsa (Inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP). Dialokasikan untuk membantu daerah atas biaya pengolahan sampah menjadi energi listrik;</p> <p>m. Dialokasikan untuk operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya.</p>	<p>k. Dana Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah (BLPS) (Inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP). Dialokasikan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan melalui pengurangan sampah secara signifikan;</p> <p>m. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (inisiatif baru yang akan disinkronkan dengan penyusunan RKP).Dialokasikan untuk membantu operasional penyelenggaraan museum dan taman budaya agar memenuhi standar pelayanan teknis museum dan taman budaya.</p>
	<p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.4. Pendanaan Pembangunan Sub-bab 2.4.2. Dana Transfer Sub-bab 2.4.2.4. Dana Desa</p>		
90.	<p>Strategi kebijakan Dana Desa (Perubahan naraasi pada Paragraf 5, Halaman II.65)</p>	<p>Untuk mewujudkan hal tersebut, arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan (afirmasi) kepada desa-desa tertinggal, dan desa-desa dengan jumlah penduduk miskin tinggi, jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa. 2. Mengutamakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa terutama kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan sosial dasar; b. perluasan kesempatan kerja melalui skema padat karya tunai desa yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah menganggur, serta memberikan perhatian kepada kepala keluarga yang memiliki istri yang sedang mengandung atau memiliki anak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang rawan <i>stunting</i>. c. pengembangan, modal sosial budaya, dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa; dan d. perluasan akses informasi dan pemasaran. 3. Mengoptimalkan perencanaan partisipatif desa melalui pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada aparat pemerintah desa dan masyarakat desa dalam perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Dana Desa. 	<p>Untuk mewujudkan hal tersebut, strategi kebijakan Dana Desa pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyempurnakan pengalokasian Dana Desa dengan memperhatikan aspek keadilan dan keberpihakan (afirmasi) kepada desa-desa tertinggal, dan desa-desa dengan memperhatikan jumlah penduduk miskin tinggi, jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa. 2. Mengutamakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pembangunan desa terutama kegiatan: <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk pelayanan sosial dasar; b. peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan penanggulangan kemiskinan di Desa termasuk perluasan kesempatan kerja melalui skema padat karya tunai desa yang dapat memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat desa yang miskin, menganggur, setengah menganggur, serta memberikan perhatian kepada kepala keluarga yang memiliki istri yang sedang mengandung atau memiliki anak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang rawan <i>stunting</i>. c. pengembangan kapasitas, modal sosial budaya, dan ketahanan sosial budaya masyarakat desa; dan d. perluasan akses informasi dan pemasaran. 3. Mengoptimalkan perencanaan partisipatif Desa melalui pendampingan, pelatihan, dan pembinaan kepada aparat pemerintah

M - 33

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		<p>4. Meningkatkan kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mengelola Dana Desa, serta tenaga pendamping dalam pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>5. Mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendampingan (supervisi), pemantauan, pelaporan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.</p> <p>6. Melakukan penyederhanaan aturantentang pengelolaan Dana Desa.</p> <p>7. Memperkuat kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan manfaat Dana Desa.</p>	<p>desa dan masyarakat desa dalam perencanaan, penyuluran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan Dana Desa.</p> <p>4. Meningkatkan kesiapan dan kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dan mengelola Dana Desa, serta tenaga pendamping dalam pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>5. Mengoptimalkan peran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pendampingan (supervisi), pemantauan, pelaporan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.</p> <p>6. Melakukan penyederhanaan aturantentang pengelolaan Dana Desa.</p> <p>7. Memperkuat kerja sama Desa dengan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan manfaat Dana Desa.</p>
91.	<p>Sumber Pendanaan Lainnya (KPB dan PINA) (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.66)</p>	<p>Dalam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana investasi pembangunan sebesar Rp4.796 triliun. Dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut, Pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD hanya dapat membiayai sekitar Rp1.979 triliun atau 41,3 persen dari kebutuhan total pendanaan. Sementara itu, <i>gap</i> kebutuhan investasi sebesar 58,7 persen, dapat dipenuhi pemerintah baik melalui KPB maupun PINA, yaitu dengan penggunaan dana BUMN sebesar Rp1.066,2 triliun (22,2 persen) dan investasi dana swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5 persen). Kerangka pendanaan tersebut diperkuat dengan penetapan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Di dalam PP tersebut, alokasi pada prioritas akan dibiayai melalui pengintegrasian sumber-sumber pendanaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun nonpemerintah.</p>	<p>Dalam mendukung arahan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019, Pemerintah Indonesia membutuhkan dana investasi pembangunan sebesar Rp4.796 triliun. Dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut, Pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD diperkirakan hanya dapat membiayai sekitar Rp1.979 triliun atau 41,3 persen dari kebutuhan total pendanaan. Sementara itu, <i>gap</i> kebutuhan investasi sebesar 58,7 persen, dapat dipenuhi dengan mengkomibinasikan anggaran pemerintah dan swasta melalui skema KPB maupun dari sumber nonanggaran pemerintah melalui skema PINA, dimana perkiraan penggunaan dana BUMN sebesar Rp1.066,2 triliun (22,2 persen) dan investasi dana swasta sebesar Rp1.751,5 triliun (36,5 persen). Kerangka pendanaan tersebut diperkuat dengan penetapan PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Di dalam PP tersebut, alokasi pada prioritas akan dibiayai melalui pengintegrasian sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan, baik sumber pendanaan pemerintah maupun nonpemerintah.</p>
92.	<p>Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPB) (Perubahan narasi pada Paragraf</p>	<p>Saat ini, penyelenggaraan skema KPB dapat diterapkan ke dalam 19 sektor infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi, yaitu: transportasi, jalan, ketenagalistrikan, minyak, gas, dan energi baru terbarukan, konservasi</p>	<p>Saat ini, penyelenggaraan skema KPB dapat diterapkan ke dalam 19 sektor infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi, yaitu: transportasi, jalan, ketenagalistrikan, minyak, gas, dan energi baru terbarukan, konservasi</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
1.	Halaman II.67)	<p>energi, serta telekomunikasi dan informatika, maupun infrastruktur sosial, yaitu air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, sumber daya air dan irigasi, fasilitas perkotaan, perumahan rakyat, pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga kemasyarakatan, sarana olahraga, kesenian dan budaya, kawasan, dan kesehatan, dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (<i>user fee</i>), pembayaran oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>), ataupun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>energi, serta telekomunikasi dan informatika, maupun infrastruktur sosial, yaitu air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, sumber daya air dan irigasi, fasilitas perkotaan, perumahan rakyat, pariwisata, fasilitas pendidikan, lembaga kemasyarakatan, sarana olahraga, kesenian dan budaya, kawasan, dan kesehatan, dengan landasan hukumnya yang telah dimuat dalam Perpres Nomor 38 Tahun 2015. Selain dari 19 sektor infrastruktur tersebut, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat mengajukan permohonan KPBU untuk jenis infrastruktur lain kepada Menteri Perencanaan sesuai yang tercantum dalam pasal 4 Permen PPN Nomor 4 Tahun 2015. Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa bentuk pengembalian investasi kepada pihak swasta (badan usaha) atas penyediaan infrastruktur dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna infrastruktur dalam bentuk tarif (<i>user fee</i>), pembayaran oleh Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) melalui skema ketersediaan layanan (<i>availability payment</i>), ataupun pembayaran dalam bentuk lainnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>
93.	<p>Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman II.67)</p>	<p>Proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diprakarsai oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang disebut dengan <i>solicited project</i> maupun KPBU yang diprakarsai oleh pihak swasta/Badan Usaha/BUMN/BUMD yang disebut sebagai <i>unsolicited project</i>. Proses pelaksanaan skema KPBU <i>solicited</i> dan <i>unsolicited project</i> memiliki tahapan yang sama, yaitu tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada skema KPBU <i>unsolicited project</i>, terdapat persyaratan utama dalam pengusulannya, yaitu terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; layak secara ekonomi dan finansial; dan badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur (Gambar 2.25).</p>	<p>Proyek infrastruktur dengan skema KPBU dapat diprakarsai oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah yang disebut dengan <i>solicited project</i> maupun KPBU yang diprakarsai oleh pihak Swasta/Badan Usaha/BUMN/BUMD yang disebut sebagai <i>unsolicited project</i>. Proses pelaksanaan skema KPBU <i>solicited</i> dan <i>unsolicited project</i> memiliki tahapan yang sama, yaitu tahap perencanaan, penyiapan, dan transaksi. Pada skema KPBU <i>unsolicited project</i>, terdapat tiga persyaratan utama dalam pengusulannya, yaitu terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan; layak secara ekonomi dan finansial; dan badan usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur (Gambar 2.25).</p>
94.	<p>Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) (Perubahan narasi pada Paragraf 3, Halaman II.67)</p>	<p>PINA merupakan mekanisme pembiayaan untuk proyek investasi yang bersifat prioritas, dengan pendanaannya yang bersumber selain dari anggaran pemerintah dan pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur yang menggunakan skema PINA harus memenuhi minimal empat kriteria utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, memiliki kelayakan komersial, memenuhi kriteria kesiapan (<i>readiness criteria</i>), serta mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional. Dengan nilai investasi dan imbal hasil yang relatif menarik, umumnya pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan promotor.</p>	<p>PINA merupakan mekanisme pembiayaan untuk proyek investasi yang bersifat prioritas, dengan pendanaannya yang bersumber selain dari anggaran pemerintah dan pelaksanaannya didorong dan difasilitasi oleh pemerintah. Penyediaan infrastruktur yang menggunakan skema PINA harus memenuhi minimal empat kriteria utama, yaitu memiliki manfaat ekonomi dan sosial yang tinggi, memiliki kelayakan komersial, memenuhi kriteria kesiapan (<i>readiness criteria</i>), serta mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional. Dengan nilai investasi dan imbal hasil yang relatif menarik, umumnya pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan promotor.</p>
	<p>Bab 2. Spektrum Perencanaan Pembangunan Nasional Sub-bab 2.4. Pendanaan Pembangunan Sub-bab 2.4.3. Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU dan PINA) Sub-bab 2.4.3.2. Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA)</p>		

M - 35

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																								
95.	Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) (Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman II.68)	Saat ini skema PINA berfokus pada penyediaan infrastruktur dalam sektor konektivitas, energi, manufaktur dan industri, serta perumahan, dengan 13 subsektor bagaiannya. Landasan hukum terkait penyelenggaraan skema PINA dalam proyek infrastruktur adalah Perpres Nomor 58 Tahun 2017, Perpres Nomor 20 Tahun 2016, dan Perpres Nomor 66 Tahun 2015. Terdapat tiga skema PINA yang dapat diimplementasikan kedalam proyek penyediaan infrastruktur sesuai dengan kondisi proyeknya, yaitu <i>greenfield</i> , <i>brownfield</i> , dan <i>operational</i> (Gambar 2.26).	Saat ini skema PINA berfokus pada penyediaan infrastruktur dalam sektor konektivitas, energi, manufaktur dan industri, serta perumahan, dengan 13 subsektor bagaiannya. Landasan hukum terkait penyelenggaraan skema PINA dalam proyek infrastruktur adalah Perpres Nomor 58 Tahun 2017, Perpres Nomor 20 Tahun 2016, dan Perpres Nomor 66 Tahun 2015. Terdapat tiga skema PINA yang dapat diimplementasikan kedalam proyek penyediaan infrastruktur sesuai dengan kondisi proyeknya, yaitu <i>greenfield</i> , <i>brownfield</i> , dan <i>operational</i> . Pada proyek <i>greenfield</i> , PINA berperan membantu proyek mendapatkan pembiayaan (pinjaman) melalui bank dan institusi finansial serta mengusahakan sumber ekuitas potensial. Dalam proyek jenis <i>brownfield</i> , selain berfungsi membantu mendapatkan pinjaman dan ekuitas, PINA juga dapat memfasilitasi <i>investee</i> untuk melakukan <i>recycling</i> aset agar mendapatkan sumber pembiayaan dalam pembangunan proyek baru. Lebih lanjut di dalam proyek tahap operasional, selain mengusahakan pembiayaan melalui pinjaman, ekuitas potensial, dan <i>recycling</i> aset, skema PINA memfasilitasi sekuritisasi/ divestasi aset dan mendorong <i>limited concession scheme</i> sebagai sumber pembiayaan proyek baru (Gambar 2.26).																								
96.	Isu Strategis dan Arah Kebijakan (Perubahan narasi pada Poin 1 dan 2, Halaman II.69)	<ol style="list-style-type: none"> memperkuat penggunaan skema <i>value for money</i> (VfM) dalam menentukan prioritas dan memilih mekanisme pelaksanaan (<i>delivery mechanism</i>) yang paling efektif dan efisien dalam keseluruhan siklus proyek; meningkatkan komitmen yang kuat pada menteri/kepala lembaga/kepala daerah dalam melaksanakan KPPBU dengan penyediaan anggaran melalui APBN dan/atau APBD bagi pelaksanaan tahapan proses KPPBU; 	<ol style="list-style-type: none"> memperkuat hasil analisis <i>value for money</i> (VfM) dalam menentukan prioritas dan memilih mekanisme pembiayaan proyek infrastruktur (<i>delivery mechanism</i>) yang paling efektif dan efisien dalam keseluruhan siklus proyek; meningkatkan komitmen Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PUPK dalam melaksanakan KPPBU dengan penyediaan anggaran melalui APBN dan/atau APBD padatahap perencanaan, disiapkan dan transaksi dalam proses KPPBU; 																								
97.	<p>Bab 3. Tema dan Sasaran Pembangunan</p> <p>Sub-bab 3.5. Sasaran Pembangunan</p> <p>Sasaran Pembangunan (Perubahan data pada Tabel 3.1 Indikator Pembangunan Tahun 2019, Halaman III.3)</p>	<table border="1" data-bbox="1040 1106 1263 1639"> <thead> <tr> <th>Indikator Pembangunan</th> <th>Skenario 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan ekonomi (%)</td> <td>5,2-5,6</td> </tr> <tr> <td>Tingkat pengangguran terbuka (%)</td> <td>4,8 - 5,2</td> </tr> <tr> <td>Angka kemiskinan (%)</td> <td>8,5 - 9,5</td> </tr> <tr> <td>Rasio gini (indeks)</td> <td>0,38 - 0,39</td> </tr> <tr> <td>Indeks pembangunan manusia (IPM)</td> <td>71,98</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018</p>	Indikator Pembangunan	Skenario 2019	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2-5,6	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 - 5,2	Angka kemiskinan (%)	8,5 - 9,5	Rasio gini (indeks)	0,38 - 0,39	Indeks pembangunan manusia (IPM)	71,98	<table border="1" data-bbox="1040 433 1263 966"> <thead> <tr> <th>Indikator Pembangunan</th> <th>Skenario 2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pertumbuhan ekonomi (%)</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td>Tingkat pengangguran terbuka (%)</td> <td>4,8 - 5,2</td> </tr> <tr> <td>Angka kemiskinan (%)</td> <td>8,5 - 9,5</td> </tr> <tr> <td>Rasio gini (indeks)</td> <td>0,380 - 0,385</td> </tr> <tr> <td>Indeks pembangunan manusia (IPM)</td> <td>71,98</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018</p>	Indikator Pembangunan	Skenario 2019	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 - 5,2	Angka kemiskinan (%)	8,5 - 9,5	Rasio gini (indeks)	0,380 - 0,385	Indeks pembangunan manusia (IPM)	71,98
Indikator Pembangunan	Skenario 2019																										
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,2-5,6																										
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 - 5,2																										
Angka kemiskinan (%)	8,5 - 9,5																										
Rasio gini (indeks)	0,38 - 0,39																										
Indeks pembangunan manusia (IPM)	71,98																										
Indikator Pembangunan	Skenario 2019																										
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3																										
Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,8 - 5,2																										
Angka kemiskinan (%)	8,5 - 9,5																										
Rasio gini (indeks)	0,380 - 0,385																										
Indeks pembangunan manusia (IPM)	71,98																										

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																				
	Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.1. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																				
98.	Kerangka Regulasi - PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman IV.2)	2. KP Penguatan Sistem Jaminan Sosial, yaitu dengan revisi Peta Jalan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bidang Kesehatan dan Bidang Ketenagakerjaan	2. KP Penguatan Sistem Jaminan Sosial, yaitu dengan rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Jaminan Sosial.																																				
99.	Kerangka Regulasi - PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat (Perubahan narasi pada Paragraf 3, Halaman IV.2)	2. KP Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit: (a) Peraturan perundangan tentang wabah; dan (b) Peraturan perundangan tentang usaha kesehatan sekolah (UKS).	2. KP Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit: (a) Peraturan perundangan tentang wabah; (b) Peraturan perundangan tentang kekarantinaan kesehatan; dan (c) Peraturan perundangan tentang kesehatan jiwa.																																				
100.	Kerangka Regulasi - PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman IV.3)	2. KP Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak: (a) Revisi Perpres Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi; (b) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (RPermendagri) mengenai Penyelenggaraan Urusan Air Minum dan Sanitasi; (c) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (RPermenPUPR) untuk mendaklanjuti revisi Perpres Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; (d) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan (e) Penyusunan Naskah Akademis UU Air Minum dan Sanitasi.	2. KP Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak: (a) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri (RPermendagri) mengenai Penyelenggaraan Urusan Air Minum dan Sanitasi; (b) Rancangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (RPermenPUPR) untuk mendaklanjuti revisi Perpres Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum; (c) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum; dan (d) Penyusunan Naskah Akademis UU Air Minum dan Sanitasi.																																				
	Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.1. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Sub-bab 4.1.1. Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																				
101.	Sasaran dan Indikator PP percepatan Pengurangan Kemiskinan (perubahan data pada Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator PP percepatan Pengurangan Kemiskinan, Halaman IV.4)	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1091 1592 1161 1674">No.</th> <th data-bbox="1091 1460 1161 1592">Sasaran/ Indikator</th> <th data-bbox="1091 1353 1161 1460">2016⁽¹⁾</th> <th data-bbox="1091 1246 1161 1353">2017⁽²⁾</th> <th data-bbox="1091 1138 1161 1246">2018⁽³⁾</th> <th data-bbox="1091 1031 1161 1138">2019⁽⁴⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1161 1592 1230 1674">1.</td> <td data-bbox="1161 1460 1230 1592">Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah</td> <td data-bbox="1161 1353 1230 1460">91,1^(a)</td> <td data-bbox="1161 1246 1230 1353">95,4^(a)</td> <td data-bbox="1161 1138 1230 1246">96,0</td> <td data-bbox="1161 1031 1230 1138">97,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1230 1460 1307 1592">Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)</td> <td data-bbox="1230 1353 1307 1460">41,6^(a)</td> <td data-bbox="1230 1246 1307 1353">64,4^(a)</td> <td data-bbox="1230 1138 1307 1246">65,2^(a)</td> <td data-bbox="1230 1031 1307 1138">97,0</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/ Indikator	2016 ⁽¹⁾	2017 ⁽²⁾	2018 ⁽³⁾	2019 ⁽⁴⁾	1.	Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah	91,1 ^(a)	95,4 ^(a)	96,0	97,0		Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)	41,6 ^(a)	64,4 ^(a)	65,2 ^(a)	97,0	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1091 949 1161 1031">No.</th> <th data-bbox="1091 817 1161 949">Sasaran/ Indikator</th> <th data-bbox="1091 710 1161 817">2016⁽²⁾</th> <th data-bbox="1091 603 1161 710">2017⁽³⁾</th> <th data-bbox="1091 495 1161 603">2018⁽⁴⁾</th> <th data-bbox="1091 388 1161 495">2019⁽⁵⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1161 949 1230 1031">1.</td> <td data-bbox="1161 817 1230 949">Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah</td> <td data-bbox="1161 710 1230 817">41,6^(a)</td> <td data-bbox="1161 603 1230 710">64,4^(a)</td> <td data-bbox="1161 495 1230 603">65,2^(a)</td> <td data-bbox="1161 388 1230 495">97,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="1230 817 1307 949">Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)</td> <td data-bbox="1230 710 1307 817">41,6^(a)</td> <td data-bbox="1230 603 1307 710">64,4^(a)</td> <td data-bbox="1230 495 1307 603">65,2^(a)</td> <td data-bbox="1230 388 1307 495">97,0</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/ Indikator	2016 ⁽²⁾	2017 ⁽³⁾	2018 ⁽⁴⁾	2019 ⁽⁵⁾	1.	Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah	41,6 ^(a)	64,4 ^(a)	65,2 ^(a)	97,0		Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)	41,6 ^(a)	64,4 ^(a)	65,2 ^(a)	97,0
No.	Sasaran/ Indikator	2016 ⁽¹⁾	2017 ⁽²⁾	2018 ⁽³⁾	2019 ⁽⁴⁾																																		
1.	Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah	91,1 ^(a)	95,4 ^(a)	96,0	97,0																																		
	Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)	41,6 ^(a)	64,4 ^(a)	65,2 ^(a)	97,0																																		
No.	Sasaran/ Indikator	2016 ⁽²⁾	2017 ⁽³⁾	2018 ⁽⁴⁾	2019 ⁽⁵⁾																																		
1.	Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah	41,6 ^(a)	64,4 ^(a)	65,2 ^(a)	97,0																																		
	Persentase penduduk 40 persen terbawah yang menerima program pemerintah (%)	41,6 ^(a)	64,4 ^(a)	65,2 ^(a)	97,0																																		

M - 37

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019			PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019		
		2	Kontribusi UMK dan koperasi terhadap PDB(%)	57,9 b)	58,2 ***b)	58,5 ***)	58,8 **)
102.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan (Perubahan data pada Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Pengurangan Kemiskinan, Poin 2.a dan 4.a, Halaman IV.5)	Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDB			Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDB		
		Sumber: a) Kemensos, 2018, b) KemenKUKM, 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) prognosa/estimasi sementara			Sumber: a) Estimasi berdasarkan Susenas, diolah 2018; b) KemenKUKM, 2018; c) Capaian kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) prognosa/estimasi sementara		
103.	Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.1. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Sub-bab 4.1.2. Program Prioritas Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat			Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat		
		a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup **)			a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup **)		
		Sasaran dan Indikator 2016 ^{b)} 2017 ^{b)} 2018 ^{**)} 2019 ^{**)}			Sasaran/Indikator 2016 ^{b)} 2017 ^{b)} 2018 ^{**)} 2019 ^{**)}		
		1. Meningkatkan status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat			1. Meningkatkan status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat		
		a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup **)			a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup **)		
		N/A N/A N/A N/A			N/A N/A N/A N/A		
		271			271		

M - 38

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019				
	2.c, 2.d, dan 2.e, Halaman IV.8)	<p>b. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) ^{***} N/A N/A N/A 21</p> <p>c. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,34^{a)} 2,33 2,31 2,28</p> <p>d. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semua cara 60,9^{a)} 65,6 65,8 66,0 - Cara modern (mCPR) 59,5^{a)} 60,9 61,6 61,3 <p>e. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (Baduta) (%) ^{***} 26,1^{b)} 29,6 28,8 24,8</p> <p>f. Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (%) ^{***} 21,0^{b)} N/A N/A 17</p>					<p>b. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup) ^{***} N/A N/A N/A 21</p> <p>c. Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) 2,34^{a)} 2,4^{b)} 2,31 2,28</p> <p>d. Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate/CPR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semua cara 60,9^{a)} 63,6^{b)} 65,8 66,0 - Cara modern (mCPR) 59,5^{a)} 57,2^{b)} 61,1 61,3 <p>e. Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah dua tahun (Baduta) (%) ^{***} N/A N/A 28,8 28</p> <p>f. Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (%) ^{***} N/A N/A N/A 17</p>				
		<p>2. Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular</p>					<p>2. Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor risiko penyakit tidak menular</p>				
		<p>a. Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun (%) ^{***} 8,8^{b)} 5,9 5,6 5,4</p>					<p>a. Prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun (%) ^{***} 8,8^{c)} N/A 5,6 5,4</p>				
		<p>b. Prevalensi tekanan darah tinggi (%) ^{***} 32,4^{b)} 24,2 23,8 23,4</p>					<p>b. Prevalensi tekanan darah tinggi (%) ^{***} 32,4^{d)} N/A 23,8 23,4</p>				
		<p>c. Prevalensi HIV (%) <0,5 <0,5 <0,5 <0,5</p>					<p>c. Prevalensi HIV (%) 0,33^{d)} 0,33^{d)} <0,5 <0,5</p>				
		<p>d. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 257^{b)} 262 254 245</p>					<p>d. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk 257^{a)} 257^{a)} 254 245</p>				
		<p>e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria 247^{b)} 265 285 300</p>					<p>e. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria 247^{d)} 272^{b)} 285 300</p>				
		<p>Sumber: a) Survei Kinerja Akuntabilitas Program, 2017; b) Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, 2017; c) Survei Indikator Kesehatan Nasional, 2016; d) Laporan Estimasi dan Proyeksi HIV/AIDS (Pemodelan)</p>									

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
104.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat (Perubahan data dan narasi pada Tabel 4.5 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Poin 1.d, 3.c, 3.d, 3.f, 4.c, Halaman IV.10)	<p>Matematika), Kemenkes 2012; e) Proyeksi Prevalensi TB Berbasis Mikroskopis, Kemenkes 2017; f) Laporan Kementerian Kesehatan, 2018.</p> <p>Keterangan: *) Realisasi; **) Target; ***) data angka kematian ibu dan angka kematian bayi tidak tersedia tahunan karena berdasar Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS); ****) data prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (<i>underweight</i>) tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (Riskesdas).</p>	<p>(Pemodelan Matematika), Kemenkes 2012; e) Proyeksi Prevalensi TB Berbasis Mikroskopis, Kemenkes 2017; f) Laporan Kementerian Kesehatan, 2018.</p> <p>Keterangan: *) Realisasi; **) Target RKP; ***) data angka kematian ibu dan angka kematian bayi tidak tersedia tahunan karena berdasar Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS); ****) data prevalensi <i>stunting</i> pada anak baduta, prevalensi merokok penduduk usia ≤18 tahun, data prevalensi tekanan darah tinggi, serta data prevalensi kekurangan gizi pada anak balita (<i>underweight</i>) tidak tersedia tahunan dan data diperoleh dari survei besar khusus (Riskesdas).</p>
105.	Aspek Kewilayahan (Perubahan data dan narasi pada Paragraf 1, Halaman IV.12)	<p>1.d Tercapainya 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi di 95 persen kabupaten/kota Lokasi: 34 provinsi</p> <p>3.c. Terehabilitasinya rehabilitasi pada 950 orang dengan HIV</p> <p>3.d. Tercapainya pencegahan penyakit menular di tempat kerja sebanyak 250 perusahaan dan deteksi dini kanker rahim sebanyak 1.700 orang</p> <p>3.f. Lokasi: 34 provinsi</p>	<p>1.d Tercapainya kabupaten kota dengan 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi di 95 persen kabupaten/kota Lokasi: 488 kabupaten/kota</p> <p>3.c. Terlaksananya rehabilitasi pada 950 orang dengan HIV</p> <p>3.d. Tercapainya pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja sebanyak 250 perusahaan dan deteksi dini kanker rahim pada tenaga kerja perempuan sebanyak 1.700 orang</p> <p>3.f. Lokasi: 462 kabupaten/kota</p>
106.	Aspek Kewilayahan (Perubahan data pada Gambar 4.5 Lokus Fokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Tahun 2019, Halaman IV.12)	<p>4.c. Tercapainya puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan di 5.600 puskesmas</p> <p>PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdiri atas sejumlah KP yang dilakukan dengan memperhatikan aspek spasial sebagaimana contoh intervensi penurunan <i>stunting</i> terintegrasi dalam Gambar 4.5 berikut.</p> <p>Gambar 4.5 Lokus Fokus Intervensi Penurunan <i>Stunting</i> Terintegrasi Tahun 2019</p>	<p>4.c. Tercapainya puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan sebanyak 5.600 puskesmas</p> <p>PP Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat terdiri atas sejumlah KP yang dilakukan dengan memperhatikan aspek spasial sebagaimana contoh pelaksanaan intervensi penurunan <i>stunting</i> terintegrasi di 160 kabupaten/kota lokus prioritas tahun 2019 dalam Gambar 4.5 berikut.</p> <p>Gambar perubahan pada Lampiran II.</p>
	<p>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.1. Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Sub-bab 4.1.4. Program Prioritas Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak</p>		

M - 40

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019				PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019					
		Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(*)	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(*)	2019 ^(*)
107.	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak (Perubahan data pada Tabel 4.8 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, Halaman IV.17)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak (%) Sumber: BPS (diolah), 2017 Keterangan: *) Realisasi **) Target	43,8	45,8	47,8	50,0	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak (%) Sumber: BPS (diolah), 2017 Keterangan: *) Realisasi **) Target	35,3	34,2	35,1	35,6
108.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak (Perubahan data pada Tabel 4.9 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, Poin 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.c, dan 3.d, Halaman IV.18)	1.a. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak bagi 28.977 rumah tangga MBR 1.b. Terfasilitasinya peningkatan kualitas hunian bagi 192.000 rumah tangga MBR (kemen PUPR) dan 14.025 keluarga miskin (Kemensos) 1.c. Terfasilitasinya pembiayaan perumahan MBR bagi 198.000 rumah tangga (di luar Tapera) 1.d. Terfasilitasinya peningkatan kualitas permukiman bagi 2.843 Ha 2.a. Lokasi: 34 provinsi 2.b. Lokasi: 34 provinsi 3.a. Terpuhlikannya lahan yang terkontaminasi oleh limbah B3 sebesar 3.500 ton 3.b. Meningkatnya penanganan sampah melalui penyediaan perangkat implementasi pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh dan sehat berkelanjutan (ADIPURA) sebesar 14.000.000 ton 3.c. Terbangunnya biodigester sampah pasar tradisional kapasitas 3 ton/hari 3.d. Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara di 400 kabupaten/kota	1.a. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak bagi 27.298 rumah tangga MBR 1.b. Terfasilitasinya peningkatan kualitas hunian bagi 198.500 rumah tangga MBR (kemen PUPR) dan 14.000 keluarga miskin (Kemensos) 1.c. Terfasilitasinya pembiayaan perumahan MBR bagi 182.858 rumah tangga (di luar Tapera) 1.d. Terfasilitasinya peningkatan kualitas permukiman bagi 3.805 Ha 2.a. Lokasi: 34 provinsi dengan kriteria prioritas lokasi: tingkat kesiapan daerah tinggi, akses rendah dan kawasan khusus 2.b. Lokasi: 34 provinsi dengan kriteria prioritas lokasi: tingkat kesiapan daerah tinggi, akses rendah, KSPN dan rawan sanitasi 3.a. Terpuhlikannya lahan yang terkontaminasi oleh limbah B3 sebesar 100.000 ton 3.b. Tertanganinya timbulan sampah (dihapus) (dihapus)	28.977	28.977	28.977	28.977	27.298	27.298	27.298	27.298
109.	Peta Sebaran Kegiatan PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak (Perubahan data pada Gambar 4.9 Peta Sebaran Kegiatan PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak, Halaman	Gambar 4.9 Peta Sebaran Kegiatan PP Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Gambar perubahan pada Lampiran II.								

M - 41

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
	IV.20)		
	Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional		
110.	Sasaran dan Kerangka Prioritas Nasional (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman IV.24)	Berikut pada Tabel 4.12 adalah sasaran dan indikator PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Berikut pada Tabel 4.12 adalah sasaran dan indikator PN Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman.
111.	Kerangka Regulasi (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman IV.25)	2. RPP yang mengatur penyediaan sarana kereta api ekonomi, baik melalui swasta, BUMN maupun Pemerintah untuk mendukung KP Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan;	2. Rancangan Peraturan Menteri (Rpermen) yang mengatur penyediaan sarana kereta api ekonomi, baik melalui Badan Usaha maupun Pemerintah untuk mendukung KP Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan;
	Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional		
	Sub-bab 4.2. Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman		
	Sub-bab 4.2.1. Program Prioritas Peningkatan Konektivitas dan TIK		
112.	Sasaran dan Kerangka Program Prioritas (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman IV.27)	Dalam upaya mencapai target pembangunan, maka pada tahun 2019 akan dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta melakukan inovasi dalam mekanisme pembiayaan infrastruktur baik melalui skema penugasan ke BUMN, KPBU, maupun PINA.	Dalam upaya mencapai target pembangunan, maka pada tahun 2019 akan dilakukan percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta melakukan inovasi dalam mekanisme pembiayaan infrastruktur baik melalui skema penugasan ke BUMN, KPBU, maupun PINA).
113.	Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas dan TIK (Perubahan data pada Tabel 4.13 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Konektivitas dan TIK, Poin 1.b, Halaman IV.27)	b. Persentase <i>on-time performance</i> angkutan udara (%) 2019 : 95	b. Persentase <i>on-time performance</i> angkutan udara (%) 2019 : 88
114.	Sasaran dan Indikator KP dalam PP Peningkatan Konektivitas dan TIK (Perubahan data pada Tabel 4.14 Sasaran dan Indikator KP dalam PP Peningkatan Konektivitas dan TIK, Poin 1.b, 2.a, 2.e, 2.f, 2.h, 3.a, 3.b, 3.c, 5.e, dan 5.h, Halaman IV.28)	1.b. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 7 pelabuhan; 2.a. Panjang jalan baru yang terbangun 935 km; 2.c. Jumlah dermaga sungai, danau dan penyeberangan yang terbangun sebanyak 17 dermaga; 2.f. Jumlah rute angkutan penyeberangan perintis yang tersedia sebanyak 275 rute; 2.h. Jumlah terminal type A yang terbangun sebanyak 12 terminal; 3.a. Jumlah bandara baru yang terbangun sebanyak 5 bandara;	1.b. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 27 pelabuhan; 2.a. Panjang jalan baru yang terbangun 553 km; 2.c. Jumlah dermaga penyeberangan, sungai, dan danau yang terbangun sebanyak 14 dermaga; 2.f. Jumlah rute angkutan penyeberangan perintis yang tersedia sebanyak 230 rute; 2.h. Jumlah terminal type A yang terbangun sebanyak 6 terminal; 3.a. Jumlah bandara baru yang terbangun sebanyak 4 bandara;

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		<p>3.b. Jumlah bandara yang mendukung jembatan udara yang dikembangkan sebanyak 11 bandara;</p> <p>3.c. Jumlah rute subsidi perintis angkutan udara yang tersedia sebanyak 240 rute.</p> <p>5.c. Persentase jangkauan siaran LPP RRI terhadap populasi sebesar 92 persen</p> <p>5.h. Fasilitas penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar pada 100 lokasi</p> <p>Gambar 4.14Sebaran Proyek Prioritas PP Peningkatan Konektivitas dan TIK</p>	<p>3.b. Jumlah bandara yang mendukung jembatan udara yang dikembangkan sebanyak 6 bandara;</p> <p>3.c. Jumlah rute subsidi perintis angkutan udara yang tersedia sebanyak 232 rute.</p> <p>5.c. Persentase jangkauan siaran LPP RRI terhadap populasi sebesar 90 persen</p> <p>5.h. Fasilitas penggelaran infrastruktur jaringan tetap pitalebar pada 500 lokasi (<i>home connect</i>)</p> <p>Gambar perubahan pada Lampiran II.</p>
115.	<p>Proyek Prioritas PP Peningkatan Konektivitas dan TIK (Perubahan data pada Gambar 4.14 Sebaran Proyek Prioritas PP Peningkatan Konektivitas dan TIK, Halaman IV.31)</p>		
	<p>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.2. Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Sub-bab 4.2.2. Program Prioritas Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat</p>		
116.	<p>Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (Perubahan data pada Tabel 4.15 Sasaran dan Indikator PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Poin 2.a, Halaman IV.31)</p>	<p>2.a. Persentase buta aksara Provinsi Papua 28,2% (tahun 2016)</p>	<p>2.a. Persentase buta aksara Provinsi Papua 28,7% (tahun 2016)</p>
117.	<p>Sasaran dan Indikator KP dalam PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (Perubahan data dan narasi pada Tabel 4.16 Sasaran dan Indikator KP dalam PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, Poin 2.g, 3.b, 3.c, 3.e, dan 4.c serta menghilangkan keterangan tabel, Halaman IV.32)</p>	<p>2.g. Terlaksananya pendidikan keaksaraan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan terlaksananya pengajaran baca tulis melalui KKN Tematik</p> <p>3.b. Terbangunnya 5 unit pengolahan komoditas unggulan sagu dan 4 unit pengolahan buah merah Lokasi: 9 kabupaten/kota</p> <p>3.c. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan ubi jalar di atas lahan seluas 1.100 hektar; kopi seluas 270 hektar; kakao seluas 270 hektar; dan pala seluas 500 hektar</p>	<p>2.g. Terlaksananya pendidikan keaksaraan melalui PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) dan satuan pendidikan nonformal lainnya (9.000 orang mengikuti program keaksaraan dasar dan 3.780 orang mengikuti BOP keaksaraan usaha mandiri) serta terlaksananya pengajaran baca tulis untuk pemberantasan buta aksara melalui KKN Tematik kepada 750 masyarakat Papua dan Papua Barat dengan mengerahkan mahasiswa</p> <p>3.b. Tersedianya 6 unit pengolahan komoditas sagu Lokasi: 5 kabupaten/kota</p> <p>3.c. Meningkatkan produksi komoditas perkebunan ubi jalar di atas lahan seluas 1.000 hektar; kopi seluas 270 hektar; kakao seluas 540 hektar; dan pala seluas 300 hektar</p>

M - 43

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		Lokasi: Tersebar di kabupaten/kota 3.e. Berkembangnya unggas dan aneka ternak 1.000 ekor di Papua dan 1.000 ekor di Papua barat Lokasi: Tersebar di Papua dan Papua Barat 4.c. Terselenggarakannya ruas jalan trans papua sepanjang 101,44 km	Lokasi: Tersebar di Papua dan Papua Barat (dihapus) 4.e. Terselenggarakannya ruas jalan trans papua sepanjang 143 km (dihapus)
118.	Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (Perubahan data pada Gambar 4.16 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat, serta menghilangkan keterangan gambar, Halaman IV.38)	Keterangan: data sementara per tanggal 15 Mei 2018 Gambar 4.16 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat Keterangan: data sementara per tanggal 15 Mei 2018. Detail dalam RKP on. <i>The Map 2019</i>	Gambar perubahan pada Lampiran II. (dihapus)
119.	Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.2. Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Sub-bab 4.2.3. Program Prioritas Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa (Perubahan Gambar 4.18 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa, Halaman IV.41)	Gambar 4.18 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	Gambar perubahan pada Lampiran II.
120.	Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.2. Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman Sub-bab 4.2.5. Program Prioritas Peningkatan Sistem Logistik Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Sistem Logistik (Perubahan narasi pada Tabel 4.22 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Sistem Logistik, Poin 1.a dan 2.f, Halaman IV.45)	1.a. Jumlah cold storage perikanan yang dibangun/direvitalisasi sebanyak 10 unit 2.f. Jumlah kendaraan berpendingin roda 6 sebanyak 20 unit	1.a. Jumlah cold storage perikanan yang dibangun/direvitalisasi sebanyak 11 unit 2.f. Jumlah kendaraan berpendingin sebanyak 28 unit
121.	Proyek Prioritas PP Sistem Logistik	Gambar 4.22 Peta Sebaran Proyek Prioritas PP Sistem Logistik	Gambar perubahan pada Lampiran II.

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																																																																																								
	(Perubahan nama pada Legenda/Keterangan pada Gambar 4.22 Peta Sebaran Proyek Prioritas PP Sistem Logistik, Halaman IV.47)																																																																																																																										
122.	<p>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya</p> <p>Sasaran dan Indikator PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya (Perubahan data pada Tabel 4.23 Sasaran dan Indikator PN Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, Point 1, 2, 3, 4, dan 5, Halaman IV.47)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{a)}</th> <th>2018^{a)}</th> <th>2019^{a)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pertumbuhan PDB pertanian (%)</td> <td>3,4</td> <td>3,8</td> <td>3,5-3,8</td> <td>3,7-4,0</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)</td> <td>4,3</td> <td>4,3</td> <td>5,1</td> <td>4,9-5,4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pertumbuhan PDB perdagangan (%)</td> <td>4,0</td> <td>4,4</td> <td>5,4-6,0</td> <td>5,3-5,7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)</td> <td>4,5</td> <td>6,2</td> <td>6,0-6,6</td> <td>6,9-7,7</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)</td> <td>-1,6</td> <td>9,1</td> <td>5,0-5,5</td> <td>5,5-6,6</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)</td> <td>177,2</td> <td>202,1</td> <td>223,0</td> <td>270,0 - 280,0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Penyediaan lapangan kerja (juta orang)</td> <td>3,6</td> <td>2,6</td> <td>2,0</td> <td>2,6 - 2,9</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)</td> <td>1,85</td> <td>2,8</td> <td>4,0</td> <td>4,0 - 5,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: RPJMN 2015 - 2019, RKP 2018, Sakernas, Nesparnas, data realisasi K/L mitra</p> <p>Keterangan:*) Realisasi, **) Target; a) Prognosa/Estimasi Sementara</p>	No.	Sasaran/ Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya						1	Pertumbuhan PDB pertanian (%)	3,4	3,8	3,5-3,8	3,7-4,0	2	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	4,3	4,3	5,1	4,9-5,4	3	Pertumbuhan PDB perdagangan (%)	4,0	4,4	5,4-6,0	5,3-5,7	4	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)	4,5	6,2	6,0-6,6	6,9-7,7	5	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)	-1,6	9,1	5,0-5,5	5,5-6,6	6	Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)	177,2	202,1	223,0	270,0 - 280,0	7	Penyediaan lapangan kerja (juta orang)	3,6	2,6	2,0	2,6 - 2,9	8	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	1,85	2,8	4,0	4,0 - 5,0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/ Indikator</th> <th>2016^{b)}</th> <th>2017^{b)}</th> <th>2018^{b)}</th> <th>2019^{b)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Pertumbuhan PDB pertanian (%)</td> <td>3,4</td> <td>3,8</td> <td>3,9</td> <td>3,8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)</td> <td>4,3</td> <td>4,3</td> <td>4,3</td> <td>5,1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Pertumbuhan PDB perdagangan (%)</td> <td>4,0</td> <td>4,4</td> <td>5,3</td> <td>5,3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)</td> <td>4,5</td> <td>6,2</td> <td>7,0</td> <td>7,0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)</td> <td>-1,6</td> <td>9,1</td> <td>7,0</td> <td>6,3</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)</td> <td>177,2</td> <td>202,1</td> <td>223,0</td> <td>270,0 - 280,0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Penyediaan lapangan kerja (juta orang)</td> <td>3,6</td> <td>2,6</td> <td>2,0</td> <td>2,6 - 2,9</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)</td> <td>1,85</td> <td>2,8</td> <td>4,0</td> <td>4,0 - 5,0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: RPJMN 2015 - 2019, RKP 2018, Sakernas, Nesparnas, data realisasi K/L mitra</p> <p>Keterangan:*) Realisasi, **) Angka Sasaran</p>	No.	Sasaran/ Indikator	2016 ^{b)}	2017 ^{b)}	2018 ^{b)}	2019 ^{b)}	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya						1	Pertumbuhan PDB pertanian (%)	3,4	3,8	3,9	3,8	2	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	4,3	4,3	4,3	5,1	3	Pertumbuhan PDB perdagangan (%)	4,0	4,4	5,3	5,3	4	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)	4,5	6,2	7,0	7,0	5	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)	-1,6	9,1	7,0	6,3	6	Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)	177,2	202,1	223,0	270,0 - 280,0	7	Penyediaan lapangan kerja (juta orang)	3,6	2,6	2,0	2,6 - 2,9	8	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	1,85	2,8	4,0	4,0 - 5,0
No.	Sasaran/ Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}																																																																																																																						
Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya																																																																																																																											
1	Pertumbuhan PDB pertanian (%)	3,4	3,8	3,5-3,8	3,7-4,0																																																																																																																						
2	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	4,3	4,3	5,1	4,9-5,4																																																																																																																						
3	Pertumbuhan PDB perdagangan (%)	4,0	4,4	5,4-6,0	5,3-5,7																																																																																																																						
4	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)	4,5	6,2	6,0-6,6	6,9-7,7																																																																																																																						
5	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)	-1,6	9,1	5,0-5,5	5,5-6,6																																																																																																																						
6	Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)	177,2	202,1	223,0	270,0 - 280,0																																																																																																																						
7	Penyediaan lapangan kerja (juta orang)	3,6	2,6	2,0	2,6 - 2,9																																																																																																																						
8	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	1,85	2,8	4,0	4,0 - 5,0																																																																																																																						
No.	Sasaran/ Indikator	2016 ^{b)}	2017 ^{b)}	2018 ^{b)}	2019 ^{b)}																																																																																																																						
Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya																																																																																																																											
1	Pertumbuhan PDB pertanian (%)	3,4	3,8	3,9	3,8																																																																																																																						
2	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (%)	4,3	4,3	4,3	5,1																																																																																																																						
3	Pertumbuhan PDB perdagangan (%)	4,0	4,4	5,3	5,3																																																																																																																						
4	Pertumbuhan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) (%)	4,5	6,2	7,0	7,0																																																																																																																						
5	Pertumbuhan ekspor barang dan jasa (%)	-1,6	9,1	7,0	6,3																																																																																																																						
6	Nilai devisa pariwisata (triliun rupiah)	177,2	202,1	223,0	270,0 - 280,0																																																																																																																						
7	Penyediaan lapangan kerja (juta orang)	3,6	2,6	2,0	2,6 - 2,9																																																																																																																						
8	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (%)	1,85	2,8	4,0	4,0 - 5,0																																																																																																																						
123.	<p>Kerangka Regulasi (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman IV.49)</p>	<p>2. KP Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Tanaman Perkebunan</p>	<p>2. KP Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perbenihan Tanaman Perkebunan dan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pembangunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.</p>																																																																																																																								

M - 45

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
124.	<p>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya Sub-bab 4.3.1. Program Prioritas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian</p> <p>Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian (Perubahan data pada Tabel 4.25 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian, Poin 3.c, 3.d, 4.b, dan 5.b, Halaman IV.51)</p>	<p>3.c. Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil perikanan sebanyak 1.900 sertifikat Lokasi : 34 provinsi</p> <p>3.d. Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil kehutanan sebanyak 170 kelompok</p> <p>4.b. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor perikanan yang dibina sebanyak 2.150 kelompok</p> <p>5.b. Jumlah pelabuhan perikanan yang sarannya dikembangkan sesuai dengan standar Internasional sebanyak 1 unit Lokasi : 34 Provinsi</p>	<p>3.c. Jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan sebanyak 2.000 sertifikat Lokasi : Pusat</p> <p>3.d. Jumlah sertifikat standar dan mutu hasil kehutanan sebanyak 400 kelompok</p> <p>4.b. Jumlah kelembagaan dan usaha di sektor perikanan yang dibina sebanyak 2.120 kelompok</p> <p>5.b. Jumlah pelabuhan perikanan yang sarannya dikembangkan sesuai dengan standar Internasional sebanyak 1 lokasi Lokasi : Sulawesi utara</p>
125.	<p>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya Sub-bab 4.3.2. Program Prioritas Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan</p> <p>Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan (Perubahan data pada Tabel 4.27 Sasaran dan Indikator KP dari PP Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan, Poin 1.g dan 1.h, Halaman IV.56)</p>	<p>1.g. Jumlah Standar tatakelola perizinan dan non perizinan penanaman modal daerah sebanyak 2 standar</p> <p>1.h. Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan kesempatan usaha yang dirumuskan sejumlah 4 tema</p>	<p>1.g. Jumlah pengembangan sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) sebanyak satu paket</p> <p>1.h. Jumlah rekomendasi strategi dan kebijakan pengembangan kesempatan usaha yang dirumuskan sejumlah 4 tema</p>
126.	<p>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.3. Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya Sub-bab 4.3.3. Program Prioritas Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya</p> <p>Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya (Perubahan data pada Tabel 4.29 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Nilai</p>	<p>2.a. Jumlah SDM kreatif yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 4.000 orang</p> <p>2.b. Jumlah pelaku kreatif di sektor unggulan (kuliner, fashion dan kriya) dan sektor prioritas (film, aplikasi digital dan musik) yang mengakses skema pengembangan usaha, infrastruktur, dan pasar sebanyak 30.130 orang</p>	<p>2.a. Jumlah SDM kreatif yang tersertifikasi kompetensi sebanyak 3.000 orang</p> <p>2.b. Jumlah pelaku kreatif di sektor unggulan (kuliner, fashion dan kriya) dan sektor prioritas (film, aplikasi digital dan musik) yang mengakses skema pengembangan usaha, infrastruktur, dan pasar sebanyak 28.401 orang</p>

M - 46

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
	Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya, Poin 2.a, 2.b, 2.c, dan 4.a, Halaman IV.61)	2.c. Jumlah pendaftaran hak cipta dan paten di sektor ekonomi kreatif sebanyak 3.000 produk 4.a. Pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi sebanyak 1,2 juta orang	2.c. Jumlah pendaftaran hak cipta dan paten di sektor ekonomi kreatif sebanyak 1.875 produk 4.a. Pelaku usaha ultra mikro yang difasilitasi sebanyak 600 ribu orang
127.	<p>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Sasaran dan Indikator PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air (Perubahan data pada Tabel 4.34 Sasaran dan Indikator PN Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air, Poin 1 dan 3.1, Halaman IV.72)</p>	<p>No. Sasaran/Indikator 2016^{a)} 2017^{b)} 2018^{c)} 2019^{d)}</p> <p>1. Tercapainya produksi sumber daya energi</p> <p>Produksi sumber daya energi (ribu Setara Barrel Minyak (SBM)/hari)</p> <p>2.017^{a)} 1.944^{a)} 2.000 1.950</p> <p>2. Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE)</p> <p>Rasio Elektrifikasi (%)</p> <p>91,2^{a)} 95,4^{a)} 95,2 99,9</p> <p>3. Meningkatnya pertumbuhan produksi pangan</p> <p>a. Pertumbuhan produksi padi/beras(%)***</p> <p>5,4^{b)} 2,0^{b)} 4,0 2,4</p> <p>b. Pertumbuhan produksi jagung(%)</p> <p>20,2^{b)} 22,6^{b)} 4,5 3,0</p> <p>c. Pertumbuhan produksi kedelai(%)</p> <p>-10,4^{b)} -37,4^{b)} 21,1 11,1</p> <p>d. Pertumbuhan produksi gula(%)</p> <p>12,8^{b)} -8,3^{b)} 10,0 15,2</p> <p>e. Pertumbuhan produksi daging sapi(%)</p> <p>25,5^{b)} 8,5^{b)} 10,9 7,0</p> <p>f. Pertumbuhan produksi ikan(%)</p> <p>8,8^{b)} 8,4^{b)} 8,2 8,1</p> <p>g. Pertumbuhan produksi garam(%)</p> <p>9,1^{c)} 5,6^{c)} 7,9 9,8</p> <p>4 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan</p> <p>Skor pola pangan harapan (nilai)</p> <p>86,0^{b)} 88,0^{b)} 90,5 92,5</p>	<p>No. Sasaran/Indikator 2016^{a)} 2017^{b)} 2018^{c)} 2019^{d)}</p> <p>1. Tercapainya produksi sumber daya energi</p> <p>Produksi sumber daya energi (ribu Setara Barrel Minyak (SBM)/hari)</p> <p>2.017^{a)} 1.944^{a)} 2.000 2.025</p> <p>2. Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE)</p> <p>Rasio Elektrifikasi (%)</p> <p>91,2^{a)} 95,4^{a)} 95,2 99,9</p> <p>3. Meningkatnya pertumbuhan produksi pangan</p> <p>a. Pertumbuhan produksi padi/beras(%)***</p> <p>5,4^{b)} 2,0^{b)} 0 2,4</p> <p>b. Pertumbuhan produksi jagung(%)</p> <p>20,2^{b)} 22,6^{b)} 4,5 3,0</p> <p>c. Pertumbuhan produksi kedelai(%)</p> <p>-10,4^{b)} -37,4^{b)} 21,1 11,1</p> <p>d. Pertumbuhan produksi gula(%)</p> <p>12,8^{b)} -8,3^{b)} 10,0 15,2</p> <p>e. Pertumbuhan produksi daging sapi(%)</p> <p>25,5^{b)} 8,5^{b)} 10,9 7,0</p> <p>f. Pertumbuhan produksi ikan(%)</p> <p>8,8^{b)} 8,4^{b)} 8,2 8,1</p> <p>g. Pertumbuhan produksi garam(%)</p> <p>9,1^{c)} 5,6^{c)} 7,9 9,8</p> <p>4 Meningkatnya kualitas konsumsi pangan</p> <p>Skor pola pangan harapan (nilai)</p> <p>86,0^{b)} 88,0^{b)} 90,5 92,5</p>

M - 47

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019					PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019									
		Skor pola pangan harapan (nilai)	86,0 ^{b)}	88,0 ^{b)}	90,5	92,5	Kapasitas air baku (m ³ /detik)	64,6 ^{d)}	68,9 ^{d)}	73,68	78,68					
128.	Kerangka Regulasi (Perubahan narasi pada Paragraf 4, Halaman IV.74)	5	Meningkatnya ketersediaan air	63,5 ^{e)}	66,9 ^{e)}	73,68	65,5 – 66,5	66,5 – 68,5	65,5 – 66,5	66,5 – 68,5						
		6	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	63,5 ^{e)}	66,9 ^{e)}	73,68	65,5 – 66,5	66,5 – 68,5	65,5 – 66,5	66,5 – 68,5						
		Sumber: a) KESDM, 2018; b) Kementan, 2018; c) KKP, 2018; d) KemenPUPR, 2018; e) KLHK, 2018. Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Terjadi perubahan angka produksi akibat perbaikan metodologi perhitungan Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Terjadi perubahan angka produksi akibat perbaikan metodologi perhitungan														
129.	Kerangka Regulasi (Perubahan narasi pada Paragraf 4, Halaman IV.74) Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Sub-bab 4.4.4. Program Prioritas Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	1. KP Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan: RPerpres mengenai Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah 1. KP Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan: (a) RPerpres mengenai Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan (b) Rperpres mengenai Pembentukan Korporasi Petani.					1. KP Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan: (a) RPerpres mengenai Percepatan Penetapan Lahan Sawah Berkelanjutan dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah dan (b) Rperpres mengenai Pembentukan Korporasi Petani.									
		Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi (Perubahan data pada Tabel 4.35 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi, Poin 2.a dan 2.b, Halaman IV.75)					1. Terpenuhi kebutuhan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber daya energi. a. Konsumsi listrik per kapita (<i>kilo Watt hour/kWh</i>) b. Persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri (%) c. Persentase pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (%) d. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)					1. Terpenuhi kebutuhan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber daya energi. a. Konsumsi listrik per kapita (<i>kilo Watt hour/kWh</i>) b. Persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri (%) c. Persentase pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (%) d. Porsi EBT dalam bauran energi primer				
		No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{e)}	2017 ^{e)}	2018 ^{e)}	2019 ^{e)}	No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{e)}	2017 ^{e)}	2018 ^{e)}	2019 ^{e)}			
		1	Terpenuhi kebutuhan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber daya energi.	956 ^{a)}	1.012 ^{a)}	1.129	1.200	1	Terpenuhi kebutuhan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber daya energi.	956 ^{a)}	1.012 ^{a)}	1.129	1.200			
			a. Konsumsi listrik per kapita (<i>kilo Watt hour/kWh</i>)	58 ^{a)}	59,3 ^{a)}	63	64		a. Konsumsi listrik per kapita (<i>kilo Watt hour/kWh</i>)	58 ^{a)}	59,3 ^{a)}	63	64			
			b. Persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri (%)	20,8 ^{a)}	21 ^{a)}	32	60		b. Persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri (%)	20,8 ^{a)}	21 ^{a)}	32	60			
			c. Persentase pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (%)	6,9 ^{a)}	8,4 ^{***a)}	15	16		c. Persentase pemanfaatan batubara untuk kebutuhan dalam negeri (%)	6,9 ^{a)}	8,4 ^{***a)}	15	16			
			d. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)						d. Porsi EBT dalam bauran energi primer							

M - 48

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																			
		<p>2 Tercapainya produksi minyak bumi dan gas bumi, serta terkendalinya produksi batubara</p> <table border="1" data-bbox="407 1056 548 1692"> <tr> <td>a. Produksi minyak bumi (ribu BM/hari)</td> <td>829^{a)}</td> <td>804^{a)}</td> <td>800</td> <td>725</td> </tr> <tr> <td>b. Produksi gas bumi (ribu SBM/hari)</td> <td>1.188^{a)}</td> <td>1.140^{a)}</td> <td>1.200</td> <td>1.225</td> </tr> <tr> <td>c. Produksi batubara (juta ton/tahun)</td> <td>456^{a)}</td> <td>461^{a)}</td> <td>406</td> <td>400</td> </tr> </table> <p>Sumber: a) KESDM, 2018 Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Angka sementara</p>	a. Produksi minyak bumi (ribu BM/hari)	829 ^{a)}	804 ^{a)}	800	725	b. Produksi gas bumi (ribu SBM/hari)	1.188 ^{a)}	1.140 ^{a)}	1.200	1.225	c. Produksi batubara (juta ton/tahun)	456 ^{a)}	461 ^{a)}	406	400	<p>(%)</p> <table border="1" data-bbox="407 383 591 1006"> <tr> <td>2 Tercapainya produksi minyak bumi dan gas bumi, serta terkendalinya produksi batubara</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a. Produksi minyak bumi (ribu BM/hari)</td> <td>829^{a)}</td> <td>804^{a)}</td> <td>800</td> <td>775</td> </tr> <tr> <td>b. Produksi gas bumi (ribu SBM/hari)</td> <td>1.188^{a)}</td> <td>1.140^{a)}</td> <td>1.200</td> <td>1.250</td> </tr> <tr> <td>c. Produksi batubara (juta ton/tahun)</td> <td>456^{a)}</td> <td>461^{a)}</td> <td>406</td> <td>400</td> </tr> </table> <p>Sumber: a) KESDM, 2018. Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Angka sementara</p>	2 Tercapainya produksi minyak bumi dan gas bumi, serta terkendalinya produksi batubara					a. Produksi minyak bumi (ribu BM/hari)	829 ^{a)}	804 ^{a)}	800	775	b. Produksi gas bumi (ribu SBM/hari)	1.188 ^{a)}	1.140 ^{a)}	1.200	1.250	c. Produksi batubara (juta ton/tahun)	456 ^{a)}	461 ^{a)}	406	400
a. Produksi minyak bumi (ribu BM/hari)	829 ^{a)}	804 ^{a)}	800	725																																		
b. Produksi gas bumi (ribu SBM/hari)	1.188 ^{a)}	1.140 ^{a)}	1.200	1.225																																		
c. Produksi batubara (juta ton/tahun)	456 ^{a)}	461 ^{a)}	406	400																																		
2 Tercapainya produksi minyak bumi dan gas bumi, serta terkendalinya produksi batubara																																						
a. Produksi minyak bumi (ribu BM/hari)	829 ^{a)}	804 ^{a)}	800	775																																		
b. Produksi gas bumi (ribu SBM/hari)	1.188 ^{a)}	1.140 ^{a)}	1.200	1.250																																		
c. Produksi batubara (juta ton/tahun)	456 ^{a)}	461 ^{a)}	406	400																																		
130.	<p>Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi (Perubahan data pada Tabel 4.36 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi, Poin 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, dan 4.b, Halaman IV.76)</p>	<p>3.a. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)/ Pembangkit Listrik Tenaga Mimihiro (PLTM)/ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menjadi sebesar 6.218,2 MW</p> <p>3.b. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) menjadi sebesar 2.218,5 MW</p> <p>3.c. Tercapainya peningkatan kapasitas PLT Bioenergi menjadi sebesar 2.030 MW</p> <p>3.d. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi sebesar 6,5 MW</p> <p>3.e. Tercapainya peningkatan penyediaan Biofuel sebesar 10,9 juta kilo liter (KL)</p> <p>4.b. Terlaksananya penyerapan produksi gas bumi dalam negeri sebesar 784 ribu SBM/hari</p> <p>Gambar 4.36 Peta Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan</p>	<p>3.a. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mimihiro (PLTM)/ Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menjadi sebesar 489 MW</p> <p>3.b. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) menjadi sebesar 2.183,5 MW</p> <p>3.c. Tercapainya peningkatan kapasitas PLT Bioenergi menjadi sebesar 1.935 MW</p> <p>3.d. Tercapainya peningkatan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menjadi sebesar 22 MW</p> <p>3.e. Tercapainya peningkatan penyediaan Biofuel sebesar 4,51 juta kilo liter (KL)</p> <p>4.b. Terlaksananya penyerapan produksi gas bumi dalam negeri sebesar 800 ribu SBM/hari</p> <p>Gambar perubahan pada Lampiran II.</p>																																			
131.	<p>Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan (Perubahan pada Gambar 4.36 Peta Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Halaman IV.78)</p>	<p>Gambar 4.37 Peta Rencana Pelaksanaan Perluasan Pemanfaatan Gas Bumi</p>	<p>Gambar perubahan pada Lampiran II.</p>																																			
132.	<p>Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan (Perubahan pada Gambar 4.37 Peta Rencana Pelaksanaan Perluasan Pemanfaatan Gas Bumi, Halaman IV.79)</p>	<p>Gambar perubahan pada Lampiran II.</p>	<p>Gambar perubahan pada Lampiran II.</p>																																			

M - 49

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																																																																																																																																								
133.	<p>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional</p> <p>Sub-bab 4.4. Prioritas Nasional Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air</p> <p>Sub-bab 4.4.5. Program Prioritas Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan</p> <p>Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (Perubahan data pada Tabel 4.37 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan, Poin 1.a, Halaman IV.79)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{a)}</th> <th>2018^{a)}</th> <th>2019^{a)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatnya produksi pangan (juta ton)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Produksi padi</td> <td>79,5^{a)}</td> <td>81,1^{b)}</td> <td>80,1</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Produksi jagung</td> <td>23,6^{a)}</td> <td>28,9^{a)}</td> <td>23,4</td> <td>24,1</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Produksi kedelai</td> <td>0,9^{a)}</td> <td>0,5^{a)}</td> <td>2,3</td> <td>2,6</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Produksi gula</td> <td>2,2^{a)}</td> <td>2,1^{a)}</td> <td>3,3</td> <td>3,8</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Produksi daging sapi</td> <td>0,4^{a)}</td> <td>0,6^{a)}</td> <td>0,7</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>Produksi ikan</td> <td>11,9^{b)}</td> <td>13,6^{b)}</td> <td>17,4</td> <td>18,8</td> </tr> <tr> <td>g.</td> <td>Produksi garam</td> <td>0,1^{b)}</td> <td>1,1^{b)}</td> <td>4,1</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meningkatnya akses pangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Perubahan harga beras (persen)</td> <td>3,3^{a)}</td> <td>0,3^{a)}</td> <td></td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meningkatnya kualitas konsumsi pangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Konsumsi kalori (Kkal)</td> <td>2.040^{a)}</td> <td>2.115^{a)}</td> <td>2.150</td> <td>2.150</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Konsumsi ikan (kg/kp/tahun)</td> <td>47,2^{b)}</td> <td>46,5^{b)}</td> <td>50,6</td> <td>54,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) Kementan, 2018; b) KKP, 2018 Keterangan: *) Realisasi, **) Target</p>	No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	1	Meningkatnya produksi pangan (juta ton)					a.	Produksi padi	79,5 ^{a)}	81,1 ^{b)}	80,1	82	b.	Produksi jagung	23,6 ^{a)}	28,9 ^{a)}	23,4	24,1	c.	Produksi kedelai	0,9 ^{a)}	0,5 ^{a)}	2,3	2,6	d.	Produksi gula	2,2 ^{a)}	2,1 ^{a)}	3,3	3,8	e.	Produksi daging sapi	0,4 ^{a)}	0,6 ^{a)}	0,7	0,8	f.	Produksi ikan	11,9 ^{b)}	13,6 ^{b)}	17,4	18,8	g.	Produksi garam	0,1 ^{b)}	1,1 ^{b)}	4,1	4,5	2	Meningkatnya akses pangan						Perubahan harga beras (persen)	3,3 ^{a)}	0,3 ^{a)}		0,5	3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan					a.	Konsumsi kalori (Kkal)	2.040 ^{a)}	2.115 ^{a)}	2.150	2.150	b.	Konsumsi ikan (kg/kp/tahun)	47,2 ^{b)}	46,5 ^{b)}	50,6	54,5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{a)}</th> <th>2018^{a)}</th> <th>2019^{a)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatnya produksi pangan (juta ton)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Produksi padi</td> <td>79,5^{a)}</td> <td>81,1^{b)}</td> <td>56,5</td> <td>57,9</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Produksi jagung</td> <td>23,6^{a)}</td> <td>28,9^{a)}</td> <td>23,4</td> <td>24,1</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Produksi kedelai</td> <td>0,9^{a)}</td> <td>0,5^{a)}</td> <td>2,3</td> <td>2,6</td> </tr> <tr> <td>d.</td> <td>Produksi gula</td> <td>2,2^{a)}</td> <td>2,1^{a)}</td> <td>3,3</td> <td>3,8</td> </tr> <tr> <td>e.</td> <td>Produksi daging sapi</td> <td>0,4^{a)}</td> <td>0,6^{a)}</td> <td>0,7</td> <td>0,8</td> </tr> <tr> <td>f.</td> <td>Produksi ikan</td> <td>11,9^{b)}</td> <td>13,6^{b)}</td> <td>17,4</td> <td>18,8</td> </tr> <tr> <td>g.</td> <td>Produksi garam</td> <td>0,1^{b)}</td> <td>1,1^{b)}</td> <td>4,1</td> <td>4,5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meningkatnya akses pangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Perubahan harga beras (persen)</td> <td>3,3^{a)}</td> <td>0,3^{a)}</td> <td></td> <td>0,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meningkatnya kualitas konsumsi pangan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Konsumsi kalori (Kkal)</td> <td>2.040^{a)}</td> <td>2.115^{a)}</td> <td>2.150</td> <td>2.150</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Konsumsi ikan (kg/kp/tahun)</td> <td>47,2^{b)}</td> <td>46,5^{b)}</td> <td>50,6</td> <td>54,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) Kementan, 2018; b) KKP, 2018 Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Terjadi perubahan angka produksi akibat perbaikan metodologi perhitungan</p>	No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	1	Meningkatnya produksi pangan (juta ton)					a.	Produksi padi	79,5 ^{a)}	81,1 ^{b)}	56,5	57,9	b.	Produksi jagung	23,6 ^{a)}	28,9 ^{a)}	23,4	24,1	c.	Produksi kedelai	0,9 ^{a)}	0,5 ^{a)}	2,3	2,6	d.	Produksi gula	2,2 ^{a)}	2,1 ^{a)}	3,3	3,8	e.	Produksi daging sapi	0,4 ^{a)}	0,6 ^{a)}	0,7	0,8	f.	Produksi ikan	11,9 ^{b)}	13,6 ^{b)}	17,4	18,8	g.	Produksi garam	0,1 ^{b)}	1,1 ^{b)}	4,1	4,5	2	Meningkatnya akses pangan						Perubahan harga beras (persen)	3,3 ^{a)}	0,3 ^{a)}		0,5	3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan					a.	Konsumsi kalori (Kkal)	2.040 ^{a)}	2.115 ^{a)}	2.150	2.150	b.	Konsumsi ikan (kg/kp/tahun)	47,2 ^{b)}	46,5 ^{b)}	50,6	54,5
No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}																																																																																																																																																																						
1	Meningkatnya produksi pangan (juta ton)																																																																																																																																																																										
a.	Produksi padi	79,5 ^{a)}	81,1 ^{b)}	80,1	82																																																																																																																																																																						
b.	Produksi jagung	23,6 ^{a)}	28,9 ^{a)}	23,4	24,1																																																																																																																																																																						
c.	Produksi kedelai	0,9 ^{a)}	0,5 ^{a)}	2,3	2,6																																																																																																																																																																						
d.	Produksi gula	2,2 ^{a)}	2,1 ^{a)}	3,3	3,8																																																																																																																																																																						
e.	Produksi daging sapi	0,4 ^{a)}	0,6 ^{a)}	0,7	0,8																																																																																																																																																																						
f.	Produksi ikan	11,9 ^{b)}	13,6 ^{b)}	17,4	18,8																																																																																																																																																																						
g.	Produksi garam	0,1 ^{b)}	1,1 ^{b)}	4,1	4,5																																																																																																																																																																						
2	Meningkatnya akses pangan																																																																																																																																																																										
	Perubahan harga beras (persen)	3,3 ^{a)}	0,3 ^{a)}		0,5																																																																																																																																																																						
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan																																																																																																																																																																										
a.	Konsumsi kalori (Kkal)	2.040 ^{a)}	2.115 ^{a)}	2.150	2.150																																																																																																																																																																						
b.	Konsumsi ikan (kg/kp/tahun)	47,2 ^{b)}	46,5 ^{b)}	50,6	54,5																																																																																																																																																																						
No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}																																																																																																																																																																						
1	Meningkatnya produksi pangan (juta ton)																																																																																																																																																																										
a.	Produksi padi	79,5 ^{a)}	81,1 ^{b)}	56,5	57,9																																																																																																																																																																						
b.	Produksi jagung	23,6 ^{a)}	28,9 ^{a)}	23,4	24,1																																																																																																																																																																						
c.	Produksi kedelai	0,9 ^{a)}	0,5 ^{a)}	2,3	2,6																																																																																																																																																																						
d.	Produksi gula	2,2 ^{a)}	2,1 ^{a)}	3,3	3,8																																																																																																																																																																						
e.	Produksi daging sapi	0,4 ^{a)}	0,6 ^{a)}	0,7	0,8																																																																																																																																																																						
f.	Produksi ikan	11,9 ^{b)}	13,6 ^{b)}	17,4	18,8																																																																																																																																																																						
g.	Produksi garam	0,1 ^{b)}	1,1 ^{b)}	4,1	4,5																																																																																																																																																																						
2	Meningkatnya akses pangan																																																																																																																																																																										
	Perubahan harga beras (persen)	3,3 ^{a)}	0,3 ^{a)}		0,5																																																																																																																																																																						
3	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan																																																																																																																																																																										
a.	Konsumsi kalori (Kkal)	2.040 ^{a)}	2.115 ^{a)}	2.150	2.150																																																																																																																																																																						
b.	Konsumsi ikan (kg/kp/tahun)	47,2 ^{b)}	46,5 ^{b)}	50,6	54,5																																																																																																																																																																						
134.	<p>Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan (Perubahan data pada Tabel 4.38 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan, Poin 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, dan 5.c, Halaman IV.80)</p>	<p>4.a. Meningkatkan rasio hasil penelitian pertanian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang didiseminasikan sebesar 70 persen Lokasi: 33 Provinsi</p> <p>4.b. Meningkatkan jumlah penyuluh pertanian menjadi sebanyak 46.213 orang Lokasi: 33 Provinsi</p> <p>4.c. Meningkatkan jumlah penyuluh perikanan menjadi sebanyak 5.358 orang Lokasi: 33 Provinsi</p>	<p>4.a. Meningkatkan rasio hasil penelitian pertanian yang dimanfaatkan terhadap hasil penelitian yang didiseminasikan sebesar 70 persen Lokasi: 34 Provinsi</p> <p>4.b. Meningkatkan jumlah penyuluh pertanian menjadi sebanyak 44.897 orang Lokasi: 34 Provinsi</p> <p>4.c. Meningkatkan jumlah penyuluh perikanan menjadi sebanyak 5.252 orang Lokasi: 34 Provinsi</p>																																																																																																																																																																								

M - 50

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		<p>5.a. Terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi 42.000 ha</p> <p>5.b. Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier 134.075 ha K/L: Kementan</p> <p>5.c. Terlaksananya pembangunan embung pertanian sebanyak 400 buah K/L: Kementan</p>	<p>5.a. Terbangunnya dan meningkatnya jaringan irigasi 140.000 ha</p> <p>5.b. Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi tersier 370.000 ha K/L: KemenPUPR</p> <p>5.c. Terlaksananya pembangunan embung pertanian sebanyak 539 buah K/L: Kementan*), KemenPUPR</p>
135.	<p>Rencana PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Aspek Kewilayahan (Perubahan data pada Gambar 4.39 Peta Rencana PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Aspek Kewilayahan, Halaman IV.82)</p>	<p>Gambar 4.39 Peta Rencana PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Aspek Kewilayahan</p>	<p>Gambar perubahan pada Lampiran II.</p>
	<p>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Sub-bab 4.4.6. Program Prioritas Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumber Daya Air</p>		
136.	<p>Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air (Perubahan data pada Tabel 4.39 Sasaran dan Indikator PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air, Poin 1., Halaman IV.83)</p>	<p>1. Target indikator luas lahan kritis tahun 2019 sebesar 230 ribu ha</p>	<p>1. Target indikator luas lahan kritis tahun 2019 sebesar 206 ribu ha</p>
137.	<p>Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air (Perubahan data pada Tabel 4.40 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Sumber Daya Air, Poin 1.b, 1.c, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.b, 3.c, dan 4.a, Halaman IV.84)</p>	<p>1.b. Meningkatkan luas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air (KTA) secara vegetatif seluas 230.000 Ha</p> <p>1.c. Terkendalinya endapan sedimen di 2 danau dan 2 waduk</p> <p>2.b. Terbangunnya infrastruktur tampungan air sebanyak 120 embung</p> <p>2.c. Tersedianya infrastruktur air tanah berupa sumur air tanah di daerah krisis air sebanyak 650 titik</p> <p>2.d. Tersedianya infrastruktur air baku sebesar 5 m3/detik. Lokasi: 21 provinsi.</p> <p>3.a. Meningkatkan kapasitas desain pengendalian banjir menjadi 10 – 100</p>	<p>1.b. Meningkatkan luas tutupan hutan dan lahan melalui konservasi tanah dan air (KTA) secara vegetatif seluas 206.000 Ha</p> <p>1.c. Terkendalinya endapan sedimen di 10 danau dan 4 waduk</p> <p>2.b. Terbangunnya infrastruktur tampungan air sebanyak 186 embung</p> <p>2.c. Tersedianya infrastruktur air tanah berupa sumur air tanah di daerah krisis air sebanyak 1.290 titik</p> <p>2.d. Tersedianya infrastruktur air baku sebanyak 47 unit. Lokasi: 17 provinsi.</p> <p>3.a. Meningkatkan kapasitas desain pengendalian banjir menjadi 10 – 100</p>

M - 51

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
138.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan (Perubahan data dan narasi pada Tabel 4.42 Sasaran dan Indikator KP dari PP Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan, Poin 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.g, 1.h, 1.i, 1.j, 1.k, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f, 2.g, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.h, 4.a, 4.b, 4.c, dan 4.d, Halaman IV.87)	<p>tahun. Lokasi: 20 provinsi</p> <p>3.b. Menguatnya manajemen pengelolaan banjir yang terintegrasi di 8 wilayah sungai kewenangan pusat. Lokasi: 8 provinsi</p> <p>3.c. Terbangunnya daerah pesisir terpadu di 19 lokasi. Lokasi: 19 provinsi.</p> <p>4.a. Terbangunnya sistem informasi data hidrogeologi sebanyak 60 titik</p>	<p>tahun. Lokasi: 29 provinsi</p> <p>3.b. Menguatnya manajemen pengelolaan banjir yang terintegrasi di 4 wilayah sungai kewenangan pusat. Lokasi: 5 provinsi</p> <p>3.c. Terbangunnya daerah pesisir terpadu di 40 lokasi. Lokasi: 22 provinsi. (dihapus)</p>
	<p>Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional Sub-bab 4.4. Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Sub-bab 4.4.7. Program Prioritas Peningkatan Daya dukung Sumber Daya Alam dan Daya Tampung Lingkungan</p>	<p>1.a. Menurunnya konsumsi bahan perusak ozon sebesar 5 persen</p> <p>1.b. Terjangkaunya 746 desa dengan pelaksanaan Patroli Terpadu di Sumatera dan Kalimantan. Lokasi: 746 desa</p> <p>1.c. Tersedianya peringatan, deteksi dan pemadaman dini. Lokasi: Pusat dan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan. K/L: KLHK</p> <p>1.d. Meningkatkan proporsi jumlah industri yang memenuhi baku mutu emisi pada 1500 industri. Lokasi: Pusat.</p> <p>1.e. Tersedianya informasi data kualitas air di 1 titik pemantauan. Lokasi: 1 Kabupaten/kota. K/L: KLHK.</p> <p>1.f. Meningkatkan proporsi jumlah industri yang meningkatkan keataannya untuk melakukan rehabilitasi pasca tambang</p> <p>1.g. Meningkatkan kapasitas 500 orang kader lingkungan hidup</p> <p>1.h. Meningkatkan jumlah sekolah/kampus yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 500 unit di seluruh Indonesia</p> <p>1.i. Meningkatkan jumlah anggota saka kalpataru peduli dan berbudaya lingkungan hidup sebanyak 900 orang di Jabodetabek</p>	<p>1.a. Menurunnya konsumsi bahan perusak ozon jenis HCFC sebesar 5 persen</p> <p>1.b. Menurunnya persentase luas kebakaran pada hutan/lahan sebesar 10 persen Lokasi: Pusat dan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan</p> <p>1.c. Tersedianya pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim. Lokasi: 340 kabupaten/kota. K/L: BMKG</p> <p>1.d. Terlaksananya pemantauan kualitas udara untuk perhitungan indeks kualitas udara. Lokasi: 400 kabupaten/ kota.</p> <p>1.e. Meningkatnya kualitas pengelolaan kegeologian. Lokasi: Pusat K/L: KESDM. (dihapus)</p> <p>(dihapus)</p> <p>(dihapus)</p> <p>(dihapus)</p>

M - 52

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		1.j. Tersedianya layanan informasi perubahan iklim (ASRS) di 10 lokasi	(dihapus)
		1.k. Tersedianya layanan Informasi Meteorologi Maritim (SLN) di 20 lokasi	(dihapus)
		2.a. Meningkatkan kemitraan dan MPA pengendalian kebakaran hutan dan lahan di 45 desa. Lokasi: Pusat dan provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	2.a. Meningkatkan jumlah dan jenis B3 yang terkelola di 4 lokasi. Lokasi: Pusat
		2.b. Terlaksananya pemadaman darat dan penanganan pasca karhutla. Lokasi: Provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	2.b. Terkendalnya lokasi pesisir dan laut yang dilakukan pengendalian pencemaran dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya di 1 lokasi. Lokasi: Pusat.
		2.c. Tersedianya pemadaman udara/pemantauan dari udara di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan	2.c. Menurunnya persentase luas kebakaran pada hutan/lahan sebesar 10 persen
		2.d. Terlaksananya pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri untuk pertambangan di 3 lokasi	(dihapus)
		2.e. Berkurangnya timbulan sampah melalui penerapan EPR sebanyak 85 ton	(dihapus)
		2.f. Tersedianya pengelolaan sampah terpadu di wilayah pesisir di 3 kabupaten/kota	(dihapus)
		2.g. Terlaksananya pemulihan tumpahan minyak di laut di 2 lokasi	(dihapus)
		3.a. Terlaksananya pemulihan ekosistem padang lamun, terumbu karang dan vegetasi pantai pada kawasan prioritas di 3 lokasi. Lokasi: 3 kabupaten/kota.	3.a. Terlaksananya koordinasi dan fasilitasi restorasi gambut di 7 provinsi rawan kebakaran hutan seluas 400.000 Ha. Lokasi: 7 provinsi.
		K/L: KLHK	K/L: KLHK (Badan Restorasi Gambut)
		3.b. Terlaksananya pemulihan lahan akses bekas tambang seluas 30,2 Ha. Lokasi: 5 lokasi	3.b. Tersedianya fasilitasi pemulihan lahan akses bekas tambang seluas 30,2 Ha. Lokasi: 3 lokasi.
		3.c. Terlaksananya pemulihan lahan gambut yang terdegradasi seluas 1.500 Ha di lahan masyarakat	3.c. Terpilihkannya lahan gambut terdegradasi di areal penggunaan lainnya (APL) seluas 1500 Ha
		3.d. Terlaksananya restorasi lahan gambut seluas 400.000 Ha. Lokasi: 7 Provinsi. K/L: KLHK (Badan Restorasi Gambut).	(dihapus)
		3.e. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik di 3 kabupaten/ kota. Lokasi: 3 Kabupaten/kota.	3.d. Terpilihkannya ekosistem pesisir dan laut yang rusak di 3 lokasi. Lokasi: 3 kabupaten.

M - 53

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																																																																
139.	Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu (Perubahan data pada Tabel 4.43 Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu, Poin 2.a, Halaman IV.90)	3.f. Tersedianya fasilitas pengelolaan sampah di DAS Citarum sebesar 10.800 ton	(dihapus)																																																																																																
		3.h. Terlaksananya rehabilitasi kawasan pesisir di 12 lokasi. Lokasi: 12 lokasi. K/L: KKP.	3.f. Terlaksananya rehabilitasi kawasan pesisir di 7 lokasi. Lokasi: 7 lokasi. K/L: KKP.																																																																																																
		4.a. Terlaksananya pengamanan kawasan hutan dan peredaran hasil hutan	4.a. Terlaksananya pengamanan kawasan hutan dari gangguan dan ancaman bidang kehutanan melalui kegiatan sosialisasi, patroli, dan operasi																																																																																																
		4.b. Tertangannya gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan	4.b. Terlaksananya penerapan sanksi administrasi sebanyak 70 persen																																																																																																
		4.c. Terselenggaranya kasus sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan	4.c. Terselenggaranya kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan sampai dengan P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) sebanyak 75 persen																																																																																																
		4.d. Terselenggaranya pengaduan masyarakat terkait pengelolaan SDA dan LH	4.d. Tertangannya gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan																																																																																																
Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional Sub Bab 4.5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu																																																																																																			
139.	Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu (Perubahan data pada Tabel 4.43 Sasaran dan Indikator PN Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu, Poin 2.a, Halaman IV.90)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{a)}</th> <th>2018^{b)}</th> <th>2019^{c)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Terjaganya stabilitas keamanan nasional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Clearance rate (%)</td> <td>58,93^{a)}</td> <td>60^{a)}</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)</td> <td>19' 21"^{a)}</td> <td>19' 00"^{a)}</td> <td>18' 30"</td> <td>18' 00"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Global Military Index (nilai)</td> <td>0,34^{b)}</td> <td>0,33^{b)}</td> <td>0,33*</td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Terselenggaranya kesuksesan Pemilu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)</td> <td>70,09^{d)}</td> <td>74,3*</td> <td>74,6</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tingkat partisipasi pemilih (%)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>77,5</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}	2019 ^{c)}	1.	Terjaganya stabilitas keamanan nasional						a. Clearance rate (%)	58,93 ^{a)}	60 ^{a)}	60	60		b. Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)	19' 21" ^{a)}	19' 00" ^{a)}	18' 30"	18' 00"		c. Global Military Index (nilai)	0,34 ^{b)}	0,33 ^{b)}	0,33*	0,31	2.	Terselenggaranya kesuksesan Pemilu						a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)	70,09 ^{d)}	74,3*	74,6	75		b. Tingkat partisipasi pemilih (%)	N/A	N/A	N/A	77,5	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{a)}</th> <th>2018^{b)}</th> <th>2019^{c)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Terjaganya stabilitas keamanan nasional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Clearance rate (%)</td> <td>58,93^{a)}</td> <td>60^{a)}</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)</td> <td>19' 21"^{a)}</td> <td>19' 00"^{a)}</td> <td>18' 30"</td> <td>18' 00"</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Global Military Index (nilai)</td> <td>0,34^{b)}</td> <td>0,33^{b)}</td> <td>0,33*</td> <td>0,31</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Terselenggaranya kesuksesan Pemilu</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)</td> <td>72,82^{d)}</td> <td>70,09*</td> <td>72,11</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tingkat partisipasi pemilih (%)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>77,5</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}	2019 ^{c)}	1.	Terjaganya stabilitas keamanan nasional						a. Clearance rate (%)	58,93 ^{a)}	60 ^{a)}	60	60		b. Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)	19' 21" ^{a)}	19' 00" ^{a)}	18' 30"	18' 00"		c. Global Military Index (nilai)	0,34 ^{b)}	0,33 ^{b)}	0,33*	0,31	2.	Terselenggaranya kesuksesan Pemilu						a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)	72,82 ^{d)}	70,09*	72,11	75		b. Tingkat partisipasi pemilih (%)	N/A	N/A	N/A	77,5
No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}	2019 ^{c)}																																																																																														
1.	Terjaganya stabilitas keamanan nasional																																																																																																		
	a. Clearance rate (%)	58,93 ^{a)}	60 ^{a)}	60	60																																																																																														
	b. Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)	19' 21" ^{a)}	19' 00" ^{a)}	18' 30"	18' 00"																																																																																														
	c. Global Military Index (nilai)	0,34 ^{b)}	0,33 ^{b)}	0,33*	0,31																																																																																														
2.	Terselenggaranya kesuksesan Pemilu																																																																																																		
	a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)	70,09 ^{d)}	74,3*	74,6	75																																																																																														
	b. Tingkat partisipasi pemilih (%)	N/A	N/A	N/A	77,5																																																																																														
No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{b)}	2019 ^{c)}																																																																																														
1.	Terjaganya stabilitas keamanan nasional																																																																																																		
	a. Clearance rate (%)	58,93 ^{a)}	60 ^{a)}	60	60																																																																																														
	b. Response time kehadiran aparat penegak hukum di TKP (menit, detik)	19' 21" ^{a)}	19' 00" ^{a)}	18' 30"	18' 00"																																																																																														
	c. Global Military Index (nilai)	0,34 ^{b)}	0,33 ^{b)}	0,33*	0,31																																																																																														
2.	Terselenggaranya kesuksesan Pemilu																																																																																																		
	a. Indeks demokrasi Indonesia (IDI)	72,82 ^{d)}	70,09*	72,11	75																																																																																														
	b. Tingkat partisipasi pemilih (%)	N/A	N/A	N/A	77,5																																																																																														
		Sumber: a) Polri, 2018; b) Global Fire Power, 2018 World Military Strength Rankings; c) BPS 2017 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; N/A: Data tidak tersedia dikarenakan tidak dilaksanakan Pemilu pada tahun tersebut.																																																																																																	

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019 (dihapus)
140.	<p>Kerangka Regulasi (Perubahan narasi pada Poin 4, 5, dan 6, Halaman IV.92)</p>	<p>4. KP Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; Kegiatan Prioritas Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan; Kegiatan Prioritas Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika; serta Kegiatan Prioritas Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri; Revisi UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.</p> <p>5. KP Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; KP Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan; KP Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika; serta KP Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri; Revisi UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.</p> <p>6. KP Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan Internasional; KP Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan; KP Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika; serta KP Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri; Perpres tentang Tata Cara Pengeksekusi Perjanjian Internasional.</p>	
141.	<p>Sasaran dan Indikator KP dari PP Kamtibmas dan Keamanan Siber (Perubahan data dan narasi pada Tabel 4.45 Sasaran dan Indikator KP dari PP Kamtibmas dan Keamanan Siber, Poin 1.j, 1.m, 1.n, 1.o, 1.q, 1.r, 3.i, 3.j, 3.l, 3.m, 3.n, 3.q, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 5.a, 5.b, 5.c, 5.f, 5.i, 5.l, 5.p, 5.q, 5.r, 5.s, Halaman IV.94)</p>	<p>Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional Sub Bab 4.5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Sub Bab 4.5.1 Program Prioritas Kamtibmas dan Keamanan Siber</p> <p>1.j. Jumlah giat pengamanan aksi unjuk rasa, sebanyak 4.038.750 giat</p> <p>1.m. Jumlah MoU Integrasi CCTV Pemda dengan 16 Command Center Polri, sebanyak 16 MoU di Lokasi: 16 Polda</p> <p>1.n. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana umum, sebesar 60 persen (15.034 kasus sangat sulit dan sulit)</p> <p>1.o. Jumlah kegiatan pemeriksaan visum luar bagi korban kejahatan perempuan dan anak, sebanyak 1.550 kasus</p> <p>1.q. Persentase penyelesaian tindak pidana korupsi, sebesar 70 persen (770 kasus)</p> <p>1.r. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang, sebesar 60 persen (25 kasus)</p> <p>3.i. Jumlah pos komando interdiksi terpadu yang dibangun sebanyak 7 pos Lokasi: 7 Provinsi (Kab. Tangerang, Kab. Badung, Kab. Deli Serdang, Kota Mando, Kota Batam, Kab.Sanggau, Kab.Nunukan)</p> <p>3.j. Jumlah relawan anti narkoba yang mendapatkan peningkatan kapasitas, sebanyak 150 relawan Lokasi: 3 Provinsi (Aceh, Papua, Papua Barat)</p>	<p>1.j. Jumlah giat pengamanan aksi unjuk rasa, sebanyak 4.229.714 giat</p> <p>1.m. Jumlah MoU Integrasi CCTV Pemda dengan sebanyak 38 MoU Lokasi: pusat</p> <p>1.n. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana umum, sebesar 60 persen (26.694 kasus)</p> <p>1.o. Jumlah kegiatan pemeriksaan visum luar bagi korban kejahatan perempuan dan anak, sebanyak 3.778 kasus</p> <p>1.q. Persentase penyelesaian tindak pidana korupsi, sebesar 70 persen (2.590 kasus)</p> <p>1.r. Persentase penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang, sebesar 60 persen (37 kasus)</p> <p>3.i. Jumlah pos komando interdiksi terpadu yang dibangun sebanyak 7 pos Lokasi: 7 Provinsi (Kab. Batam, Kab. Badung, Kab. Deli Serdang, Kab. Atambua, Kota Batam, Kab.Sanggau, Kab.Nunukan)</p> <p>3.j. Jumlah relawan anti narkoba yang mendapatkan peningkatan kapasitas, sebanyak 150 relawan Lokasi: 4 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara, Papua, Papua Barat)</p>

M - 55

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		3.l. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, sebanyak 615 berkas perkara	3.l. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, sebanyak 626 berkas perkara Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba, sebanyak 626 berkas perkara
		3.m. Jumlah penyelidikan dan pemusnahan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya, sebanyak 12 titik lokasi	3.m. Jumlah penyelidikan dan pemusnahan lahan ganja dan tanaman terlarang lainnya, sebanyak 12 titik lokasi di 3 Provinsi (Aceh, Sumatera Utara dan Papua)
		3.n. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba, sebanyak 43 berkas perkara	3.n. Jumlah penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkoba, sebanyak 47 berkas perkara
		3.q. Persentase penyelesaian tindak pidana narkoba sebesar 80% (1.680 kasus)	3.q. Persentase penyelesaian tindak pidana narkoba sebesar 80% (8.091 kasus)
		4.a. Jumlah pengadaan modernisasi peralatan teknologi intelijen, sebanyak 1 unit	4.a. Jumlah pengadaan modernisasi peralatan teknologi intelijen siber, sebanyak 20 unit
		4.b. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang deteksi dini, sebanyak 488 laporan	4.b. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang deteksi dini, sebanyak 1148 laporan
		4.c. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang kontra, sebanyak 60 laporan	4.c. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang kontra, sebanyak 860 laporan
		4.d. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang analisa dan forensik, sebanyak 522 laporan	4.d. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang analisa dan forensik, sebanyak 1322 laporan
		4.e. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang respon ancaman, sebanyak 505 laporan	4.e. Jumlah pelaksanaan operasi intelijen siber bidang respon ancaman, sebanyak 1305 laporan
		5.a. Jumlah penyusunan dokumen counter-narrative strategy	(dihapus)
		5.b. 32 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang berjalan efektif	(dihapus)
		5.c. Terkoordinasinya pelibatan secara terpadu 36 K/L pada pelaksanaan program penanggulangan terorisme	5.a. Terlaksananya pelibatan secara terpadu K/L pada pelaksanaan program penanggulangan terorisme di 5 bidang
		5.f. Terlaksananya 97 operasi Satgas Penindakan dan Kesiapsiagaan Nasional	5.d. Terlaksananya 98 operasi Satgas Penindakan dan Kesiapsiagaan Nasional
		5.i. Terjamahnya perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme melalui 3 koordinasi	5.g. Terjamahnya perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum, saksi dan korban dalam tindak pidana terorisme melalui 4 koordinasi
		5.l. Terlaksananya operasionalisasi pusat deradikalisasi selama 12 bulan	(dihapus)
		5.p. Jumlah peserta diklat pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebanyak 400 orang Lokasi: 5 provinsi	5.m. Jumlah peserta diklat pemantapan nilai-nilai kebangsaan sebanyak 200 orang Lokasi: 2 provinsi
		5.q. Jumlah peserta diklat training of trainer (ToT) nilai-nilai kebangsaan sebanyak 400 orang	5.n. Jumlah peserta diklat pelatihan untuk pelatih (ToT) nilai-nilai kebangsaan sebanyak 200 orang

M - 56

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																																								
		Lokasi: 4 provinsi 5.r. Jumlah peserta dialog wawasan kebangsaan sebanyak 800 orang Lokasi: 3 provinsi 5.s. Jumlah operasi intelijen kontra terorisme sebanyak 2.800 laporan	Lokasi: 2 provinsi 5.o. Jumlah peserta dialog wawasan kebangsaan sebanyak 200 orang Lokasi: 2 provinsi 5.p. Jumlah operasi intelijen kontra terorisme sebanyak 3.670 laporan																																																																								
142.	Sasaran dan Indikator PP Kesuksesan Pemilu (Perubahan data pada Tabel 4-46 Sasaran dan Indikator PP Kesuksesan Pemilu, Poin 1.a, 1.b, dan 1.c, Halaman IV.100)	Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional Sub Bab 4.5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Sub Bab 4.5.2 Program Prioritas Kesuksesan Pemilu																																																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{a)}</th> <th>2018^{a)}</th> <th>2019^{a,*)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Nilai indeks hak-hak politik</td> <td>70,11^{a)}</td> <td>66^{a)}</td> <td>67</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Nilai indeks kebebasan sipil</td> <td>76,45^{a)}</td> <td>85^{a)}</td> <td>86^{a)}</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Nilai indeks lembaga demokrasi</td> <td>62,05^{a)}</td> <td>77^{a)}</td> <td>78</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table> Sumber: a) BPS, 2016-2017 Keterangan: *) Realisasi; **) Target	No	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a,*)}	1	Terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis						a. Nilai indeks hak-hak politik	70,11 ^{a)}	66 ^{a)}	67	68		b. Nilai indeks kebebasan sipil	76,45 ^{a)}	85 ^{a)}	86 ^{a)}	87		c. Nilai indeks lembaga demokrasi	62,05 ^{a)}	77 ^{a)}	78	79		d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019	N/A	N/A	N/A	59	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{a)}</th> <th>2018^{a)}</th> <th>2019^{a,*)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Nilai indeks hak-hak politik</td> <td>70,63^{a)}</td> <td>70,11^{a)}</td> <td>66,63^{a)}</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Nilai indeks kebebasan sipil</td> <td>80,30^{a)}</td> <td>76,45^{a)}</td> <td>78,75^{a)}</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Nilai indeks lembaga demokrasi</td> <td>66,87^{a)}</td> <td>62,05^{a)}</td> <td>72,49^{a)}</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>59</td> </tr> </tbody> </table> Sumber: a) BPS, 2016-2017 Keterangan: *) Realisasi; **) Target	No	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a,*)}	1	Terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis						a. Nilai indeks hak-hak politik	70,63 ^{a)}	70,11 ^{a)}	66,63 ^{a)}	68		b. Nilai indeks kebebasan sipil	80,30 ^{a)}	76,45 ^{a)}	78,75 ^{a)}	87		c. Nilai indeks lembaga demokrasi	66,87 ^{a)}	62,05 ^{a)}	72,49 ^{a)}	71		d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019	N/A	N/A	N/A	59
No	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a,*)}																																																																						
1	Terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis																																																																										
	a. Nilai indeks hak-hak politik	70,11 ^{a)}	66 ^{a)}	67	68																																																																						
	b. Nilai indeks kebebasan sipil	76,45 ^{a)}	85 ^{a)}	86 ^{a)}	87																																																																						
	c. Nilai indeks lembaga demokrasi	62,05 ^{a)}	77 ^{a)}	78	79																																																																						
	d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019	N/A	N/A	N/A	59																																																																						
No	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a,*)}																																																																						
1	Terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis																																																																										
	a. Nilai indeks hak-hak politik	70,63 ^{a)}	70,11 ^{a)}	66,63 ^{a)}	68																																																																						
	b. Nilai indeks kebebasan sipil	80,30 ^{a)}	76,45 ^{a)}	78,75 ^{a)}	87																																																																						
	c. Nilai indeks lembaga demokrasi	66,87 ^{a)}	62,05 ^{a)}	72,49 ^{a)}	71																																																																						
	d. Jumlah kasus tindak pidana selama Pemilu 2019	N/A	N/A	N/A	59																																																																						
143.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Kesuksesan Pemilu (Perubahan data pada Tabel 4-47 Sasaran dan Indikator KP dari PP Kesuksesan Pemilu, Poin 1.at, 1.au, 1.aw, 1.az, 2.i, 2.k, 2.l, 2.m, 2.n, dan 2.o, Halaman IV.101)	Sumber: a) BPS, 2016-2017 Keterangan: *) Realisasi; **) Target	Sumber: a) BPS, 2016-2017 Keterangan: *) Realisasi; **) Target																																																																								
		1.at. Terselenggaranya 65 persen sengketa informasi 1.au. Terlaksananya ketentuan keterbukaan informasi publik di 75 persen badan publik pemerintah 1.aw. Terlaksananya pengawasan keterbukaan informasi pemilu di 350 masyarakat dan Badan Publik 1.az. Tersusunnya hasil reviu atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan tahun 2019 di pusat sebanyak 4 laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan daerah sebanyak 200 LHP. 2.i. Terlaksananya 84 Kegiatan Konsolidasi/Standarisasi Proses Government Public Relation 2.k. Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang perekonomian dan kemaritiman sejumlah 3500 spot 2.l. Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang pembangunan	1.at. Terselenggaranya 70 persen sengketa informasi 1.au. Terlaksananya ketentuan keterbukaan informasi publik di 80 persen badan publik pemerintah 1.aw. Terlaksananya pengawasan keterbukaan informasi pemilu di 80 persen Badan Publik 1.az. Tersusunnya hasil pengawasan atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan dana pemilu tahun 2019 di dua instansi (Pusat) dan 200 LHP (Daerah). 2.i. Tersusunnya 9 dokumen Konsolidasi/Standarisasi Proses Government Public Relation 2.k. Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang perekonomian dan kemaritiman untuk 3,6 juta masyarakat Indonesia 2.l. Terlaksananya diseminasi informasi publik bidang pembangunan																																																																								

M - 57

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019				PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019			
		2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}	2016 ^{a)}	2017 ^{a)}	2018 ^{a)}	2019 ^{a)}
		<p>manusia dan kebudayaan sejumlah 5000 spot</p> <p>2.m. Terlaksananya 5 laporan penyelenggaraan komunikasi publik melalui media cetak, online, audio visual dan media sosial</p> <p>2.n. Terlaksananya diseminasi informasi pemilu sejumlah 1.366 Spot</p> <p>2.o. Terbangunnya akses media publik di 30 lokasi</p>				<p>manusia dan kebudayaan untuk 127,5 juta masyarakat Indonesia</p> <p>2.m. Terlaksananya diseminasi Informasi publik yang berkualitas melalui media Pemerintah</p> <p>2.n. Terlaksananya penyebaran informasi pemilu untuk 124,6 juta masyarakat Indonesia</p> <p>(dihapus)</p>			
<p>Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional Sub Bab 4.5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Sub Bab 4.5.3 Program Prioritas Pertahanan Wilayah Nasional</p>									
144.	Sasaran dan Indikator PP Pertahanan Wilayah Nasional (Perubahan data pada Tabel 4.48 Sasaran dan Indikator PP Pertahanan Wilayah Nasional, Poin 1.b, Halaman IV.107)	<p>No. Sasaran/Indikator 2016^{a)} 2017^{a)} 2018^{a)} 2019^{a)}</p> <p>1. Terwujudnya wilayah nasional yang aman dan berdaulat</p> <p>a. Jumlah penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di laut (kasus)</p> <p>b. Jumlah pembangunan infrastruktur perbatasan</p> <p>c. Persentase pencapaian <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) (%)</p> <p>d. Persentase kontribusi industri pertahanan (%)</p>				<p>1. Terwujudnya wilayah nasional yang aman dan berdaulat</p> <p>a. Jumlah penanganan kasus pelanggaran dan tindak pidana di laut (kasus)</p> <p>b. Jumlah pembangunan infrastruktur perbatasan</p> <p>c. Persentase pencapaian <i>Minimum Essential Force</i> (MEF) (%)</p> <p>d. Persentase kontribusi industri pertahanan (%)</p>			
		23 ^{a)}	19 ^{a)}	45	60	23 ^{a)}	19 ^{a)}	45	60
		30 Pos Pantas ^{b)}	N/A	N/A	10 Pos Pantas	30 Pos Pantas ^{b)}	N/A	N/A	4 Pos Pantas
		14 Posal ^{b)}	14 Posal dan 5 dermaga ^{b)}	14 Posal	14 Posal	14 Posal ^{b)}	14 Posal dan 5 dermaga ^{b)}	14 Posal	16 Posal
		403 Km JIPP ^{b)}	153,2 Km JIPP ^{b)}	150 Km JIPP	274,8 Km JIPP	403 Km JIPP ^{b)}	153,2 Km JIPP ^{b)}	150 Km JIPP	274 Km JIPP
		44,6 ^{c)}	52,3 ^{c)}	60,4	68,9	44,6 ^{c)}	52,3 ^{c)}	60,4	68,9
		46,0 ^{d)}	46,9 ^{d)}	49,8	53,8	46,0 ^{d)}	46,9 ^{d)}	49,8	53,8
		<p>Sumber: a) Bakamla, 2016-2017; b) Kemenhan, 2016-2017; c) RKAKL Kemenhan (diolah), 2016-2017 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; NA: tidak ada kegiatan di tahun tersebut; JIPP: Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan; Pamtas: pengamanan perbatasan; Posal: Pos TNI AL</p>							
		<p>Sumber: a) Bakamla, 2016-2017; b) Kemenhan, 2016-2017; c) RKAKL Kemenhan (diolah), 2016-2017 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; NA: tidak ada kegiatan di tahun tersebut; JIPP: Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan; Pamtas: pengamanan perbatasan; Posal: Pos TNI AL</p>							

M - 58

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
145.	<p>Sasaran dan Indikator KP dari PP Pertahanan Wilayah Nasional (Perubahan data pada Tabel 4.49 Sasaran dan Indikator KP dari PP Pertahanan Wilayah Nasional, Poin 1.a, 1.c, 1.d, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h, 3.i, 3.j, 3.k, 3.l, 3.m, 3.n, 3.o, 3.p, 3.q, 3.u, 3.v, 3.w, 3.x, 3.y, 3.z, 3.aa, dan 3.af, Halaman IV.108)</p>	<p>RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019</p> <p>1.a. Jumlah operasi laut bersama dalam negeri, sebanyak 90 hari operasi</p> <p>1.c. Jumlah operasi bersama terkoordinasi bilateral, sebanyak 4 operasi</p> <p>1.d. Jumlah operasi udara, sebanyak 300 jam terbang</p> <p>2.b. Terbangannya 10 pos pamtas</p> <p>2.c. Terbangannya 14 posal</p> <p>2.d. Jumlah pemeliharaan dan perawatan (harwat) radar, avionik, Penangkis Udara (PSU), dan alat komunikasi dan elektronik (akomlek) lainnya, sebanyak 1 paket</p> <p>3.a. Jumlah pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis, sebanyak 1 paket</p> <p>3.c. Jumlah pengadaan kendaraan taktis (rantis)/ suku cadang kendaraan tempur (sucid rampur), sebanyak 125 unit</p> <p>3.d. Jumlah pengadaan munisi kaliber kecil, sebanyak 1 juta butir</p> <p>3.e. Jumlah pengadaan munisi kaliber besar, sebanyak 20 ribu butir</p> <p>3.f. Jumlah pengadaan senjata infanteri dan senjata kelompok, sebanyak 223 pucuk</p> <p>3.g. Jumlah pemeliharaan dan perawatan kendaraan tempur (harwat rampur), sebanyak 1 paket</p> <p>3.h. Jumlah pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang (harwat sabang), sebanyak 1 paket</p> <p>3.i. Jumlah pemeliharaan dan perawatan alat angkut air (harwat alang air), sebanyak 1 paket</p> <p>3.j. Jumlah pemeliharaan dan perawatan (harwat) senjata ringan dan khusus, sebanyak 1 kegiatan</p> <p>3.k. Jumlah pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (harwat alutsista) arhanud sebanyak 12 pucuk</p> <p>3.l. Jumlah harwat alutsista Armed sebanyak 70 pucuk</p> <p>3.m. Jumlah pengadaan rampur sebanyak 3 unit</p> <p>3.n. Jumlah pengadaan senjata dan munisi sebanyak 600 pucuk</p> <p>3.o. Jumlah pengadaan heli Apache sebanyak 1 paket</p>	<p>PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019</p> <p>1.a. Jumlah operasi laut bersama dalam negeri, sebanyak 210 hari operasi</p> <p>1.c. Jumlah operasi laut bersama terkoordinasi bilateral, sebanyak 4 operasi</p> <p>1.d. Jumlah operasi udara, sebanyak 306 jam terbang</p> <p>2.b. Terbangannya 4 pos pamtas</p> <p>2.c. Terbangannya 16 posal</p> <p>2.d. Jumlah pemeliharaan dan perawatan (harwat) radar, avionik, Penangkis Serangan Udara (PSU), dan alat komunikasi dan elektronik (akomlek) lainnya, sebanyak 199 unit</p> <p>3.a. Jumlah pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis, sebanyak 4 paket</p> <p>3.c. Jumlah pengadaan kendaraan taktis (rantis)/ suku cadang kendaraan tempur (sucid rampur), sebanyak 65 unit</p> <p>3.d. Jumlah pengadaan munisi kaliber kecil, sebanyak 264.148 butir</p> <p>3.e. Jumlah pengadaan munisi kaliber besar, sebanyak 22.987 butir</p> <p>3.f. Jumlah pengadaan senjata infanteri dan senjata kelompok, sebanyak 87 pucuk</p> <p>3.g. Jumlah pemeliharaan dan perawatan kendaraan tempur (harwat rampur), sebanyak 47 unit</p> <p>3.h. Jumlah pemeliharaan dan perawatan pesawat terbang (harwat sabang), sebanyak 15 unit</p> <p>3.i. Jumlah pemeliharaan dan perawatan alat angkut air (harwat alang air), sebanyak 240 unit</p> <p>3.j. Jumlah pemeliharaan dan perawatan (harwat) senjata ringan dan khusus, sebanyak 214 unit</p> <p>3.k. Jumlah pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan (harwat alutsista) arhanud sebanyak 14 pucuk</p> <p>3.l. Jumlah harwat alutsista Armed sebanyak 15 pucuk</p> <p>3.m. Jumlah pengadaan rampur sebanyak 18 unit</p> <p>3.n. Jumlah pengadaan senjata dan munisi sebanyak 31 pucuk</p> <p>3.o. Jumlah pengadaan heli Apache sebanyak 6 paket</p>

M - 59

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																												
		3.p. Jumlah harwat alutsista matra laut sebanyak 45 unit	3.p. Jumlah harwat alutsista matra laut sebanyak 120 unit																																																												
		3.q. Jumlah pemeliharaan dan perawatan pesawat udara (harwat pesud) Matra Laut sebanyak 51 kegiatan	3.q. Jumlah pemeliharaan dan perawatan pesawat udara (harwat pesud) Matra Laut sebanyak 58 unit																																																												
		3.u. Terlaksananya pembangunan kapal sebanyak 18 unit	3.u. Terlaksananya pembangunan kapal sebanyak 29 unit																																																												
		3.v. Jumlah harwat alutsista matra udara, sebanyak 334 pesawat	3.v. Jumlah harwat alutsista matra udara, sebanyak 213 pesawat																																																												
		3.w. Jumlah pengadaan radar, PSU, dan alat komunikasi lainnya, sebanyak 27 unit	3.w. Jumlah pengadaan radar, PSU, dan alat komunikasi lainnya, sebanyak 43 unit																																																												
		3.x. Jumlah pengadaan senri/senrat, sebanyak seribu unit	3.x. Jumlah pengadaan senri/senrat, sebanyak 1129 unit																																																												
		3.y. Jumlah pengembangan propelan, sebanyak 1 paket	3.y. Jumlah pengembangan propelan, sebanyak 3 unit																																																												
		3.z. Jumlah pengadaan alutsista produksi inhan dalam negeri, sebanyak 1 paket	3.z. Jumlah pengadaan alutsista produksi inhan dalam negeri, sebanyak 2 paket																																																												
		3.aa. Jumlah <i>first article</i> yang diproduksi inhan dalam negeri, sebanyak 6 jenis	3.aa. Jumlah <i>first article</i> yang diproduksi inhan dalam negeri, sebanyak 7 jenis																																																												
		3.af. Terbangannya 1 Pangkalan Militer TNI	3.af. Terbangannya 3 Pangkalan Militer TNI																																																												
		Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional																																																													
		Sub Bab 4.5. Prioritas Nasional Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu																																																													
		Sub Bab 4.5.4 Program Prioritas Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi																																																													
146.	Sasaran dan Indikator PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi (Perubahan data pada Tabel 4.50 Sasaran dan Indikator PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi, Poin 1.a dan 1.c, Halaman IV.112)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{b)}</th> <th>2018^{c)}</th> <th>2019^{d)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Indeks pembangunan hukum (skala 0-1)</td> <td>0,57^{a)}</td> <td>0,59-0,64^{a)}</td> <td>0,65-0,70</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5)</td> <td>N/A^{b)}</td> <td>3,00^{b)}</td> <td>3,90</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100)</td> <td>62,60^{d)}</td> <td>N/A^{d)}</td> <td>N/A</td> <td>Kenaikan 20%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}	2018 ^{c)}	2019 ^{d)}	1	Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi					a.	Indeks pembangunan hukum (skala 0-1)	0,57 ^{a)}	0,59-0,64 ^{a)}	0,65-0,70	0,75	b.	Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5)	N/A ^{b)}	3,00 ^{b)}	3,90	4,00	c.	Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100)	62,60 ^{d)}	N/A ^{d)}	N/A	Kenaikan 20%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^{e)}</th> <th>2017^{f)}</th> <th>2018^{g)}</th> <th>2019^{h)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.</td> <td>Indeks pembangunan hukum (skala 0-1)</td> <td>0,57^{a)}</td> <td>0,60^{a)}</td> <td>0,65-0,70</td> <td>0,75</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5)</td> <td>N/A^{b)}</td> <td>3,00^{b)}</td> <td>3,90</td> <td>4,00</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100)</td> <td>74,11^{d)}</td> <td>85,33^{d)}</td> <td>N/A</td> <td>Kenaikan 20%</td> </tr> </tbody> </table>	No	Sasaran/Indikator	2016 ^{e)}	2017 ^{f)}	2018 ^{g)}	2019 ^{h)}	1	Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi					a.	Indeks pembangunan hukum (skala 0-1)	0,57 ^{a)}	0,60 ^{a)}	0,65-0,70	0,75	b.	Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5)	N/A ^{b)}	3,00 ^{b)}	3,90	4,00	c.	Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100)	74,11 ^{d)}	85,33 ^{d)}	N/A	Kenaikan 20%
No	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}	2018 ^{c)}	2019 ^{d)}																																																										
1	Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi																																																														
a.	Indeks pembangunan hukum (skala 0-1)	0,57 ^{a)}	0,59-0,64 ^{a)}	0,65-0,70	0,75																																																										
b.	Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5)	N/A ^{b)}	3,00 ^{b)}	3,90	4,00																																																										
c.	Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100)	62,60 ^{d)}	N/A ^{d)}	N/A	Kenaikan 20%																																																										
No	Sasaran/Indikator	2016 ^{e)}	2017 ^{f)}	2018 ^{g)}	2019 ^{h)}																																																										
1	Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi																																																														
a.	Indeks pembangunan hukum (skala 0-1)	0,57 ^{a)}	0,60 ^{a)}	0,65-0,70	0,75																																																										
b.	Indeks perilaku anti korupsi (skala 0-5)	N/A ^{b)}	3,00 ^{b)}	3,90	4,00																																																										
c.	Indeks penegakan hukum tipikor (skala 1-100)	74,11 ^{d)}	85,33 ^{d)}	N/A	Kenaikan 20%																																																										
		2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi																																																													
		a. Persentase K/L yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)	92,68 ^{d)}	96,29 ^{d)}	69,00	75,00																																																									
		b. Persentase provinsi	38,24 ^{d)}	47,06 ^{d)}	50,00	60,00																																																									

M - 60

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
147.	<p>Sasaran dan Indikator KP dari PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi (Perubahan data pada Tabel 4.51 Sasaran dan Indikator KP dari PP Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi, Poin 1.c, 1.n, 1.q, 1.v, 3.c, 3.d, 3.e, 3.k, 3.l, dan 3.o, Halaman IV.113)</p>	<p>b. Persentase provinsi yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas) 38,24^{d)} 47,06^{d)} 50,00 60,00</p> <p>c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)^{*)} 37,29^{d)} 4,13^{d)} 35,00 45,00</p> <p>Sumber: a) KemPPN/Bappenas, 2017-2018; b) BPS, 2016-2017; c) KPK, 2016-2017; d) KemPANRB 2017</p> <p>Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Data Tahun 2017 menggunakan metode baru (memperhitungkan seluruh populasi Kab/Kota)</p>	<p>yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)</p> <p>c. Persentase kabupaten/kota yang memiliki indeks reformasi birokrasi baik (kategori "B" ke atas)^{*)} 37,29^{d)} 4,13^{d)} 35,00 45,00</p> <p>Sumber: a) KemPPN/Bappenas, 2017-2018; b) BPS, 2016-2017; c) KPK, Kejaksaan, POLRI, 2014-2017; d) KemPANRB 2017</p> <p>Keterangan: *) Realisasi, **) Target, ***) Data Tahun 2017 menggunakan metode baru (memperhitungkan seluruh populasi Kab/Kota)</p>
		<p>1.c. 14 lokasi pelaksanaan pembinaan masyarakat mengenai pelaksanaan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p> <p>1.n. 400 penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu tentang Anti Pencucian Uang.</p> <p>1.q. Tersusunnya 1 laporan rencana aksi nasional HAM 2020-2024</p> <p>1.v. 721 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi</p> <p>3.c. Terbanggunya 1 Simda yang terintegrasi dengan <i>e-procurement</i> dan <i>e-Sakip</i></p> <p>3.d. Tersusunnya 1 dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis aplikasi <i>e-Planning</i></p> <p>3.e. Aplikasi <i>e-Planning</i> yang terintegrasi dengan <i>e-Database</i> dan <i>e-Budgeting</i> dan <i>e-monev</i> dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah</p> <p>3.k. Terbanggunya <i>data center</i> nasional yang mencakup penguatan <i>data center</i> dan pengelolaan jaringan intra pemerintah di 20 instansi pemerintah</p> <p>3.l. Terlaksananya <i>roadmap e-Government</i> tahap IV melalui 8 inisiatif sistem penghubung layanan pemerintah</p> <p>3.o. Terlaksananya perluasan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada 9.961 satuan kerja</p>	<p>1.c. 14 wilayah pelaksanaan pembinaan masyarakat mengenai pelaksanaan UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p> <p>1.n. 600 penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan terpadu tentang Anti Pencucian Uang.</p> <p>1.q. Tersusunnya 1 dokumen rencana aksi nasional HAM 2020-2024</p> <p>1.v. 722 kegiatan bantuan hukum nonlitigasi</p> <p>3.c. Terbanggunya 1 Simda yang terintegrasi dengan <i>e-procurement</i> dan <i>e-Sakip</i> dan 255 LHP pencrapan SIMDA integrasi (Daerah)</p> <p>3.d. Penyelarasan, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan pusat dan daerah melalui aplikasi perencanaan pembangunan daerah di 34 provinsi</p> <p>(dihapus)</p> <p>3.k. Terbanggunya infrastrukturnya dan interoperabilitas e-Government di 22 instansi pemerintah</p> <p>3.l. Terlaksananya layanan e-Government terintegrasi pada 2 sistem elektronik pemerintahan</p> <p>3.o. Terlaksananya perluasan implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada 1.376 satuan kerja</p>

M - 61

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
148.	Sasaran dan Indikator KP dari PP Efektivitas Diplomasi (Perubahan data pada Tabel 4.53 Sasaran dan Indikator KP dari PP Efektivitas Diplomasi, Poin 2.g, 2.h, 2.i, 3.b, dan 3.p, Halaman IV.120)	<p>Bab 4 Prioritas Pembangunan Nasional Sub Bab 4.5. Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu Sub Bab 4.5.5 Program Prioritas Efektivitas Diplomasi</p> <p>2.g. Jumlah pilar terukur dan terpasang sebanyak 110 pilar 2.h. Jumlah kerja sama maritim dalam dan luar negeri sebanyak 4 kegiatan 2.i. Jumlah lembar peta batas negara sebanyak 68 nomor lembar peta 3.b. Diplomasi perikanan regional sebanyak 3 layanan 3.p. Jumlah kajian Mitigasi Dampak Penerapan FTA-CEPA terhadap Daya Saing Industri Nasional sebanyak 3 kajian</p>	<p>2.g. Jumlah pilar terukur dan terpasang sebanyak 444 pilar 2.h. Jumlah kerja sama maritim dalam dan luar negeri sebanyak 7 kegiatan 2.i. Jumlah lembar peta batas negara sebanyak 19 nomor lembar peta 3.b. Diplomasi perikanan regional sebanyak 1 layanan 3.p. Jumlah kajian Mitigasi Dampak Penerapan FTA-CEPA terhadap Daya Saing Industri Nasional sebanyak 1 kajian</p>
	<p>Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang Sub Bab 5.1.3. Pengarusutamaan Gender (PUG)</p>		
149.	Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Gender (Perubahan data pada Tabel 5.1 Sasaran dan Indikator Pengarusutamaan Gender, Poin 1.a dan 1.b, Halaman IV.120)	<p>No. Sasaran/ Indikator</p> <p>1 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan</p> <p>a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) c. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir (%)</p>	<p>No. Sasaran/ Indikator</p> <p>1 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan</p> <p>a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) c. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir (%)</p>
		<p>No. Sasaran/ Indikator</p> <p>1 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan</p> <p>a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) c. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir (%)</p>	<p>No. Sasaran/ Indikator</p> <p>1 Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender (KKG) dalam pembangunan</p> <p>a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) c. Prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan usia 15-64 tahun oleh pasangan dan selain pasangan selama 12 bulan terakhir (%)</p>
		<p>Sumber: BPS, 2017. Keterangan: *) data terbaru belum tersedia.</p>	<p>Sumber: BPS, 2017. Keterangan: *) data terbaru belum tersedia.</p>

M - 62

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
150.	<p>Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.1. Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang Sub Bab 5.1.5.Lintas Bidang Perubahan Iklim melalui Pembangunan Rendah Karbon</p> <p>Target Penurunan Emisi 2019 pada Pembangunan Rendah Karbon (Perubahan data pada Tabel 5.3 Target Penurunan Emisi 2019 pada Pembangunan Rendah Karbon)</p> <p>Bidang Kehutanan (Perubahan data pada poin 2, 4, dan 5, serta penambahan 4 poin, Halaman V.6)</p>	<p>Target Penurunan Emisi 2019 pada Pembangunan Rendah Karbon (Perubahan data pada Tabel 5.3 Target Penurunan Emisi 2019 pada Pembangunan Rendah Karbon)</p> <p>2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pengendalian kerusakan perairan darat (PN4 PP3) Target: 230.000 Ha</p> <p>4. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (PN4 PP4)</p> <p>5. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (PN4 PP4)</p>	<p>2. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan, perencanaan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pengendalian kerusakan perairan darat (PN4 PP3) Target: 1. Rehabilitas 1000 Ha Hutan Mangrove. 2. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis secara vegetatif seluas 206.000 Ha. 3. Rehabilitas hutan dan lahan kritis secara sipil teknis seluas 3000 unit. 4. Pemulihan lahan gambut yang terdegradasi (PN4 PP4) 5. Pembinaan Pengelolaan Hutan Produksi dan Industri Hasil Hutan (KPHP yang dapat dihindangi dari gangguan keamanan secara kolaboratif bersama masyarakat (PN1 PP1) 6. Pemulihan kawasan konservasi yang terdegradasi untuk perlindungan sumber air (PN4 PP3) 7. Pencegahan kebakaran hutan dan lahan - operasi pengamanan hutan, patroli terpadu, peningkatan kinerja manggala agni (PN4 PP4) 8. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan- pelaksanaan pemadaman darat (PN4 PP4) 9. Pemulihan lahan terlanjar bekas pertambangan rakyat</p>
	<p>Bidang Manajemen Pesisir Laut (Perubahan narasi pada poin 1, 2, dan 3, Halaman V.7)</p> <p>Bidang Pertanian (Perubahan data pada poin 1, 2, 3, 4, dan 5, serta penambahan 1 poin, Halaman V.7)</p>	<p>1. Target: 7 lokasi 2. Target: 3 lokasi 3. Target: 4 kawasan</p> <p>1. Target: 22 Ha 2. Perindungan perkebunan (PN4 PP2) Target: 26 KT 3. Target: Hijauan Pakan Ternak 2.648 Ha</p>	<p>1. Target: 7 (tujuh) lokasi 2. Target: 3 (tiga) lokasi 3. Target: 4 (empat) kawasan</p> <p>1. Target: Penanganan dampak perubahan iklim 20 Ha 2. Perindungan perkebunan (PN3 PP1) Target: Pengembangan 155 Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan</p>

M - 63

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
<p>Bidang Energi (Perubahan data pada poin 1, 2, dan 3, serta penambahan 5 poin, Halaman V.7)</p>	<p>4. Target: Jaringan Irigasi Tersier 100.000 Ha, Irigasi, Perpompaan dan Perpipaan 1.071 unit, Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 500 unit, Pembangunan Embung Pertanian 400 unit</p> <p>5. Target: 2 Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim</p>	<p>4. Target: Jaringan Irigasi Tersier 134.075 Ha, Irigasi, Perpompaan 933 unit, Irigasi Perpipaan 138 unit, Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 500 unit, Pembangunan Embung Pertanian 400 unit</p> <p>5. Target: 1 (satu) Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim</p> <p>6. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak (PN4 PP2)</p> <p>Target:</p> <p>1. Pembangunan irigasi permukaan kewenangan Pemerintah Pusat : 40.6 ribu Ha</p> <p>2. Rehabilitasi irigasi permukaan eksisting kewenangan Pemerintah Pusat: 123.2 ribu Ha</p> <p>1. Target: PLT Panas Bumi 2.183,5 MW; PLT Air dan PLT Mikro Hidro 6.218,2 MW; PLT Surya 6,5 MW; PLT Bioenergi 2.030 MW</p> <p>2. Konservasi energi (PN4 PP1)</p> <p>Target: Intensitas Energi Primer: 424 SBM Miliar; Penurunan Emisi CO2: 37,6 Juta Ton; Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) Label Peralatan Rumah Tangga: 3 SKEM; Perusahaan yang melakukan Manajemen Energi: 30 Perusahaan</p> <p>3. Substitusi energi (PN4 PP1)</p> <p>Target: Biofuel 10,9 Juta KL</p>	<p>Kebakaran Lahan dan Kebun 18 Kelompok Tani (KT)</p> <p>3. Target: Hijaun Pakan Ternak 2.348 Ha</p> <p>4. Target: Jaringan Irigasi Tersier 134.075 Ha, Irigasi, Perpompaan 933 unit, Irigasi Perpipaan 138 unit, Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim 500 unit, Pembangunan Embung Pertanian 400 unit</p> <p>5. Target: 1 (satu) Teknologi Mitigasi Perubahan Iklim</p> <p>6. Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan, Rawa dan Tambak (PN4 PP2)</p> <p>Target:</p> <p>1. Pembangunan irigasi permukaan kewenangan Pemerintah Pusat : 40.6 ribu Ha</p> <p>2. Rehabilitasi irigasi permukaan eksisting kewenangan Pemerintah Pusat: 123.2 ribu Ha</p> <p>1. Target: PLT Panas Bumi 2.183,5 MW; PLTM/MH 489 MW; PLT Surya 22 MW; PLT Bioenergi 1.935 MW</p> <p>2. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga</p> <p>Target: 78.216 SR</p> <p>3. Konservasi energi (PN4 PP1)</p> <p>Target: Intensitas Energi Primer: 424 SBM Miliar; Penurunan Emisi CO2: 44 Juta Ton; Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) Label Peralatan Rumah Tangga: 3 SKEM;</p> <p>4. Substitusi energi (PN4 PP1)</p> <p>Target: Biofuel 4,51 Juta KL</p> <p>5. Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan</p> <p>Target: 13.305 unit</p> <p>6. Pemasangan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) di Wilayah Pedesaan Gelap Gullita</p> <p>Target: 98.481 unit</p> <p>7. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat di Kawasan 4T</p> <p>Target: 10 unit</p> <p>8. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan PV</p> <p>Target: 20.000 titik</p>

M - 64

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
	<p>Bidang Transportasi (Perubahan data pada poin 1, 2, 3, dan 4, serta penambahan 3 poin, Halaman V.7)</p>	<p>RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target: Pengembangan 24 unit pelabuhan tol laut; Pengembangan 7 rute pengembangan pelabuhan rute subsidi angkutan tol laut; Penyediaan 21 rute subsidi angkutan tol laut; Penyediaan 113 rute subsidi perintis angkutan laut 2. Target: Pembangunan jalan baru sepanjang 685 km; Panjang jalan tol yang dibangun dan dioperasikan 650 km; Pembangunan jalur KA sepanjang 389 km sp; Penyediaan subsidi angkutan KA di 7 lintas; Pembangunan 15 dermaga penyeberangan, sungai, dan danau; Penyediaan 275 rute angkutan penyeberangan perintis; Penyediaan 300 trayek angkutan jalan; Pembangunan 12 terminal type A; Penyediaan layanan sistem <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) dan Sistem Transit yang tersedia di 25 kota. 3. Target: Pembangunan 5 bandara baru; Pengembangan 11 bandara yang mendukung jembatan udara; Penyediaan 240 rute subsidi perintis angkutan udara 4. Target: Pembangunan 1 paket <i>Vessel Traffic Service</i> (VTS) sistem dan sarana bantu navigasi pelayaran; Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan di 33 provinsi; Penyediaan 2 unit <i>helicopter SAR</i> dan 2 unit <i>Rescue Boat</i>. 	<p>PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Target: Pengembangan 24 unit pelabuhan tol laut; Pengembangan dan pembangunan 27 pelabuhan; Penyediaan 21 rute subsidi tol laut; Penyediaan 113 rute subsidi perintis angkutan laut 2. Target: Pembangunan jalan baru sepanjang 553 km; Panjang jalan tol yang dibangun dan dioperasikan 566 km; Pembangunan jalur KA sepanjang 389 km sp; Penyediaan subsidi angkutan KA di 7 lintas; Pembangunan 14 dermaga penyeberangan, sungai, dan danau; Penyediaan 230 rute angkutan penyeberangan perintis; Penyediaan 300 trayek angkutan jalan; Pembangunan 6 terminal type A; Penyediaan layanan sistem <i>Bus Rapid Transit</i> (BRT) dan Sistem Transit yang tersedia di 25 kota. 3. Target: Pembangunan 4 bandara baru; Pengembangan 6 bandara yang mendukung jembatan udara; Penyediaan 232 rute subsidi perintis angkutan udara 4. Target: Pembangunan 1 (satu) paket <i>Vessel Traffic Service</i> (VTS) sistem dan sarana bantu navigasi pelayaran; Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan di 33 provinsi; Penyediaan 2 (dua) unit <i>helicopter SAR</i> dan 2 (dua) unit <i>Rescue Boat</i>. 5. Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru dan subsidi angkutan motor melalui kereta api Target: Penyelenggaraan angkutan lebaran, natal dan tahun baru 1 paket 6. Pembangunan/ Pengadaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Target: Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan 86 lokasi 7. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional Target: Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan; Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan; Pembangunan Jalan Bebas Hambatan; Dukungan Jalan Daerah; Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional; Preservasi Pemeliharaan Rutin Jalan 43.335 Km; Preservasi Rekonstruksi, Rehabilitasi Jalan 3.230 Km, Pembangunan Jalan Bebas Hambatan 566 Km Dukungan Jalan Daerah 21,7 Km, Layanan perencanaan, pengendalian dan pengawasan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan Nasional 12 Layanan

M - 65

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																
	Bidang Industri (Perubahan data pada poin 1, serta penambahan 5 poin, Halaman V.8)	1. Dukungan akses bahan baku, infrastruktur industri, logistik, dan penerapan industri hijau (PN3 PP2) Target: Kebijakan penurunan emisi GRK dan sektor industri sebanyak 3 kebijakan Infrastruktur industri hijau sebanyak 5 standar/panduan	1. Penelitian dan Pengembangan Industri Hijau dan Lingkungan Hidup (PN3 PP2) Target: 4 (empat) kebijakan dan standarisasi industri hijau 2. Kebijakan Penurunan Emisi GRK sektor industri (PN3 PP2) Target: 3 (tiga) Kebijakan 3. Kebijakan Pengembangan Standar dan Kelembagaan Industri Hijau (PN3 PP2) Target: 5 (lima) Kebijakan 4. Evaluasi dan Sosialisasi penerapan industri hijau Target: 50 Perusahaan Industri 5. Kebijakan Pengembangan industri hijau (PN3 PP2) Target: 8 Kebijakan 6. Dukungan akses bahan baku, infrastruktur industri, logistik, dan penerapan industri hijau (PN3 PP2) Target: Kebijakan penurunan emisi GRK dan sektor industri sebanyak 3 kebijakan Infrastruktur industri hijau sebanyak 5 standar/panduan																																																
	Bidang Pengelolaan Limbah (Perubahan data pada poin 1 dan 2, serta penambahan 2 poin, Halaman V.8)	1. Target: Cakupan layanan persampahan meningkat sebesar 549.996 KK 2. Target: Cakupan layanan air limbah meningkat sebesar 389.170 KK	1. Target: Cakupan layanan persampahan meningkat sebesar 251.000 KK 2. Target: Cakupan layanan air limbah meningkat sebesar 165.680 KK 3. Pengurangan timbulan sampah melalui pembangunan Pusat Daur Ulang (PDU) di Destinasi Wisata Target: 1 (satu) lokasi 4. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah spesifik (PN4 PP4) Target: 3 (tiga) kab/kota																																																
Bab 5 Pembangunan Bidang																																																			
Sub Bab 5.2. Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama																																																			
151.	Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesehatan (Perubahan data pada Tabel 5.5 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kesehatan, Poin 2.a, 2.b, dan 3.a, Halaman V.10)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{b)}</th> <th>2018^{c)}</th> <th>2019^{c)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat ^{a)}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Prevalensi <i>Wasting</i> (kurus) anak balita (%)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>9,5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Menguatnya pencegahan dan pengendalian penyakit ^{a)}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}	2018 ^{c)}	2019 ^{c)}	1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat ^{a)}						a. Prevalensi <i>Wasting</i> (kurus) anak balita (%)	N/A	N/A	N/A	9,5	2	Menguatnya pencegahan dan pengendalian penyakit ^{a)}					<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{b)}</th> <th>2018^{c)}</th> <th>2019^{c)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat ^{a)}</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Prevalensi anemia pada ibu hamil(%)</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Persentase bayi dengan berat</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>N/A</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}	2018 ^{c)}	2019 ^{c)}	1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat ^{a)}						a. Prevalensi anemia pada ibu hamil(%)	N/A	N/A	N/A	28		b. Persentase bayi dengan berat	N/A	N/A	N/A	8
No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}	2018 ^{c)}	2019 ^{c)}																																														
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat ^{a)}																																																		
	a. Prevalensi <i>Wasting</i> (kurus) anak balita (%)	N/A	N/A	N/A	9,5																																														
2	Menguatnya pencegahan dan pengendalian penyakit ^{a)}																																																		
No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}	2018 ^{c)}	2019 ^{c)}																																														
1	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat ^{a)}																																																		
	a. Prevalensi anemia pada ibu hamil(%)	N/A	N/A	N/A	28																																														
	b. Persentase bayi dengan berat	N/A	N/A	N/A	8																																														

M - 66

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																							
152.	Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Perubahan data pada Tabel 5.8 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga, Poin 3, Halaman V.14)	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 1415 516 1716">a. Persentase kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dapat diturunkan (%)</td> <td data-bbox="363 1315 516 1415">10</td> <td data-bbox="363 1241 516 1315">20</td> <td data-bbox="363 1166 516 1241">30</td> <td data-bbox="363 1066 516 1166">40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="516 1415 652 1716">b. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)</td> <td data-bbox="516 1315 652 1415">25</td> <td data-bbox="516 1241 652 1315">30</td> <td data-bbox="516 1166 652 1241">35</td> <td data-bbox="516 1066 652 1166">40</td> </tr> <tr> <td data-bbox="652 1415 717 1716">3 Meningkatkan perlindungan finansial, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan ^{a)}</td> <td colspan="4" data-bbox="652 1066 717 1716"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="717 1415 831 1716">a. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)</td> <td data-bbox="717 1315 831 1415">21.510</td> <td data-bbox="717 1241 831 1315">33.060</td> <td data-bbox="717 1166 831 1241">44.850</td> <td data-bbox="717 1066 831 1166">56.910</td> </tr> </table> <p>Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018 Keterangan: ^{a)} Target; ^{b)} Indikator-indikator utama sasaran pembangunan kesehatan telah dimasukkan sebagai indikator Program Prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat (Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional); N/A: Data prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita tidak tersedia tahun dan data diperoleh dari survei besar khusus (Risksdas);</p>	a. Persentase kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dapat diturunkan (%)	10	20	30	40	b. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	25	30	35	40	3 Meningkatkan perlindungan finansial, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan ^{a)}					a. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	21.510	33.060	44.850	56.910	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 767 435 1034">badan rendah (BBLR)(%)</td> <td data-bbox="363 667 435 767">lahir</td> <td data-bbox="363 568 435 667"></td> <td data-bbox="363 468 435 568"></td> <td data-bbox="363 368 435 468"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="435 767 506 1034">c. Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita (%)</td> <td data-bbox="435 667 506 767"></td> <td data-bbox="435 568 506 667">N/A</td> <td data-bbox="435 468 506 568">N/A</td> <td data-bbox="435 368 506 468">9,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="506 767 539 1034">2</td> <td colspan="4" data-bbox="506 568 539 1034">Menguatnya pencegahan dan pengendalian penyakit ^{a)}</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 767 685 1034">a. Persentase kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dapat diturunkan (%)</td> <td data-bbox="539 667 685 767"></td> <td data-bbox="539 568 685 667">50,26^{b)}</td> <td data-bbox="539 468 685 568">31^{b)}</td> <td data-bbox="539 368 685 468">30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="685 767 750 1034">3</td> <td colspan="4" data-bbox="685 568 750 1034">Meningkatnya perlindungan finansial, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan ^{a)}</td> </tr> <tr> <td data-bbox="750 767 896 1034">a. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)</td> <td data-bbox="750 667 896 767"></td> <td data-bbox="750 568 896 667">33,46^{b)}</td> <td data-bbox="750 468 896 568">53,89^{b)}</td> <td data-bbox="750 368 896 468">35</td> </tr> <tr> <td data-bbox="896 767 961 1034"></td> <td data-bbox="896 667 961 767"></td> <td data-bbox="896 568 961 667"></td> <td data-bbox="896 468 961 568"></td> <td data-bbox="896 368 961 468">70</td> </tr> </table> <p>Sumber: KemenPPN/Bappenas (diolah), 2018 Keterangan: ^{a)} Realisasi; ^{b)} Target RKP; ^{c)} Indikator-indikator utama sasaran pembangunan kesehatan telah dimasukkan sebagai indikator Program Prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat (Bab 4. Prioritas Pembangunan Nasional); N/A: Data prevalensi anemia pada ibu hamil, persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), dan prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita tidak tersedia tahun dan data diperoleh dari survei besar khusus (Risksdas); ^{b)} Laporan Kementerian Kesehatan, 2018.</p>	badan rendah (BBLR)(%)	lahir				c. Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita (%)		N/A	N/A	9,5	2	Menguatnya pencegahan dan pengendalian penyakit ^{a)}				a. Persentase kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dapat diturunkan (%)		50,26 ^{b)}	31 ^{b)}	30	3	Meningkatnya perlindungan finansial, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan ^{a)}				a. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)		33,46 ^{b)}	53,89 ^{b)}	35					70
a. Persentase kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dapat diturunkan (%)	10	20	30	40																																																						
b. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	25	30	35	40																																																						
3 Meningkatkan perlindungan finansial, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan ^{a)}																																																										
a. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	21.510	33.060	44.850	56.910																																																						
badan rendah (BBLR)(%)	lahir																																																									
c. Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita (%)		N/A	N/A	9,5																																																						
2	Menguatnya pencegahan dan pengendalian penyakit ^{a)}																																																									
a. Persentase kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dapat diturunkan (%)		50,26 ^{b)}	31 ^{b)}	30																																																						
3	Meningkatnya perlindungan finansial, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, ketersediaan, penyebaran, dan mutu obat serta sumber daya kesehatan ^{a)}																																																									
a. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan (%)		33,46 ^{b)}	53,89 ^{b)}	35																																																						
				70																																																						
	Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga (Perubahan data pada Tabel 5.8 Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga, Poin 3, Halaman V.14)	Peringkat pada SEA Games (peringkat) Target 2019: 1 (Juara Umum)	Peringkat pada SEA Games (peringkat) Target 2019: 4																																																							
	Sasaran dan Indikator Pembangunan Pemuda dan Olahraga, Poin 3, Halaman V.14)	Penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi (emas/perak/perunggu) 2019: 75/120/24 (SEA Games)	Penghargaan kepada olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi (emas/perak/perunggu) 2019: 60/63/90 (SEA Games)																																																							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
153.	<p>Bab 5 Pembangunan Bidang</p> <p>Sub Bab 5.2. Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama</p> <p>Sub-bab 5.2.9. Perlindungan Anak</p> <p>Arah Kebijakan</p> <p>(Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman V.20)</p>	<p>Arah kebijakan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak melalui pelayanan kesehatan ramah anak, pelaksanaan sekolah ramah anak, pengembangan ruang bermain ramah anak, penyediaan informasi layak anak, serta peningkatan partisipasi anak sebagai pelopor dan pelapor dalam rangka mewujudkan KLA; 2. Peningkatan pencegahan kekerasan terhadap anak termasuk anak di dalam situasi darurat dan pornografi, serta perkawinan anak melalui pelatihan pengasuhan anak, penerapan disiplin positif anak, serta pengembangan internet aman untuk anak; 3. Advokasi/bimbingan teknis terpadu pengakuan identitas hukum anak melalui kepemilikan akta kelahiran dan pencegahan perkawinan anak melalui pembatasan pemberian izin nikah oleh lembaga terkait, termasuk hakim peradilan agama; 4. Peningkatan kapasitas: (a) Perencana lintas K/L/Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pengarusutamaan Hak Anak melalui Sistem Perlindungan Anak, (b) Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pencatatan kasus, pengolahan data KtP/A berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)/data kependudukan korban, (c) SDM di unit layanan dasar lainnya terkait perlindungan korban; 5. Advokasi dan sosialisasi melalui media publik untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; 6. Pendampingan pelaksanaan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa; 7. Peningkatan peran lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan dalam perlindungan anak; serta 8. Pelaksanaan koordinasi secara berkala untuk penguatan jejaring lintas K/L/OPD/masyarakat dalam penguatan dan harmonisasi landasan hukum, serta sistem data dan sistem layanan terpadu untuk 	<p>Arah kebijakan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal, perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya, serta efektivitas kelembagaan perlindungan anak, dengan strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pemenuhan hak anak dengan menciptakan lingkungan yang ramah anak pada layanan kesehatan, pendidikan, ruang bermain, serta memberikan kesempatan anak dalam menyampaikan pandangannya; 2. Penguatan pencegahan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak, melalui: (a) kampanye massif perlindungan anak, (b) penguatan fungsi keluarga dan pengasuhan anak, (c) penerapan disiplin positif, (d) pengembangan internet aman dan informasi layak anak, (e) peningkatan kapasitas anak untuk melindungi dirinya sendiri, serta (f) pelaksanaan gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di tingkat desa; 3. Peningkatan kapasitas: (a) Perencana lintas K/L/OPD dalam Pengarusutamaan Hak Anak melalui implementasi sistem perlindungan anak, (b) Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam pencatatan kasus, pengolahan data KtP/A berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)/data kependudukan dan pendampingan korban, serta (c) SDM di unit layanan dasar lainnya terkait perlindungan anak; 4. Peningkatan peran lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak; 5. Pengakuan hukum bagi pelaku kekerasan terhadap anak, serta pembatasan pemberian izin nikah oleh lembaga terkait untuk mencegah perkawinan anak; serta 6. Pelaksanaan koordinasi secara berkala melalui penguatan jejaring lintas K/L/OPD/masyarakat dalam pengawasan, pengembangan sistem data, dan sistem layanan terpadu perlindungan anak.

M - 68

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019									
		perlindungan anak.										
			No.	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}	2018 ^{c)}	2019 ^{d)}	2016 ^{e)}	2017 ^{f)}	2018 ^{g)}	2019 ^{h)}
154.	<p>Bab 5 Pembangunan Bidang Keuangan Negara Sub Bab 5.3. Pembangunan Ekonomi Sub-bab 5.3.1 Keuangan Negara</p> <p>Sasaran dan Indikator Keuangan Negara (Perubahan data pada Tabel 5.13 Sasaran dan Indikator Keuangan Negara, Poin 1, 2.a, 2.b, 3, 4.a, dan 4.b, Halaman V.21)</p>		1	Meningkatnya tren rasio penerimaan perpajakan	10,40 ^{a)}	9,90 ^{a)}	10,50	10,80-11,30	10,40 ^{a)}	9,90 ^{a)}	10,50	11,08
			2	Meningkatnya kualitas belanja negara								
				a. Belanja modal (% PDB)	1,40 ^{a)}	1,50 ^{a)}	1,30	1,50-1,70	1,40 ^{a)}	1,50 ^{a)}	1,30	1,20
				b. Subsidi energi (% PDB)	0,90 ^{a)}	0,70 ^{a)}	1,10	0,60-0,70	0,90 ^{a)}	0,70 ^{a)}	1,10	1,00
			3	Membaiiknya keseimbangan primer								
				Keseimbangan primer (% PDB)	(1,00) ^{a)}	(0,90) ^{a)}	(0,40)	((0,30)-0,04)	(1,00) ^{a)}	(0,90) ^{a)}	(0,40)	(0,12)
			4	Terkendalinya defisit anggaran dan rasio utang pemerintah								
				a. Surplus/defisit anggaran (% PDB)	(2,49) ^{a)}	(2,51) ^{a)}	(2,12)	((1,90)-(1,60))	(2,49) ^{a)}	(2,51) ^{a)}	(2,12)	(1,84)
				b. Stok utang pemerintah pusat (% PDB)	28,33 ^{a)}	29,38 ^{a)}	29,08	28,80-29,20	28,33 ^{a)}	29,38 ^{a)}	29,08	30,00
					Sumber: a) Kemenkeu, 2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Perkiraan realisasi dan Target; ***) Target							
155.	<p>Arah Kebijakan (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman V.21)</p>				Untuk mencapai sasaran keuangan negara pada tahun 2019 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong investasi dan daya saing dalam rangka mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas yang diwujudkan melalui peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Adapun fokus kebijakan fiskal 2019 mencakup dua kebijakan utama yaitu: (1) mendorong penyehatan fiskal yang ditempuh dengan mendorong APBN lebih produktif, efisien, berdaya tahan dan berkelanjutan, serta (2) mendorong iklim investasi dan ekspor yang ditempuh dengan melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk menyederhanakan dan menciptakan kemudahan investasi (<i>to help</i>) dan ekspor, mendorong peningkatan kualitas dan menciptakan iklim investasi dan ekspor.							

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
156.	Arah Kebijakan (Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman V.22)	<p>pelayanan publik (<i>to serve</i>), serta memberikan insentif fiskal untuk penguatan daya saing (<i>to support</i>).</p> <p>1. Optimalisasi penerimaan perpajakan melalui: (a) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan; (b) implementasi kebijakan integrasi data keuangan berbasis <i>Single Identity Number</i>; (c) inklusi kesadaran pajak; (d) implementasi monitoring dan evaluasi <i>Compliance Risk Management</i>; (e) pengembangan laboratorium forensik digital; (f) sinergi proses bisnis administrasi pelayanan dan pengawasan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan (g) <i>whistleblowing system</i> perpajakan.</p>	<p>mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta memberikan insentif fiskal untuk penguatan daya saing.</p> <p>1. Optimalisasi penerimaan perpajakan melalui: (a) penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan; (b) implementasi kebijakan integrasi data keuangan berbasis <i>Single Identity Number</i>; (c) inklusi kesadaran pajak; (d) implementasi monitoring dan evaluasi <i>Compliance Risk Management</i>; (e) pengembangan laboratorium forensik digital; (f) sinergi proses bisnis administrasi pelayanan dan pengawasan antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan (g) <i>whistleblowing system</i> perpajakan.</p>
157.	<p>Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.3. Pembangunan Ekonomi Sub-bab 5.3.2. Stabilitas Harga</p> <p>Stabilitas Harga (Perubahan narasi pada Paragraf 2 dan 3, Halaman V.22)</p>	<p>Stabilitas harga merupakan prasyarat mewujudkan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas. Pemerintah beserta semua pemangku kepentingan perlu mengupayakan langkah-langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).</p> <p>Pada tahun 2019, sasaran stabilitas harga yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,50 - 4,50 persen, dengan <i>point estimate</i> sebesar 3,50 persen sesuai target inflasi tahun 2019 yang dituangkan di dalam RPJMN 2015-2019. Risiko inflasi tahun 2019 diperkirakan berasal dari potensi kenaikan harga komoditas dunia, normalisasi kebijakan moneter global, konektivitas antarwilayah yang belum memadai, serta masih adanya kesenjangan pasokan pangan antarwaktu dan antarwilayah.</p>	<p>Stabilitas harga yang diukur dengan tingkat inflasi merupakan prasyarat mewujudkan pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan yang berkualitas. Pemerintah beserta semua pemangku kepentingan perlu mengupayakan langkah-langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN).</p> <p>Pada tahun 2019, stabilitas harga masih dihadapkan dengan berbagai risiko global dan dalam negeri. Dari sisi global, risiko inflasi tahun 2019 diperkirakan berasal dari potensi kenaikan harga komoditas dunia, normalisasi kebijakan moneter Amerika Serikat, dan penguatan mata uang dolar. Dari sisi domestik, tantangan yang dihadapi antara lain ketersediaan pasokan pangan yang tidak tahan lama/<i>perishable</i>, kelancaran distribusi (tersedianya konektivitas antarwilayah), keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif dalam pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kondisi ekonomi domestik yang diperkirakan meningkat perlu diimbangi dengan penguatan potential output agar inflasi tetap terkendali.</p>
158.	Sasaran Stabilitas Harga (Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman V.23)	Sasaran dan indikator stabilitas harga terdapat pada Tabel 5.14.	<p>Pada tahun 2019, sasaran stabilitas harga yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 2,50 - 4,50 persen, dengan <i>point estimate</i> sebesar 3,50 persen. Target inflasi tahun 2019 tersebut sesuai dengan target RPJMN 2015-2019. (Tabel 5.14)</p>
159.	Arah Kebijakan (Perubahan narasi pada Paragraf 3 Halaman V.23 serta Paragraf 1, Halaman V.24)	<p>Untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2019, kebijakan pengendalian harga diarahkan pada seluruh komponen, yaitu: komponen inti (<i>core</i>), harga bergejolak (<i>volatile food</i>), dan harga diatur pemerintah (<i>administered price</i>). Arah dan strategi kebijakan stabilitas harga difokuskan pada:</p> <p>1. meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian baik <i>on-farm</i> maupun <i>off-farm</i> (termasuk pengelolaan pascapanen);</p>	<p>Untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2019, kebijakan pengendalian harga diarahkan pada seluruh komponen, yaitu: komponen inti (<i>core</i>), harga bergejolak (<i>volatile food</i>), dan harga diatur pemerintah (<i>administered price</i>). Arah dan strategi kebijakan stabilitas harga difokuskan pada:</p> <p>1. meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian baik <i>on-farm</i> maupun <i>off-farm</i> (termasuk pengelolaan pascapanen);</p>

M - 70

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		<p>penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. melakukan pengelolaan pascapanen yang tepat; 3. intervensi harga di pasar yang efektif dan tepat sasaran; 4. mitigasi <i>second round effect</i> kebijakan <i>Administered Price</i>; 5. meningkatkan kualitas data dan metode perhitungan inflasi; 6. mempercepat pembangunan infrastruktur pangan dan konektivitas; 7. melakukan pembenahan tata niaga pangan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital; 8. memastikan ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu penyaluran bantuan sosial dan subsidi; dan 9. meningkatkan koordinasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. <p>Pada tahun 2019, kebijakan stabilitas harga dilaksanakan melalui beberapa program dalam PN, yaitu: PN II – Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; PN III – Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, serta Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; dan PN IV – Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air. Masing-masing PN tersebut dijabarkan ke dalam PP, kegiatan prioritas yang mendukung tercapainya stabilitas harga. Selain PN, kebijakan stabilitas harga melekat kepada program/kegiatan dalam pembangunan bidang K/L terkait.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. melakukan pembenahan tata niaga pangan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital; 3. mempercepat pembangunan infrastruktur pangan dan konektivitas; menjaga ketersediaan pangan antarwaktu dan antarwilayah, melalui kerja sama antardaerah dan optimalisasi pemanfaatan dana Cadangan Stabilitas Harga Pangan (CHSP) dan APBD untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP); 5. mitigasi <i>second round effect</i> kebijakan <i>Administered Price</i>; 6. intervensi harga di pasar yang efektif dan tepat sasaran; 7. memastikan ketepatan sasaran, jumlah, dan waktu penyaluran subsidi program (seperti ongkos angkut, tol laut, dan pupuk); 8. meningkatkan kualitas data (produksi, harga, dan neraca arus barang) komoditas dan metodologi perhitungan inflasi; dan 9. meningkatkan sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. <p>Pada tahun 2019, kebijakan stabilitas harga dilaksanakan melalui beberapa program dalam PN, yaitu: PN II – Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; PN III – Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; dan PN IV – Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air. Masing-masing PN tersebut dijabarkan ke dalam PP dan KP yang mendukung tercapainya stabilitas harga. Selain itu, kebijakan stabilitas harga melekat pada program/kegiatan dalam pembangunan bidang K/L terkait.</p>
160.	<p>Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.3. Pembangunan Ekonomi Sub-bab 5.3.4. Perdagangan Dalam Negeri</p> <p>Sasaran dan Indikator Perdagangan Dalam Negeri (Perubahan data pada Tabel 5.16 Sasaran dan Indikator Perdagangan Dalam Negeri, Poin 1a, 1b, 1c, dan 1f, Halaman V.26)</p>	<p>1a. Bantuan sarana usaha perdagangan (unit) Target tahun 2019: 7200</p> <p>1b. Pemegang Penghargaan Ekspor (penghargaan)</p> <p>1c. Portal <i>showcase</i> produk ekspor Indonesia (portal)</p> <p>1f. Indikator Verifikasi Ekspor Produk Industri Kehutanan/ VEPIK (LS/Dokumen) Target tahun 2019: 2000</p>	<p>1a. Indikator Bantuan sarana usaha perdagangan (unit) Target tahun 2019: 8800</p> <p>1b. Indikator Pemegang Penghargaan Primaniyarta dan Primaduta (penghargaan)</p> <p>1c. Indikator Pembangunan <i>marketing point</i> (unit)</p> <p>1f. Indikator Verifikasi Ekspor Produk Industri Kehutanan/ VEPIK (LS/Dokumen) Target tahun 2019: 1300</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																				
161.	Arah Kebijakan (Perubahan matriks pada Paragraf 1, halaman V.27)	<p>Upaya tersebut dilakukan melalui strategi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan bantuan sarana usaha perdagangan, khususnya bagi pelaku usaha dagang kecil dan menengah, termasuk di wilayah perbatasan; memberikan penghargaan bagi pelaku usaha ekspor yang berprestasi dan sukses ekspor; melakukan verifikasi produk ekspor bernilai tambah dan sertifikasi produk; serta menyusun statistik perdagangan jasa untuk meningkatkan upaya perluasan ekspor jasa Indonesia. 	<p>Upaya tersebut dilakukan melalui strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan bantuan sarana usaha perdagangan, khususnya bagi pelaku usaha dagang kecil dan menengah, termasuk di wilayah perbatasan; memberikan penghargaan bagi pelaku usaha ekspor yang berprestasi dan marketing point produk ekspor; melakukan verifikasi produk ekspor bernilai tambah dan sertifikasi produk; serta menyusun statistik perdagangan jasa untuk meningkatkan upaya perluasan ekspor jasa Indonesia. 																																				
162.	<p>Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.3. Pembangunan Ekonomi Sub-bab 5.3.6. Sektor Jasa Keuangan</p> <p>Sasaran dan Indikator Jasa Keuangan (Perubahan data pada Tabel 5.18 Sasaran dan Indikator Jasa Keuangan Halaman V.29)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^(*)</th> <th>2017^(*)</th> <th>2018^(**)</th> <th>2019^(**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)</td> <td>8,90^(a)</td> <td>6,70^(a)</td> <td>7,50-8,10</td> <td>8,10-8,70</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) BPS, 2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Target</p>	No.	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)	1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi						Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	8,90 ^(a)	6,70 ^(a)	7,50-8,10	8,10-8,70	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^(*)</th> <th>2017^(*)</th> <th>2018^(**)</th> <th>2019^(**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)</td> <td>8,90^(a)</td> <td>6,70^(a)</td> <td>3,9</td> <td>7,9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) BPS, 2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Outlook perhitungan Bappenas November 2018; **) Target</p>	No.	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)	1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi						Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	8,90 ^(a)	6,70 ^(a)	3,9	7,9
No.	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)																																		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi																																						
	Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	8,90 ^(a)	6,70 ^(a)	7,50-8,10	8,10-8,70																																		
No.	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)																																		
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi																																						
	Pertumbuhan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	8,90 ^(a)	6,70 ^(a)	3,9	7,9																																		
163.	<p>Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.3. Pembangunan Ekonomi Sub-bab 5.3.7 Badan Usaha Milik Negara</p> <p>Sasaran dan Indikator Badan Usaha Milik Negara (Perubahan data pada Tabel 5.19 Sasaran dan Indikator Badan Usaha Milik Negara halaman V.30)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^(*)</th> <th>2017^(*)</th> <th>2018^(**)</th> <th>2019^(**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penyaluran belanja modal (capex) BUMN (triliun)</td> <td>297,80^(a)</td> <td>303,00^(a)</td> <td>400,80-665,10</td> <td>448,70-727,80</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: KemenBUMN, 2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Target.</p>	No.	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)	1	Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing						Penyaluran belanja modal (capex) BUMN (triliun)	297,80 ^(a)	303,00 ^(a)	400,80-665,10	448,70-727,80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^(*)</th> <th>2017^(*)</th> <th>2018^(**)</th> <th>2019^(**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penyaluran belanja modal (capex) BUMN (triliun)</td> <td>297,80^(a)</td> <td>303,00^(a)</td> <td>400,80</td> <td>449,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sumber: a) KemenBUMN, 2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Target.</p>	No.	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)	1	Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing						Penyaluran belanja modal (capex) BUMN (triliun)	297,80 ^(a)	303,00 ^(a)	400,80	449,5
No.	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)																																		
1	Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing																																						
	Penyaluran belanja modal (capex) BUMN (triliun)	297,80 ^(a)	303,00 ^(a)	400,80-665,10	448,70-727,80																																		
No.	Sasaran/Indikator	2016 ^(*)	2017 ^(*)	2018 ^(**)	2019 ^(**)																																		
1	Peran BUMN sebagai agen pembangunan yang kuat dan berdaya saing																																						
	Penyaluran belanja modal (capex) BUMN (triliun)	297,80 ^(a)	303,00 ^(a)	400,80	449,5																																		

M - 72

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019				
164.	<p>Sasaran dan Indikator Pembangunan Politik Dalam Negeri (Perubahan data pada Tabel 5.23 Sasaran dan Indikator Pembangunan Politik Dalam Negeri, Poin 1.a, 1.b, 1.c, dan 1.e, Halaman V.35)</p>	<p>Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.5 Bidang Pembangunan Politik Sub Bab 5.5.1 Politik Dalam Negeri</p>					
1	<p>Terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin kokoh</p>	<p>Terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin kokoh</p>	<p>Terwujudnya kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi yang makin kokoh</p>	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾
a.	Indeks Kebebasan Berpendapat	72,12 ^{a)}	72,12 ^{a)}	72,30 ^{a)}	72,45	72,54	72,54
b.	Indeks Partisipasi Politik Dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	61,24 ^{a)}	61,24 ^{a)}	61,25 ^{a)}	61,27	61,30	61,30
c.	Indeks Peran DPRD	46,76 ^{a)}	46,76 ^{a)}	46,80 ^{a)}	46,83	46,90	46,90
d.	Jumlah regulasi/kebijakan bidang komunikasi publik (<i>draft</i>)	3 ^{b)}	3 ^{b)}	4 ^{b)}	3	3	3
e.	Persentase penyelesaian sengketa informasi publik sesuai UU No.14/2008 (%)	32 ^{a)}	32 ^{a)}	32 ^{a)}	65	65	65
f.	Persentase Penyelesaian penguatan masalah konten siaran (%)	100 ^{a)}	100 ^{a)}	100 ^{a)}	95	95	95
g.	Persentase peningkatan masyarakat yang berperan serta secara berkesinambungan dalam pencegahan terorisme (%)	N/A	N/A	N/A	20	20	20

Sumber: a) Badan Pusat Statistik (BPS), 2016-2017; b) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2016-2017; c) Komisi Informasi Pusat (KIP) 2016-2017; d) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2016-2017. Keterangan : ¹⁾ Realisasi; ²⁾ Target; N/A: Data tidak tersedia karena kegiatan tersebut sebelumnya tidak dilaksanakan/merupakan inisiatif baru.

Sumber: a) Badan Pusat Statistik (BPS), 2016-2018; b) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) 2016-2017; c) Komisi Informasi Pusat (KIP) 2016-2017; d) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2016-2017. Keterangan : ¹⁾ Realisasi; ²⁾ Target; N/A: Data tidak tersedia karena kegiatan tersebut sebelumnya tidak dilaksanakan/merupakan inisiatif baru.

M - 73

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
165.	Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur (Perubahan data pada Tabel 5.25 Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur, Poin 1.a, Halaman V.40)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		<p>Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.6 Pembangunan Hukum dan Aparatur Sub-bab 5.6.2 Pembangunan Aparatur</p> <p>Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur (Perubahan data pada Tabel 5.25 Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur, Poin 1.a, Halaman V.40)</p>	<p>Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.6 Pembangunan Hukum dan Aparatur Sub-bab 5.6.2 Pembangunan Aparatur</p> <p>Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur (Perubahan data pada Tabel 5.25 Sasaran dan Indikator Pembangunan Aparatur, Poin 1.a, Halaman V.40)</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{b)}</th> <th>2018^{c)}</th> <th>2019^{d)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Opini WTP atas laporan keuangan (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian/Lembaga</td> <td>84,00^{a)}</td> <td>91,00^{a)}</td> <td>91,00</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Provinsi</td> <td>91,00^{a)}</td> <td>N/A</td> <td>78,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kabupaten</td> <td>66,00^{a)}</td> <td>N/A</td> <td>54,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kota</td> <td>77,00^{a)}</td> <td>N/A</td> <td>61,00</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tingkat kapabilitas APP level 3 (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian/Lembaga</td> <td>9,09^{b)}</td> <td>23,53^{b)}</td> <td>56,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Provinsi</td> <td>8,82^{b)}</td> <td>52,94^{b)}</td> <td>74,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kabupaten/Kota</td> <td>2,36^{b)}</td> <td>23,23^{b)}</td> <td>51,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Tingkat kematangan (maturitas) SPP (level 3) (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian/Lembaga</td> <td>3,41^{b)}</td> <td>24,42^{b)}</td> <td>55,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Provinsi</td> <td>8,82^{b)}</td> <td>44,12^{b)}</td> <td>74,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kabupaten/Kota</td> <td>3,15^{b)}</td> <td>23,23^{b)}</td> <td>51,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP) (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian/Lembaga</td> <td>85,37^{a)}</td> <td>93,90^{a)}</td> <td>80,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Provinsi</td> <td>64,71^{a)}</td> <td>85,29^{a)}</td> <td>66,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kabupaten/Kota</td> <td>14,53^{a)}</td> <td>33,92^{a)}</td> <td>40,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan dalam APBN/APBD (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian/Lembaga</td> <td>39,31^{a)}</td> <td>33,40^{a)}</td> <td>70,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Tingkat keparuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau) (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian</td> <td>44,00^{a)}</td> <td>35,17^{a)}</td> <td>78,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Lembaga</td> <td>66,67^{a)}</td> <td>33,33^{a)}</td> <td>77,50</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Provinsi</td> <td>39,39^{a)}</td> <td>27,27^{a)}</td> <td>77,25</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kabupaten/Kota</td> <td>22,14^{a)}</td> <td>12,14^{a)}</td> <td>45,25</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}	2018 ^{c)}	2019 ^{d)}	1	Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi						a. Opini WTP atas laporan keuangan (%)						- Kementerian/Lembaga	84,00 ^{a)}	91,00 ^{a)}	91,00	95,00		- Provinsi	91,00 ^{a)}	N/A	78,00	85,00		- Kabupaten	66,00 ^{a)}	N/A	54,00	60,00		- Kota	77,00 ^{a)}	N/A	61,00	65,00		b. Tingkat kapabilitas APP level 3 (%)						- Kementerian/Lembaga	9,09 ^{b)}	23,53 ^{b)}	56,00	85,00		- Provinsi	8,82 ^{b)}	52,94 ^{b)}	74,00	85,00		- Kabupaten/Kota	2,36 ^{b)}	23,23 ^{b)}	51,00	70,00		c. Tingkat kematangan (maturitas) SPP (level 3) (%)						- Kementerian/Lembaga	3,41 ^{b)}	24,42 ^{b)}	55,00	85,00		- Provinsi	8,82 ^{b)}	44,12 ^{b)}	74,00	85,00		- Kabupaten/Kota	3,15 ^{b)}	23,23 ^{b)}	51,00	70,00		d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP) (%)						- Kementerian/Lembaga	85,37 ^{a)}	93,90 ^{a)}	80,00	85,00		- Provinsi	64,71 ^{a)}	85,29 ^{a)}	66,00	85,00		- Kabupaten/Kota	14,53 ^{a)}	33,92 ^{a)}	40,00	70,00		e. Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan dalam APBN/APBD (%)						- Kementerian/Lembaga	39,31 ^{a)}	33,40 ^{a)}	70,00	80,00	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik						a. Tingkat keparuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau) (%)						- Kementerian	44,00 ^{a)}	35,17 ^{a)}	78,00	100,00		- Lembaga	66,67 ^{a)}	33,33 ^{a)}	77,50	100,00		- Provinsi	39,39 ^{a)}	27,27 ^{a)}	77,25	100,00		- Kabupaten/Kota	22,14 ^{a)}	12,14 ^{a)}	45,25	60,00	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Sasaran/Indikator</th> <th>2016^{a)}</th> <th>2017^{b)}</th> <th>2018^{c)}</th> <th>2019^{d)}</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Opini WTP atas laporan keuangan (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian/Lembaga</td> <td>84,00^{a)}</td> <td>91,00^{a)}</td> <td>91,00</td> <td>95,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Provinsi</td> <td>91,00^{a)}</td> <td>97,00^{a)}</td> <td>78,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kabupaten</td> <td>66,00^{a)}</td> <td>72,00^{a)}</td> <td>54,00</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kota</td> <td>77,00^{a)}</td> <td>86,00^{a)}</td> <td>61,00</td> <td>65,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Tingkat kapabilitas APP level 3 (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian/Lembaga</td> <td>9,09^{b)}</td> <td>23,53^{b)}</td> <td>56,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Provinsi</td> <td>8,82^{b)}</td> <td>52,94^{b)}</td> <td>74,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kabupaten/Kota</td> <td>2,36^{b)}</td> <td>23,23^{b)}</td> <td>51,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Tingkat kematangan (maturitas) SPP (level 3) (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian/Lembaga</td> <td>3,41^{b)}</td> <td>24,42^{b)}</td> <td>55,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Provinsi</td> <td>8,82^{b)}</td> <td>44,12^{b)}</td> <td>74,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kabupaten/Kota</td> <td>3,15^{b)}</td> <td>23,23^{b)}</td> <td>51,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP) (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian/Lembaga</td> <td>85,37^{a)}</td> <td>93,90^{a)}</td> <td>80,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Provinsi</td> <td>64,71^{a)}</td> <td>85,29^{a)}</td> <td>66,00</td> <td>85,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kabupaten/Kota</td> <td>14,53^{a)}</td> <td>33,92^{a)}</td> <td>40,00</td> <td>70,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan dalam APBN/APBD (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian/Lembaga</td> <td>39,31^{a)}</td> <td>33,40^{a)}</td> <td>70,00</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Tingkat keparuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau) (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kementerian</td> <td>44,00^{a)}</td> <td>35,17^{a)}</td> <td>78,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Lembaga</td> <td>66,67^{a)}</td> <td>33,33^{a)}</td> <td>77,50</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Provinsi</td> <td>39,39^{a)}</td> <td>27,27^{a)}</td> <td>77,25</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Kabupaten/Kota</td> <td>22,14^{a)}</td> <td>12,14^{a)}</td> <td>45,25</td> <td>60,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}	2018 ^{c)}	2019 ^{d)}	1	Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi						a. Opini WTP atas laporan keuangan (%)						- Kementerian/Lembaga	84,00 ^{a)}	91,00 ^{a)}	91,00	95,00		- Provinsi	91,00 ^{a)}	97,00 ^{a)}	78,00	85,00		- Kabupaten	66,00 ^{a)}	72,00 ^{a)}	54,00	60,00		- Kota	77,00 ^{a)}	86,00 ^{a)}	61,00	65,00		b. Tingkat kapabilitas APP level 3 (%)						- Kementerian/Lembaga	9,09 ^{b)}	23,53 ^{b)}	56,00	85,00		- Provinsi	8,82 ^{b)}	52,94 ^{b)}	74,00	85,00		- Kabupaten/Kota	2,36 ^{b)}	23,23 ^{b)}	51,00	70,00		c. Tingkat kematangan (maturitas) SPP (level 3) (%)						- Kementerian/Lembaga	3,41 ^{b)}	24,42 ^{b)}	55,00	85,00		- Provinsi	8,82 ^{b)}	44,12 ^{b)}	74,00	85,00		- Kabupaten/Kota	3,15 ^{b)}	23,23 ^{b)}	51,00	70,00		d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP) (%)						- Kementerian/Lembaga	85,37 ^{a)}	93,90 ^{a)}	80,00	85,00		- Provinsi	64,71 ^{a)}	85,29 ^{a)}	66,00	85,00		- Kabupaten/Kota	14,53 ^{a)}	33,92 ^{a)}	40,00	70,00		e. Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan dalam APBN/APBD (%)						- Kementerian/Lembaga	39,31 ^{a)}	33,40 ^{a)}	70,00	80,00	2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik						a. Tingkat keparuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau) (%)						- Kementerian	44,00 ^{a)}	35,17 ^{a)}	78,00	100,00		- Lembaga	66,67 ^{a)}	33,33 ^{a)}	77,50	100,00		- Provinsi	39,39 ^{a)}	27,27 ^{a)}	77,25	100,00		- Kabupaten/Kota	22,14 ^{a)}	12,14 ^{a)}	45,25	60,00
No	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}	2018 ^{c)}	2019 ^{d)}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	a. Opini WTP atas laporan keuangan (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Kementerian/Lembaga	84,00 ^{a)}	91,00 ^{a)}	91,00	95,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Provinsi	91,00 ^{a)}	N/A	78,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Kabupaten	66,00 ^{a)}	N/A	54,00	60,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Kota	77,00 ^{a)}	N/A	61,00	65,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	b. Tingkat kapabilitas APP level 3 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Kementerian/Lembaga	9,09 ^{b)}	23,53 ^{b)}	56,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Provinsi	8,82 ^{b)}	52,94 ^{b)}	74,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Kabupaten/Kota	2,36 ^{b)}	23,23 ^{b)}	51,00	70,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	c. Tingkat kematangan (maturitas) SPP (level 3) (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Kementerian/Lembaga	3,41 ^{b)}	24,42 ^{b)}	55,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Provinsi	8,82 ^{b)}	44,12 ^{b)}	74,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Kabupaten/Kota	3,15 ^{b)}	23,23 ^{b)}	51,00	70,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP) (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Kementerian/Lembaga	85,37 ^{a)}	93,90 ^{a)}	80,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Provinsi	64,71 ^{a)}	85,29 ^{a)}	66,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Kabupaten/Kota	14,53 ^{a)}	33,92 ^{a)}	40,00	70,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	e. Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan dalam APBN/APBD (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Kementerian/Lembaga	39,31 ^{a)}	33,40 ^{a)}	70,00	80,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	a. Tingkat keparuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau) (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Kementerian	44,00 ^{a)}	35,17 ^{a)}	78,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Lembaga	66,67 ^{a)}	33,33 ^{a)}	77,50	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Provinsi	39,39 ^{a)}	27,27 ^{a)}	77,25	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Kabupaten/Kota	22,14 ^{a)}	12,14 ^{a)}	45,25	60,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
No	Sasaran/Indikator	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}	2018 ^{c)}	2019 ^{d)}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	Meningkatnya integritas dan akuntabilitas kinerja birokrasi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	a. Opini WTP atas laporan keuangan (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Kementerian/Lembaga	84,00 ^{a)}	91,00 ^{a)}	91,00	95,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Provinsi	91,00 ^{a)}	97,00 ^{a)}	78,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Kabupaten	66,00 ^{a)}	72,00 ^{a)}	54,00	60,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Kota	77,00 ^{a)}	86,00 ^{a)}	61,00	65,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	b. Tingkat kapabilitas APP level 3 (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Kementerian/Lembaga	9,09 ^{b)}	23,53 ^{b)}	56,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Provinsi	8,82 ^{b)}	52,94 ^{b)}	74,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Kabupaten/Kota	2,36 ^{b)}	23,23 ^{b)}	51,00	70,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	c. Tingkat kematangan (maturitas) SPP (level 3) (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Kementerian/Lembaga	3,41 ^{b)}	24,42 ^{b)}	55,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Provinsi	8,82 ^{b)}	44,12 ^{b)}	74,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Kabupaten/Kota	3,15 ^{b)}	23,23 ^{b)}	51,00	70,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	d. Instansi pemerintah yang akuntabel (Skor B atas SAKIP) (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Kementerian/Lembaga	85,37 ^{a)}	93,90 ^{a)}	80,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Provinsi	64,71 ^{a)}	85,29 ^{a)}	66,00	85,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Kabupaten/Kota	14,53 ^{a)}	33,92 ^{a)}	40,00	70,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	e. Penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan dalam APBN/APBD (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Kementerian/Lembaga	39,31 ^{a)}	33,40 ^{a)}	70,00	80,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	a. Tingkat keparuhan atas pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik (zona hijau) (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	- Kementerian	44,00 ^{a)}	35,17 ^{a)}	78,00	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Lembaga	66,67 ^{a)}	33,33 ^{a)}	77,50	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Provinsi	39,39 ^{a)}	27,27 ^{a)}	77,25	100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	- Kabupaten/Kota	22,14 ^{a)}	12,14 ^{a)}	45,25	60,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Sumber: a) BPK, 2017 & 2018; b) BPKP, 2017 - 2018; c) KemenPANRB, 2017 -																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

M - 74

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019																																																																																																																																										
		2018; d) LKPP, 2017 -2018; Ombudsman, 2017 -2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Target RPJMN 2015-2019; N/A: Data akan diterbitkan BPK dalam IHPS 1 pada bulan Oktober 2018.	2018; d) LKPP, 2017 -2018; e) Ombudsman, 2017 -2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Target RPJMN 2015-2019																																																																																																																																										
166.	Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang Sub-bab 5.7.1 Informasi Geospasial Sasaran dan Indikator Pembangunan Informasi Geospasial (Perubahan data pada Tabel 5.26 Sasaran dan Indikator Pembangunan Informasi Geospasial, Poin 1.f dan 1.h, Halaman V.42)	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019 2018; d) LKPP, 2017 -2018; Ombudsman, 2017 -2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Target RPJMN 2015-2019; N/A: Data akan diterbitkan BPK dalam IHPS 1 pada bulan Oktober 2018.	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019 2018; d) LKPP, 2017 -2018; e) Ombudsman, 2017 -2018. Keterangan: *) Realisasi; **) Target RPJMN 2015-2019																																																																																																																																										
		Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang Sub-bab 5.7.1 Informasi Geospasial																																																																																																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="526 1654 570 1716">No.</th> <th data-bbox="526 1405 570 1654">Sasaran/Indikator</th> <th data-bbox="526 1318 570 1405">2016¹⁾</th> <th data-bbox="526 1231 570 1318">2017¹⁾</th> <th data-bbox="526 1143 570 1231">2018¹⁾</th> <th data-bbox="526 1056 570 1143">2019¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="570 1654 630 1716">1</td> <td data-bbox="570 1405 630 1654">Terperluhnya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas</td> <td data-bbox="570 1318 630 1405">40^{a)}</td> <td data-bbox="570 1231 630 1318">N/A</td> <td data-bbox="570 1143 630 1231">33</td> <td data-bbox="570 1056 630 1143">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1654 690 1716">a.</td> <td data-bbox="630 1405 690 1654">Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun (stasiun)</td> <td data-bbox="630 1318 690 1405">40^{a)}</td> <td data-bbox="630 1231 690 1318">N/A</td> <td data-bbox="630 1143 690 1231">33</td> <td data-bbox="630 1056 690 1143">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 1654 750 1716">b.</td> <td data-bbox="690 1405 750 1654">Luasan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional yang terbangun (km2)</td> <td data-bbox="690 1318 750 1405">14.171^{a)}</td> <td data-bbox="690 1231 750 1318">45.394^{a)}</td> <td data-bbox="690 1143 750 1231">898.474</td> <td data-bbox="690 1056 750 1143">757.951</td> </tr> <tr> <td data-bbox="750 1654 810 1716">c.</td> <td data-bbox="750 1405 810 1654">Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan (NLP)</td> <td data-bbox="750 1318 810 1405">N/A</td> <td data-bbox="750 1231 810 1318">1.375^{a)}</td> <td data-bbox="750 1143 810 1231">780</td> <td data-bbox="750 1056 810 1143">414</td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 1654 870 1716">d.</td> <td data-bbox="810 1405 870 1654">Jumlah batas wilayah administrasi desa yang terdefinisi (desa)</td> <td data-bbox="810 1318 870 1405">2.685^{a)}</td> <td data-bbox="810 1231 870 1318">7.991^{a)}</td> <td data-bbox="810 1143 870 1231">4.700</td> <td data-bbox="810 1056 870 1143">36.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="870 1654 930 1716">e.</td> <td data-bbox="870 1405 930 1654">Jumlah tanda batas negara (pilar)</td> <td data-bbox="870 1318 930 1405">90^{a)}</td> <td data-bbox="870 1231 930 1318">106^{a)}</td> <td data-bbox="870 1143 930 1231">106</td> <td data-bbox="870 1056 930 1143">110</td> </tr> <tr> <td data-bbox="930 1654 990 1716">f.</td> <td data-bbox="930 1405 990 1654">Luasan data geospasial termutakhir (km²)</td> <td data-bbox="930 1318 990 1405">3.758^{a)}</td> <td data-bbox="930 1231 990 1318">5.464^{a)}</td> <td data-bbox="930 1143 990 1231">2.516</td> <td data-bbox="930 1056 990 1143">14.643</td> </tr> <tr> <td data-bbox="990 1654 1050 1716">g.</td> <td data-bbox="990 1405 1050 1654">Jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar (NLP)</td> <td data-bbox="990 1318 1050 1405">1.600^{a)}</td> <td data-bbox="990 1231 1050 1318">N/A</td> <td data-bbox="990 1143 1050 1231">N/A</td> <td data-bbox="990 1056 1050 1143">697</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 1654 1110 1716">h.</td> <td data-bbox="1050 1405 1110 1654">Panjang data batimetri prioritas (km Garis Pantai)</td> <td data-bbox="1050 1318 1110 1405">78.046^{a)}</td> <td data-bbox="1050 1231 1110 1318">40.940^{a)}</td> <td data-bbox="1050 1143 1110 1231">42.500</td> <td data-bbox="1050 1056 1110 1143">70.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1110 1654 1170 1716">2</td> <td data-bbox="1110 1405 1170 1654">Terselenggaranya berbagai pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik</td> <td data-bbox="1110 1318 1170 1405">15^{a)}</td> <td data-bbox="1110 1231 1170 1318">2^{a)}</td> <td data-bbox="1110 1143 1170 1231">16</td> <td data-bbox="1110 1056 1170 1143">21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1170 1654 1230 1716">a.</td> <td data-bbox="1170 1405 1230 1654">Jumlah Pembangunan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina (PPIDS)</td> <td data-bbox="1170 1318 1230 1405">15^{a)}</td> <td data-bbox="1170 1231 1230 1318">2^{a)}</td> <td data-bbox="1170 1143 1230 1231">16</td> <td data-bbox="1170 1056 1230 1143">21</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	1	Terperluhnya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas	40 ^{a)}	N/A	33	20	a.	Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun (stasiun)	40 ^{a)}	N/A	33	20	b.	Luasan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional yang terbangun (km2)	14.171 ^{a)}	45.394 ^{a)}	898.474	757.951	c.	Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan (NLP)	N/A	1.375 ^{a)}	780	414	d.	Jumlah batas wilayah administrasi desa yang terdefinisi (desa)	2.685 ^{a)}	7.991 ^{a)}	4.700	36.000	e.	Jumlah tanda batas negara (pilar)	90 ^{a)}	106 ^{a)}	106	110	f.	Luasan data geospasial termutakhir (km ²)	3.758 ^{a)}	5.464 ^{a)}	2.516	14.643	g.	Jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar (NLP)	1.600 ^{a)}	N/A	N/A	697	h.	Panjang data batimetri prioritas (km Garis Pantai)	78.046 ^{a)}	40.940 ^{a)}	42.500	70.000	2	Terselenggaranya berbagai pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik	15 ^{a)}	2 ^{a)}	16	21	a.	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina (PPIDS)	15 ^{a)}	2 ^{a)}	16	21	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="526 974 570 1034">No.</th> <th data-bbox="526 725 570 974">Sasaran/Indikator</th> <th data-bbox="526 637 570 725">2016¹⁾</th> <th data-bbox="526 550 570 637">2017¹⁾</th> <th data-bbox="526 463 570 550">2018¹⁾</th> <th data-bbox="526 376 570 463">2019¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="570 974 630 1034">1</td> <td data-bbox="570 725 630 974">Terperluhnya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas</td> <td data-bbox="570 637 630 725">40^{a)}</td> <td data-bbox="570 550 630 637">N/A</td> <td data-bbox="570 463 630 550">33</td> <td data-bbox="570 376 630 463">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 974 690 1034">a.</td> <td data-bbox="630 725 690 974">Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun (stasiun)</td> <td data-bbox="630 637 690 725">40^{a)}</td> <td data-bbox="630 550 690 637">N/A</td> <td data-bbox="630 463 690 550">33</td> <td data-bbox="630 376 690 463">20</td> </tr> <tr> <td data-bbox="690 974 750 1034">b.</td> <td data-bbox="690 725 750 974">Luasan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional yang terbangun (km2)</td> <td data-bbox="690 637 750 725">14.171^{a)}</td> <td data-bbox="690 550 750 637">45.394^{a)}</td> <td data-bbox="690 463 750 550">898.474</td> <td data-bbox="690 376 750 463">757.951</td> </tr> <tr> <td data-bbox="750 974 810 1034">c.</td> <td data-bbox="750 725 810 974">Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan (NLP)</td> <td data-bbox="750 637 810 725">N/A</td> <td data-bbox="750 550 810 637">1.375^{a)}</td> <td data-bbox="750 463 810 550">780</td> <td data-bbox="750 376 810 463">414</td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 974 870 1034">d.</td> <td data-bbox="810 725 870 974">Jumlah batas wilayah administrasi desa yang terdefinisi (desa)</td> <td data-bbox="810 637 870 725">2.685^{a)}</td> <td data-bbox="810 550 870 637">7.991^{a)}</td> <td data-bbox="810 463 870 550">4.700</td> <td data-bbox="810 376 870 463">36.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="870 974 930 1034">e.</td> <td data-bbox="870 725 930 974">Luasan data geospasial termutakhir (km²)</td> <td data-bbox="870 637 930 725">3.758^{a)}</td> <td data-bbox="870 550 930 637">5.464^{a)}</td> <td data-bbox="870 463 930 550">2.516</td> <td data-bbox="870 376 930 463">14.644</td> </tr> <tr> <td data-bbox="930 974 990 1034">f.</td> <td data-bbox="930 725 990 974">Jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar (NLP)</td> <td data-bbox="930 637 990 725">1.600^{a)}</td> <td data-bbox="930 550 990 637">N/A</td> <td data-bbox="930 463 990 550">N/A</td> <td data-bbox="930 376 990 463">697</td> </tr> <tr> <td data-bbox="990 974 1050 1034">g.</td> <td data-bbox="990 725 1050 974">Panjang data batimetri prioritas (km Garis Pantai)</td> <td data-bbox="990 637 1050 725">78.046^{a)}</td> <td data-bbox="990 550 1050 637">40.940^{a)}</td> <td data-bbox="990 463 1050 550">42.500</td> <td data-bbox="990 376 1050 463">4.000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1050 974 1110 1034">2</td> <td data-bbox="1050 725 1110 974">Terselenggaranya berbagai pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik</td> <td data-bbox="1050 637 1110 725">15^{a)}</td> <td data-bbox="1050 550 1110 637">2^{a)}</td> <td data-bbox="1050 463 1110 550">16</td> <td data-bbox="1050 376 1110 463">21</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1110 974 1170 1034">a.</td> <td data-bbox="1110 725 1170 974">Jumlah Pembangunan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina (PPIDS)</td> <td data-bbox="1110 637 1170 725">15^{a)}</td> <td data-bbox="1110 550 1170 637">2^{a)}</td> <td data-bbox="1110 463 1170 550">16</td> <td data-bbox="1110 376 1170 463">21</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Sasaran/Indikator	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾	1	Terperluhnya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas	40 ^{a)}	N/A	33	20	a.	Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun (stasiun)	40 ^{a)}	N/A	33	20	b.	Luasan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional yang terbangun (km2)	14.171 ^{a)}	45.394 ^{a)}	898.474	757.951	c.	Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan (NLP)	N/A	1.375 ^{a)}	780	414	d.	Jumlah batas wilayah administrasi desa yang terdefinisi (desa)	2.685 ^{a)}	7.991 ^{a)}	4.700	36.000	e.	Luasan data geospasial termutakhir (km ²)	3.758 ^{a)}	5.464 ^{a)}	2.516	14.644	f.	Jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar (NLP)	1.600 ^{a)}	N/A	N/A	697	g.	Panjang data batimetri prioritas (km Garis Pantai)	78.046 ^{a)}	40.940 ^{a)}	42.500	4.000	2	Terselenggaranya berbagai pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik	15 ^{a)}	2 ^{a)}	16	21	a.	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina (PPIDS)	15 ^{a)}	2 ^{a)}	16	21
No.	Sasaran/Indikator	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾																																																																																																																																								
1	Terperluhnya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas	40 ^{a)}	N/A	33	20																																																																																																																																								
a.	Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun (stasiun)	40 ^{a)}	N/A	33	20																																																																																																																																								
b.	Luasan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional yang terbangun (km2)	14.171 ^{a)}	45.394 ^{a)}	898.474	757.951																																																																																																																																								
c.	Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan (NLP)	N/A	1.375 ^{a)}	780	414																																																																																																																																								
d.	Jumlah batas wilayah administrasi desa yang terdefinisi (desa)	2.685 ^{a)}	7.991 ^{a)}	4.700	36.000																																																																																																																																								
e.	Jumlah tanda batas negara (pilar)	90 ^{a)}	106 ^{a)}	106	110																																																																																																																																								
f.	Luasan data geospasial termutakhir (km ²)	3.758 ^{a)}	5.464 ^{a)}	2.516	14.643																																																																																																																																								
g.	Jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar (NLP)	1.600 ^{a)}	N/A	N/A	697																																																																																																																																								
h.	Panjang data batimetri prioritas (km Garis Pantai)	78.046 ^{a)}	40.940 ^{a)}	42.500	70.000																																																																																																																																								
2	Terselenggaranya berbagai pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik	15 ^{a)}	2 ^{a)}	16	21																																																																																																																																								
a.	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina (PPIDS)	15 ^{a)}	2 ^{a)}	16	21																																																																																																																																								
No.	Sasaran/Indikator	2016 ¹⁾	2017 ¹⁾	2018 ¹⁾	2019 ¹⁾																																																																																																																																								
1	Terperluhnya kebutuhan data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah yang berkualitas	40 ^{a)}	N/A	33	20																																																																																																																																								
a.	Jumlah stasiun Indonesia CORS yang terbangun (stasiun)	40 ^{a)}	N/A	33	20																																																																																																																																								
b.	Luasan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional yang terbangun (km2)	14.171 ^{a)}	45.394 ^{a)}	898.474	757.951																																																																																																																																								
c.	Jumlah peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan (NLP)	N/A	1.375 ^{a)}	780	414																																																																																																																																								
d.	Jumlah batas wilayah administrasi desa yang terdefinisi (desa)	2.685 ^{a)}	7.991 ^{a)}	4.700	36.000																																																																																																																																								
e.	Luasan data geospasial termutakhir (km ²)	3.758 ^{a)}	5.464 ^{a)}	2.516	14.644																																																																																																																																								
f.	Jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar (NLP)	1.600 ^{a)}	N/A	N/A	697																																																																																																																																								
g.	Panjang data batimetri prioritas (km Garis Pantai)	78.046 ^{a)}	40.940 ^{a)}	42.500	4.000																																																																																																																																								
2	Terselenggaranya berbagai pakai dan pemanfaatan data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik	15 ^{a)}	2 ^{a)}	16	21																																																																																																																																								
a.	Jumlah Pembangunan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) yang dibangun dan dibina (PPIDS)	15 ^{a)}	2 ^{a)}	16	21																																																																																																																																								
	Sumber: a) BIG, 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; N/A Tidak ada kegiatan di tahun tersebut	Sumber: a) BIG, 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; N/A Tidak ada kegiatan di tahun tersebut	Sumber: a) BIG, 2018 Keterangan: *) Realisasi; **) Target; N/A Tidak ada kegiatan di tahun tersebut.																																																																																																																																										

M - 75

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
167.	Arah Kebijakan (Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman V.43)	1. meningkatkan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang berkualitas melalui: (a) peningkatan jumlah stasiun Indonesia CORS yang dibangun; (b) penyediaan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional; (c) penyediaan peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan; (d) penyiapan wilayah administrasi desa yang terdefinisi (desa); (e) penetapan tanda batas negara; (f) penyediaan data geospasial termutakhir; (g) peningkatan jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar; dan (h) Penyediaan data batimetri prioritas; serta	1. meningkatkan ketersediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang berkualitas melalui: (a) peningkatan jumlah stasiun Indonesia CORS yang dibangun; (b) penyediaan Sistem Referensi Geospasial Vertikal Nasional; (c) penyediaan peta dasar skala 1:5000 untuk penyusunan RDTR pada daerah yang di prioritaskan; (d) penyiapan wilayah administrasi desa yang terdefinisi (desa); (e) penyediaan data geospasial termutakhir; (f) peningkatan jumlah peta Rupabumi Indonesia skala besar; dan (g) Penyediaan data batimetri prioritas; serta
	Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.7 Bidang Pembangunan Kewilayahan dan Tata Ruang Sub-bab 5.7.2 Tata Ruang		
168.	Sasaran dan Indikator Pembangunan Tata Ruang (Perubahan data pada Tabel 5.27 Sasaran dan Indikator Pembangunan Tata Ruang, poin 1a, 3a, dan 3c, Halaman V.44)	1a. Target Tahun 2019: 2 Kajian: • Bidang TR dengan Bidang Kehutanan • Bidang TR dengan Bidang Kelautan 3a. Target Tahun 2019: 5 3c. Target Tahun 2019: 7	1a. Target Tahun 2019: 1 Kajian: • Bidang TR dengan Bidang Kelautan 3a. Target Tahun 2019: 4 3c. Target Tahun 2019: 8
	Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.8 Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana		
169.	Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana (Perubahan data pada Tabel 5.31 Sasaran dan Indikator Pembangunan Sarana dan Prasarana, Halaman V.49)	1a. Jumlah penyaluran bantuan pembiayaan perumahan sebanyak 198.000 rumah tangga - Jumlah KPR FLPP sebanyak 84.000 rumah tangga 1b. Jumlah fasilitas penyediaan hunian layak melalui pembangunan baru sebanyak 18.742 rumah tangga - Jumlah rusunawa sebesar 7.512 rumah tangga - Jumlah rumah khusus sebesar 3.230 rumah tangga	1a. Jumlah penyaluran bantuan pembiayaan perumahan menjadi sebanyak 182.858 rumah tangga - Jumlah KPR FLPP menjadi sebanyak 68.858 rumah tangga 1b. Indikator Jumlah fasilitas penyediaan hunian layak melalui pembangunan baru menjadi sebanyak 17.003 rumah tangga - Jumlah rusunawa menjadi sebesar 6.873 rumah tangga - Jumlah rumah khusus menjadi sebesar 2.130 rumah tangga
	Perumahan dan Permukiman		

M - 76

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		<p>1c. Jumlah fasilitasi penyediaan hunian layak melalui peningkatan kualitas secara swadaya sebesar 192.000 rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah BSPS peningkatan kualitas sebesar 192.000 rumah tangga <p>2a. Luas permukiman kumuh daerah perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya sebesar 1.044 Ha</p> <p>2b. Luas permukiman kawasan khusus yang ditingkatkan kualitasnya seluas 304 Ha</p> <p>3a. Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung di seluruh kabupaten/kota</p> <p>3b. Luas bangunan yang ditata sebesar 345.000 m2</p> <p>3c. Luas bangunan gedung yang dikelola sebesar 209.990 m2</p> <p>4a. Persentase cakupan pelayanan persampahan perkotaan sebesar 86,87%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase sampah terangkut sebesar 73,02% - Persentase sampah diolah melalui 3R sebesar 13,86% 	<p>1c. Jumlah fasilitasi penyediaan hunian layak melalui peningkatan kualitas secara swadaya menjadi sebesar 198.500 rumah tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah BSPS peningkatan kualitas menjadi sebesar 198.500 rumah tangga <p>2a. Luas permukiman kumuh daerah perkotaan yang ditingkatkan kualitasnya sebesar 833 Ha</p> <p>2b. Luas permukiman kawasan khusus yang ditingkatkan kualitasnya menjadi seluas 738 Ha</p> <p>3a. Pembinaan dan pengawasan bangunan gedung menjadi di 484 kabupaten/kota</p> <p>3b. Luas bangunan yang ditata menjadi sebesar 348.220 m2</p> <p>3c. Luas bangunan gedung yang dikelola menjadi sebesar 807.675 m2</p> <p>4a. Persentase cakupan pelayanan persampahan perkotaan menjadi sebesar 89,62%</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase sampah terangkut sebesar 73,54% - Persentase sampah diolah melalui 3R sebesar 16,08 %
Transportasi		<p>1a. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan sebanyak 65 lokasi</p> <p>1b. Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan sebanyak 159 paket</p> <p>2a. Panjang jalan nasional yang dipreservasi sebesar 46.855 km</p> <p>2b. Jaringan Kereta Api</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jaringan KA yang terbangun sebesar 1.144 km (kumulatif) <p>2d. Jumlah pelabuhan penyeberangan/ sungai/danau yang direhabilitasi dan dikembangkan sebanyak 16 lokasi</p> <p>3a. Jumlah bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan sebanyak 145 lokasi</p>	<p>1a. Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan menjadi sebanyak 52 lokasi</p> <p>1b. Jumlah sarana bantu navigasi pelayaran yang disediakan menjadi sebanyak 86 paket</p> <p>2a. Panjang jalan nasional yang dipreservasi menjadi sebesar 46.564 km</p> <p>2b. Jaringan Kereta Api</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panjang jaringan KA yang terbangun menjadi sebesar 1.167 km (kumulatif) <p>2d. Jumlah pelabuhan penyeberangan/ sungai/danau yang direhabilitasi dan dikembangkan menjadi sebanyak 15 lokasi</p> <p>3a. Jumlah bandara yang direhabilitasi dan dikembangkan sebanyak 151 lokasi</p>
Komunikasi dan Informatika		<p>1c. Jumlah kantor pos cabang layanan pos universal (KPCLPU) yang beroperasi sebanyak 2.450 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan sebanyak 2.450 unit (kumulatif) di tahun 2018</p>	<p>1c. Jumlah kantor pos cabang layanan pos universal (KPCLPU) yang beroperasi menjadi sebanyak 2.475 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan menjadi sebanyak 2.350 unit (kumulatif) di tahun 2018</p>
Energi dan Ketenagalistrikan		<p>1a. Persentase susut jaringan tenaga listrik sebesar 9,12%</p> <p>2b. Jumlah FSRU/regasifikasi yang dibangun sebanyak 2 unit</p> <p>2d. Jumlah jaringan gas kota sambungan rumah tangga sebanyak 374.000</p>	<p>1a. Persentase susut jaringan tenaga listrik menjadi sebesar 9,40%</p> <p>2b. Jumlah FSRU/regasifikasi yang dibangun menjadi sebanyak 1 unit</p> <p>2d. Jumlah jaringan gas kota sambungan rumah tangga menjadi sebanyak</p>

M - 77

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
	Sumber Daya Air	<p>78.216 unit</p> <p>2a. Panjang pengendali banjir yang dibangun sebesar 30 km</p> <p>2b. Panjang pengamanan pantai yang dibangun sebesar 13 km</p> <p>2c. Jumlah pengendali lahar/sedimen yang dibangun sebanyak 13 unit</p> <p>3a. Jumlah bendungan yang dibangun sebanyak 57 unit (kumulatif di tahun 2017 dan sebanyak 65 unit (kumulatif) di tahun 2018</p> <p>- Jumlah bendungan yang selesai dibangun sebanyak 18 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan sebanyak 29 unit (kumulatif) di tahun 2018</p> <p>- Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan sebanyak 34 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan sebanyak 39 unit (kumulatif) di tahun 2018</p> <p>3b. Jumlah embung/bangunan penampung air yang dibangun sebanyak 80 unit di tahun 2017 dan sebanyak 120 unit di tahun 2018</p>	<p>78.216 unit</p> <p>2a. Panjang pengendali banjir yang dibangun menjadi sebesar 131 km</p> <p>2b. Panjang pengamanan pantai yang dibangun sebesar 24 km</p> <p>2c. Jumlah pengendali lahar/sedimen yang dibangun sebanyak 22 unit</p> <p>3a. Jumlah bendungan yang dibangun menjadi sebanyak 43 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan menjadi sebanyak 57 unit (kumulatif) di tahun 2018</p> <p>- Jumlah bendungan yang selesai dibangun menjadi sebanyak 17 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan menjadi sebanyak 27 unit (kumulatif) di tahun 2018</p> <p>- Jumlah bendungan dalam tahap pelaksanaan menjadi sebanyak 26 unit (kumulatif) di tahun 2017 dan menjadi sebanyak 30 unit (kumulatif) di tahun 2018</p> <p>3b. Jumlah embung/bangunan penampung air yang dibangun menjadi sebanyak 103 unit di tahun 2017 dan menjadi sebanyak 139 unit di tahun 2018</p>
170.	Arah Kebijakan (Perubahan narasi pada poin 8 dan 9, Halaman V.53)	<p>8. mengembangkan kebijakan harga dan pendanaan energi dengan strategi antara lain: (a) Subsidi listrik yang lebih terarah dan tepat sasaran; dan (b) insentif dan kebijakan harga yang tepat, termasuk intervensi pendanaan pemerintah, dukungan pendanaan pemerintah pada badan usaha (BU), dan kebijakan harga yang mencerminkan struktur biaya;</p> <p>9. meningkatkan ketahanan air dengan strategi antara lain: (a) implementasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) dan penerapan bertahap Modernisasi Irigasi; (b) pengembangan sinergi antara badan usaha penyediaan air baku dan SPAM; (c) percepatan proses persiapan dan pemanfaatan bendungan <i>multipurpose</i> untuk PLTA; (d) pengelolaan banjir perkotaan dan sistem drainase serta penyediaan <i>room for the river</i>; dan (e) pengamanan pantai secara terintegrasi dengan pengembangan kawasan pesisir perkotaan.</p>	<p>8. mengembangkan kebijakan harga dan pendanaan untuk pembangunan energi dan ketenagalistrikan dengan strategi antara lain: (a) subsidi listrik yang lebih terarah dan tepat sasaran; (b) penyediaan pendanaan untuk perluasan akses layanan; dan (c) insentif dan kebijakan harga yang tepat, termasuk intervensi pendanaan pemerintah, dukungan pendanaan pemerintah pada badan usaha (BU), dan kebijakan harga yang mencerminkan struktur biaya;</p> <p>9. meningkatkan ketahanan air dengan strategi antara lain: (a) implementasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) dan penerapan bertahap Modernisasi Irigasi; (b) pengembangan sinergi antara badan usaha penyediaan air baku dan SPAM; (c) percepatan proses persiapan dan pemanfaatan bendungan <i>multipurpose</i> termasuk untuk PLTA; (d) pengelolaan banjir perkotaan dan sistem drainase serta penyediaan <i>room for the river</i>; dan (e) pengamanan pantai secara terintegrasi dengan pengembangan kawasan pesisir perkotaan.</p>

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019												
171.	<p>Bab 5 Pembangunan Bidang Sub Bab 5.9 Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sasaran dan Indikator Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Perubahan data pada Tabel 5.32 Sasaran dan Indikator Pembangunan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Halaman V.54)</p>	<p>1. a. Hasil Perkebunan (ribu ton) Kelapa Sawit (2019): 36.420 2. a. Peningkatan produksi mineral (ton) - Logam Tembaga (2018): 710.000; (2019): 710.000 - Logam Emas (2019): 105 - Logam Perak (2019): 302 - Logam Timah (2019): 70.000 - Feronikel (2018): 1.231.000; (2019): 1.600.000 - Nickel Matte (2019): 81.000</p>	<p>1. a. Hasil Perkebunan (ribu ton) Kelapa sawit (2019): 36.420 2. a. Peningkatan produksi mineral (ton) - Logam Tembaga (2018): 310.000; (2019): 291.000 - Logam Emas (2019): 75 - Logam Perak (2019): 231 - Logam Timah (2019): 50.000 - Feromikel (2018): 860.000; (2019): 860.000 - Nickel Matte (2019): 80.000</p>												
	<p>Bab 6 Kaidah Pelaksanaan Sub Bab 6.1 Kerangka Pelayanaan Umum dan Investasi</p>														
172.	<p>Kerangka Pelayanaan Umum dan Investasi (Perubahan data pada Paragraf 1, Halaman VI.2)</p>	<p>Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 2019 sebesar 6,9 - 7,7 persen, dikembangkan arah kebijakan serta dukungan kegiatan prioritas sebagaimana pada Tabel 6.1.</p>	<p>Untuk mewujudkan sasaran pertumbuhan investasi tahun 2019 sebesar 7,0 persen, dikembangkan arah kebijakan serta dukungan kegiatan prioritas sebagaimana pada Tabel 6.1.</p>												
173.	<p>Arah Kebijakan Investasi dan Dukungan Kegiatan Prioritas Tahun 2019 (Perubahan narasi pada tabel 6.1 Arah Kebijakan Investasi dan Dukungan Kegiatan Prioritas Tahun 2019, Halaman VI.2)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="880 1074 948 1689">Arah Kebijakan Investasi</th> <th data-bbox="880 1074 1302 1689">Dukungan Kegiatan Prioritas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="948 1074 1101 1689">Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi</td> <td data-bbox="948 1074 1302 1689">Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pembangunan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung Pembangunan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Reforma Agraria Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1101 1074 1166 1689">Penyelesaian masalah investasi</td> <td data-bbox="1101 1074 1302 1689">Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pembangunan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung Pembangunan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Reforma Agraria Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan</td> </tr> </tbody> </table>	Arah Kebijakan Investasi	Dukungan Kegiatan Prioritas	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pembangunan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung Pembangunan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Reforma Agraria Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan	Penyelesaian masalah investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pembangunan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung Pembangunan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Reforma Agraria Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="880 393 948 1009">Arah Kebijakan Investasi</th> <th data-bbox="880 393 1302 1009">Dukungan Kegiatan Prioritas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="948 393 1101 1009">Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi</td> <td data-bbox="948 393 1302 1009">Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pembangunan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung Pembangunan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Reforma Agraria Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1101 393 1166 1009">Penyelesaian masalah investasi</td> <td data-bbox="1101 393 1302 1009">Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pembangunan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung Pembangunan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Reforma Agraria Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan</td> </tr> </tbody> </table>	Arah Kebijakan Investasi	Dukungan Kegiatan Prioritas	Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pembangunan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung Pembangunan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Reforma Agraria Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan	Penyelesaian masalah investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pembangunan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung Pembangunan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Reforma Agraria Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan
Arah Kebijakan Investasi	Dukungan Kegiatan Prioritas														
Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pembangunan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung Pembangunan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Reforma Agraria Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan														
Penyelesaian masalah investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pembangunan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung Pembangunan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Reforma Agraria Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan														
Arah Kebijakan Investasi	Dukungan Kegiatan Prioritas														
Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pembangunan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung Pembangunan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Reforma Agraria Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan														
Penyelesaian masalah investasi	Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi Pembangunan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non-Agro dan Pendukung Pembangunan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Pelaksanaan Reforma Agraria Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan														

M - 79

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
		<p>Pelatihan Vokasi</p> <p>Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi</p> <p>Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial</p> <p>Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap</p> <p>Penguatan Lembaga Demokrasi</p> <p>Menjaga tingkat keyakinan masyarakat di tengah tahun politik</p> <p>Peningkatan kemitraan dan perluasan akses pembiayaan</p> <p>Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)</p> <p>Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan</p> <p>Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan</p> <p>Perbaikan infrastruktur</p> <p>Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi</p> <p>Peningkatan Sarana dan Prasarana Informatika</p> <p>Pengembangan Konektivitas Pusat Kegiatan di Wilayah Timur Indonesia</p> <p>Pengembangan Pelabuhan Hub dan <i>Feeder</i> Tol Laut</p> <p>Pembangunan Transportasi Multimoda</p> <p>Pembangunan Bandara</p> <p>Pembangunan Transportasi Perkotaan</p> <p>Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik</p> <p>Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antarkabupaten/Kota dan Kampung</p> <p>Pembangunan Pelabuhan dan Bandara</p> <p>Penyediaan Infrastruktur Energi, Telekomunikasi, dan TIK</p> <p>Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik</p>	<p>Pelatihan Vokasi</p> <p>Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi</p> <p>Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap</p> <p>Penguatan Lembaga Demokrasi</p> <p>Menjaga tingkat keyakinan masyarakat di tengah tahun politik</p> <p>Peningkatan kemitraan dan perluasan akses pembiayaan</p> <p>Pembangunan infrastruktur</p> <p>Pengembangan Pelabuhan Angkutan Tol Laut</p> <p>Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan</p> <p>Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi</p> <p>Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik</p> <p>Peningkatan Infrastruktur Dasar, TIK, Konektivitas Antarprowinsi, Kabupaten/Kota, Distrik dan Kampung</p> <p>Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Distribusi Tenaga Listrik</p>

M - 80

NO	PERIHAL	RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019	PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
174.	<p>Bab 6 Kaidah Pelaksanaan Sub Bab 6.3 Kerangka Regulasi</p> <p>Kerangka Regulasi (Perubahan narasi pada Paragraf 1, Halaman VI.6)</p>	<p>Pengusulan kerangka regulasi di RKP 2019 juga dilakukan secara paralel melalui sistem aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran – Kerangka Regulasi (KRISNA – KR). Aplikasi ini merupakan sistem yang terintegrasi dengan KRISNA sehingga dalam pengusulan kerangka regulasi perlu dilakukan koordinasi antar-<i>stakeholder</i> terkait seperti dalam Gambar 6.8 berikut.</p>	<p>Pengusulan kerangka regulasi di RKP 2019 juga dilakukan secara paralel melalui sistem aplikasi Kerangka Regulasi Nasional (KARINA). Aplikasi ini merupakan sistem yang mandiri, sehingga dalam pengusulan kerangka regulasi perlu dilakukan koordinasi antar-<i>stakeholder</i> terkait seperti dalam Gambar 6.8 berikut.</p>
175.	<p>Kerangka Regulasi (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman VI.6)</p>	<p>Pada pelaksanaannya, masing-masing <i>stakeholder</i> memiliki peran yang berbeda dalam proses pengusulan kerangka regulasi di KRISNA-KR</p>	<p>Pada pelaksanaannya, masing-masing <i>stakeholder</i> memiliki peran yang berbeda dalam proses pengusulan kerangka regulasi di KARINA</p>
176.	<p>Peran <i>stakeholder</i> Pengusulan Kerangka Regulasi (Perubahan data pada Gambar 6.9 Peran <i>stakeholder</i> Pengusulan Kerangka Regulasi, Halaman VI.6)</p>	<p>Petugas Entri Data melakukan input data kebutuhan KR ke dalam KRISNA - KR atas usulan tiap-tiap unit teknis di K/L yang membutuhkan KR dengan terlebih dahulu berkomunikasi kepada Biro Hukum.</p>	<p>Petugas Entri Data melakukan input data kebutuhan KR ke dalam KARINA atas usulan tiap-tiap unit teknis di K/L yang membutuhkan KR dengan terlebih dahulu berkomunikasi kepada Biro Hukum.</p>
	<p>Pihak direktorat sektor di Bappenas dapat mengakses KRISNA - KR sekaligus melihat usulan kerangka regulasi yang disampaikan oleh K/L mitranya, namun tidak dapat melakukan perubahan terhadap usulan tersebut. Koordinasi dengan unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sangat penting untuk menentukan usulan kerangka regulasi dapat disetujui atau ditolak.</p>	<p>Pihak direktorat sektor di Bappenas dapat mengakses KARINA sekaligus melihat usulan kerangka regulasi yang disampaikan oleh K/L mitranya, namun tidak dapat melakukan perubahan terhadap usulan tersebut. Koordinasi dengan unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sangat penting untuk menentukan usulan kerangka regulasi dapat disetujui atau ditolak.</p>	<p>Pihak direktorat sektor di Bappenas dapat mengakses KARINA sekaligus melihat usulan kerangka regulasi yang disampaikan oleh K/L mitranya, namun tidak dapat melakukan perubahan terhadap usulan tersebut. Koordinasi dengan unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sangat penting untuk menentukan usulan kerangka regulasi dapat disetujui atau ditolak.</p>
177.	<p>Kerangka Regulasi (Perubahan narasi pada Paragraf 2, Halaman VI.7)</p>	<p>Kementerian Hukum dan HAM cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional berkoordinasi dengan Bappenas cq. Unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sejak T-1 perencanaan (satu tahun sebelum dilaksanakannya perencanaan pembangunan nasional) untuk menganalisis kebutuhan kerangka regulasi. Usulan KR dalam KRISNA - KR menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional dan Program Penyusunan PP dan Perpres.</p>	<p>Kementerian Hukum dan HAM cq. Badan Pembinaan Hukum Nasional berkoordinasi dengan Bappenas cq. Unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan sejak T-1 perencanaan (satu tahun sebelum dilaksanakannya perencanaan pembangunan nasional) untuk menganalisis kebutuhan kerangka regulasi. Usulan KR dalam KARINA menjadi bahan penyusunan Program Legislasi Nasional dan Program Penyusunan PP dan Perpres.</p>
		<p>Upaya untuk mensinergikan kebijakan pembangunan dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, dengan pendekatan perencanaan berbasis program (<i>money follows program</i>) yang efektif serta penguatan kerjasama antar-lembaga yang lebih terpadu.</p>	<p>Upaya untuk mensinergikan kebijakan pembangunan dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, dengan pendekatan perencanaan berbasis program (<i>money follows program</i>) yang efektif serta penguatan kerjasama antar-lembaga yang lebih terpadu (harmonisasi kelembagaan dalam rangka perumusan kebijakan dan regulasi/legislasi).</p>

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

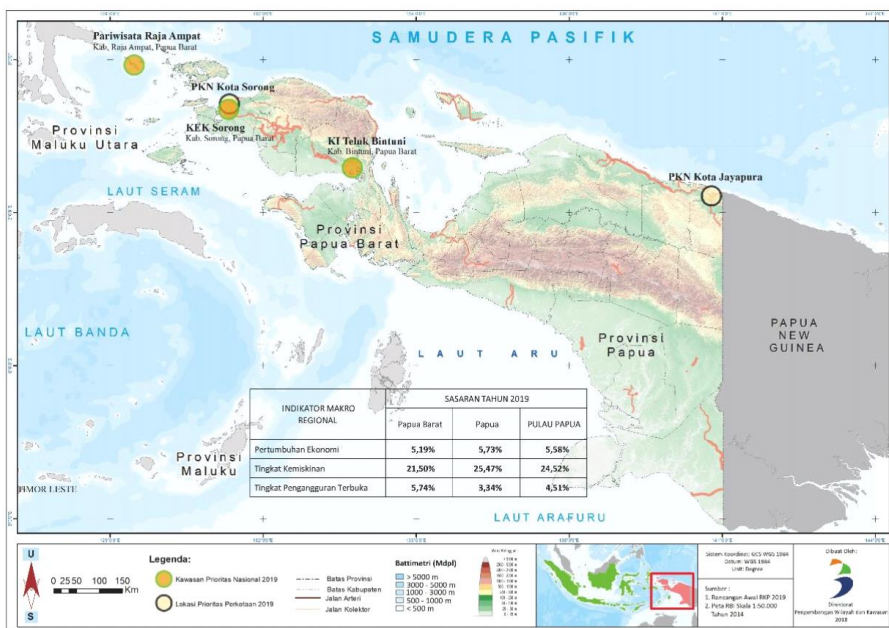
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

PEMUTAKHIRAN PETA KEWILAYAHAN

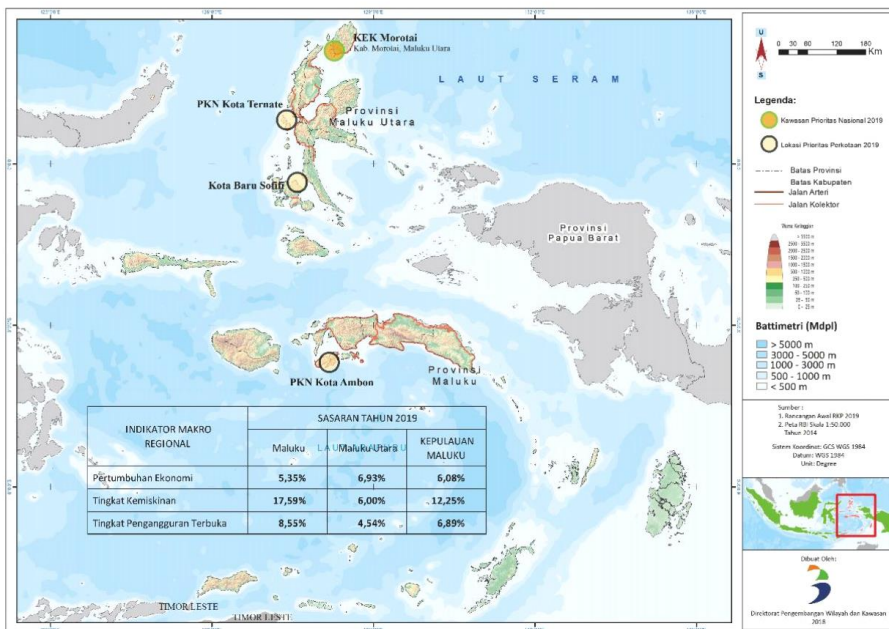
PP - 1

PEMUTAKHIRAN PETA KEWILAYAHAN

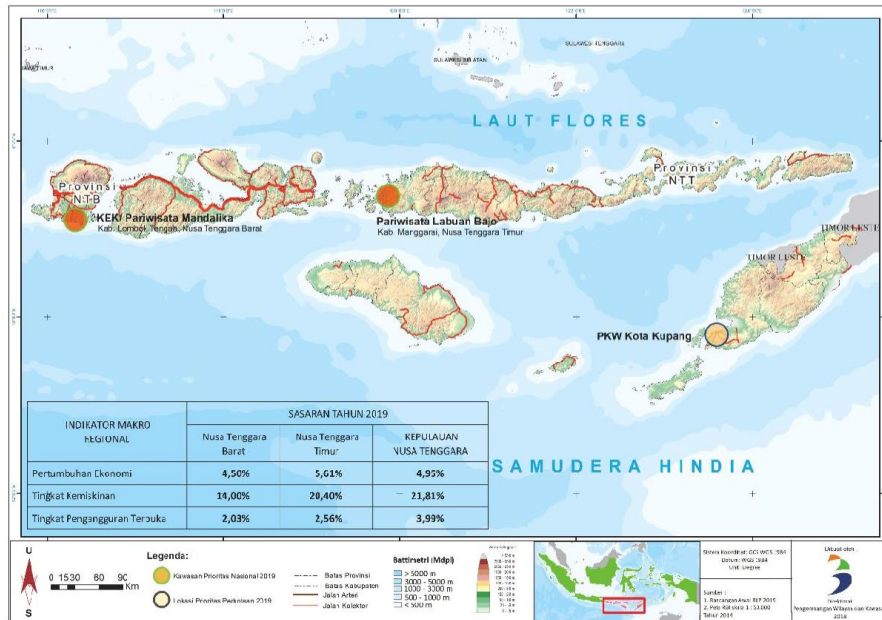
Gambar 2.17 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Papua Tahun 2019



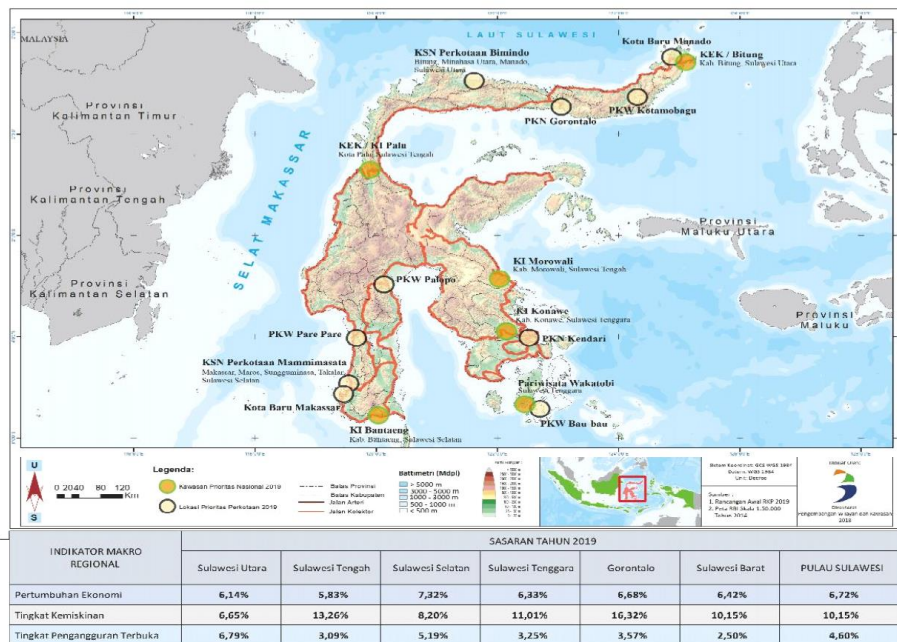
Gambar 2.18 Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku Tahun 2019



Gambar 2.19 Sasaran Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Tahun 2019

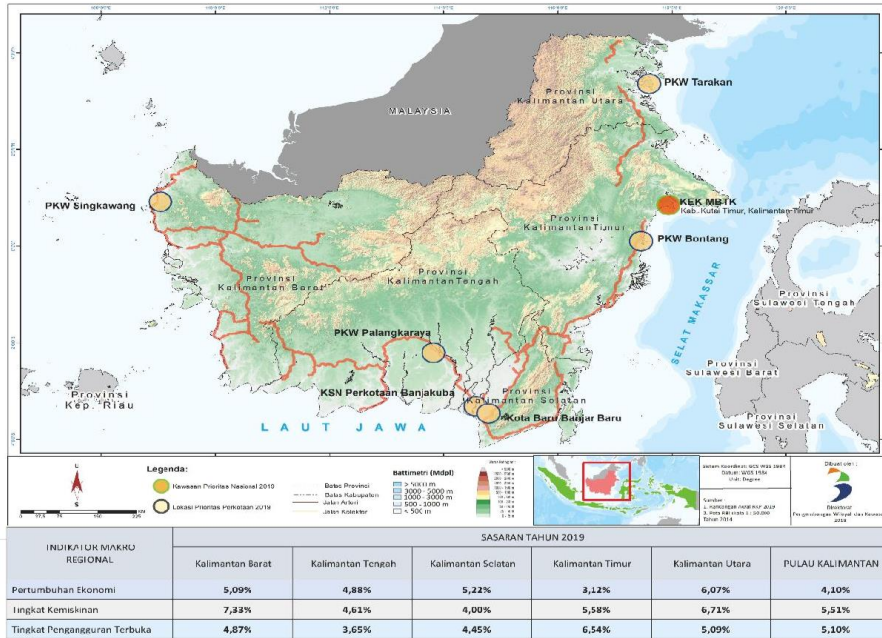


Gambar 2.20 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi Tahun 2019



PP - 3

Gambar 2.21 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan Tahun 2019

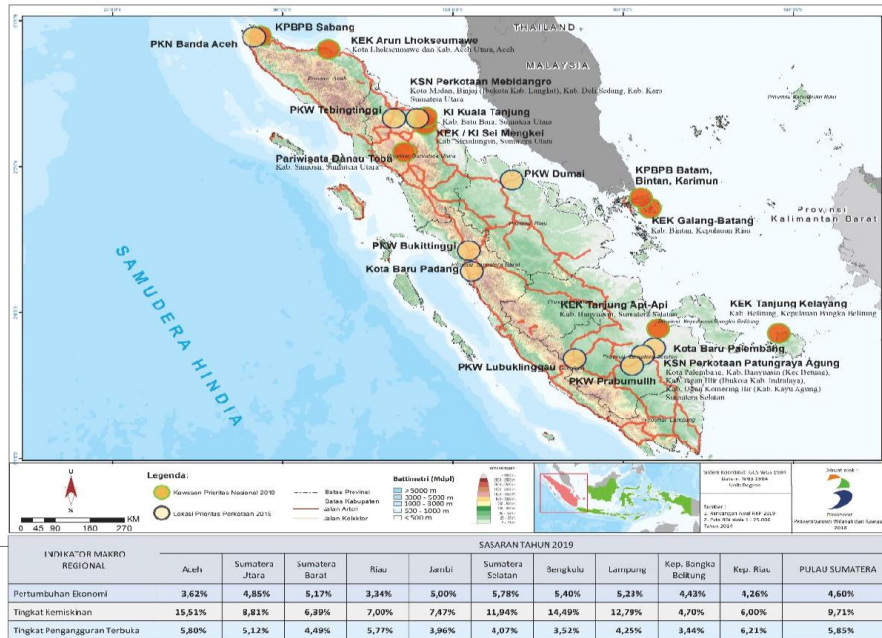


Gambar 2.22 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Jawa dan Bali Tahun 2019

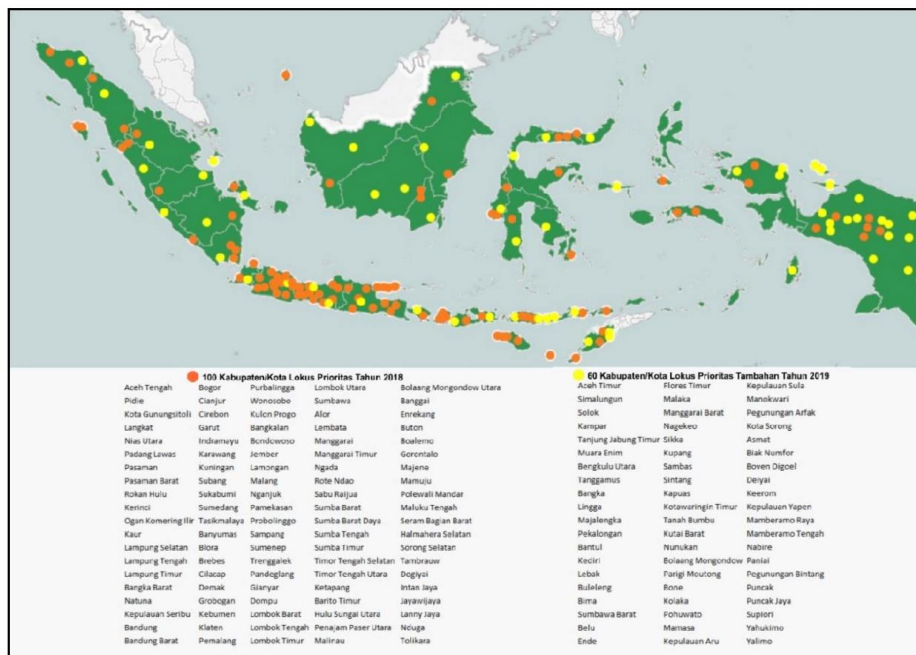


PP - 4

Gambar 2.23 Sasaran Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera Tahun 2019

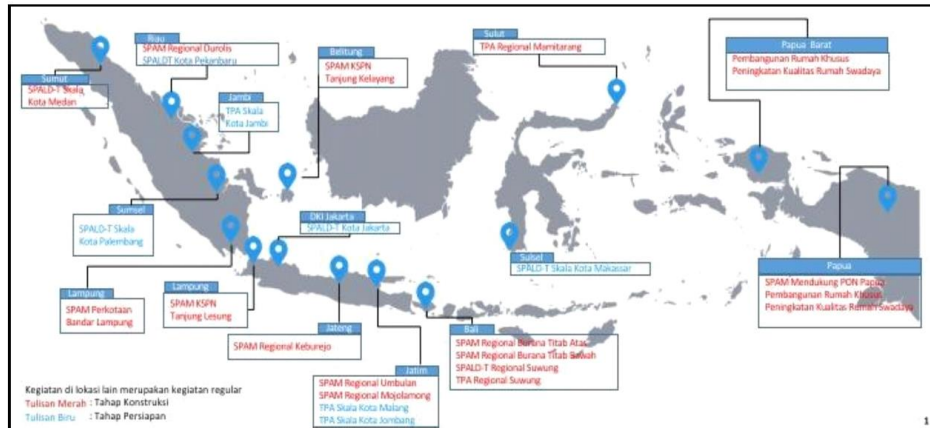


Gambar 4.5 Lokus Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2019

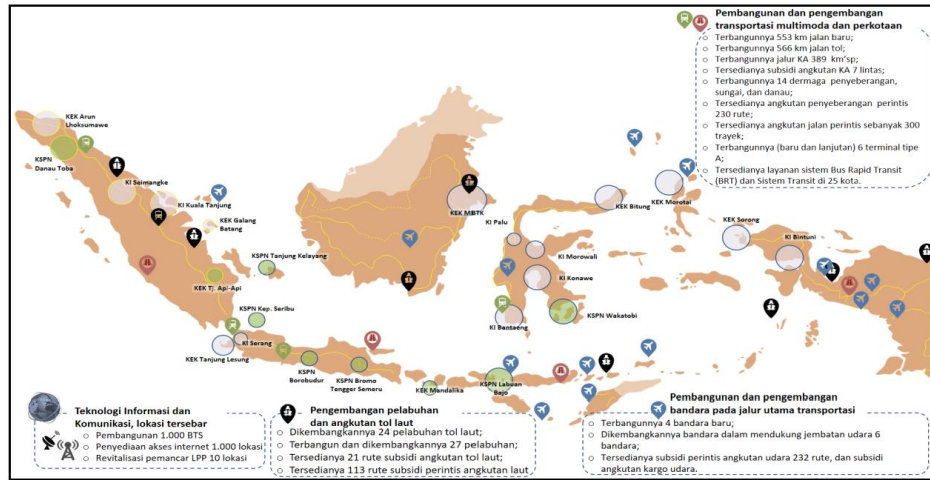


PP - 5

Gambar 4.9 Peta Sebaran Kegiatan PP Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

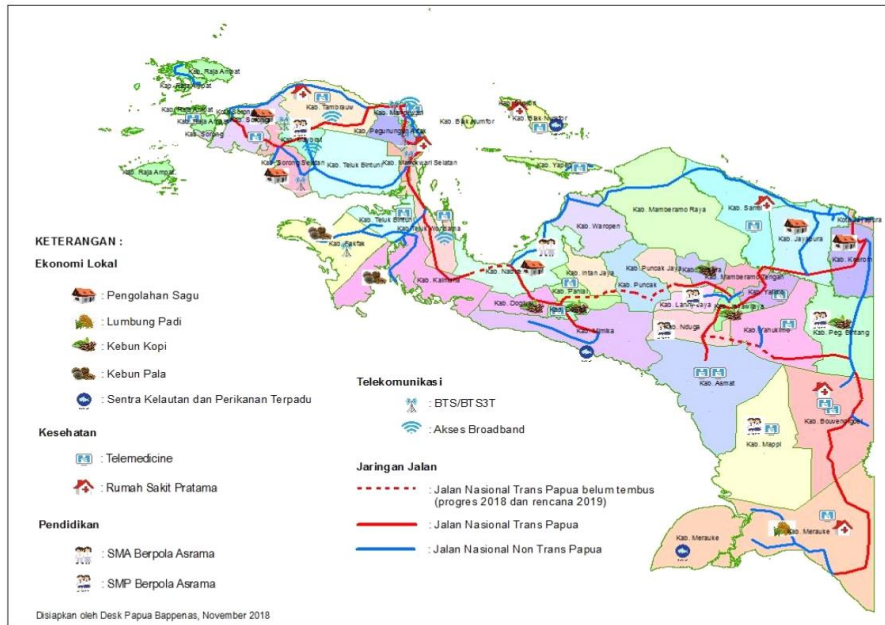


Gambar 4.14 Sebaran Proyek Prioritas PP Peningkatan Konektivitas dan TIK



PP - 6

Gambar 4.16 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat

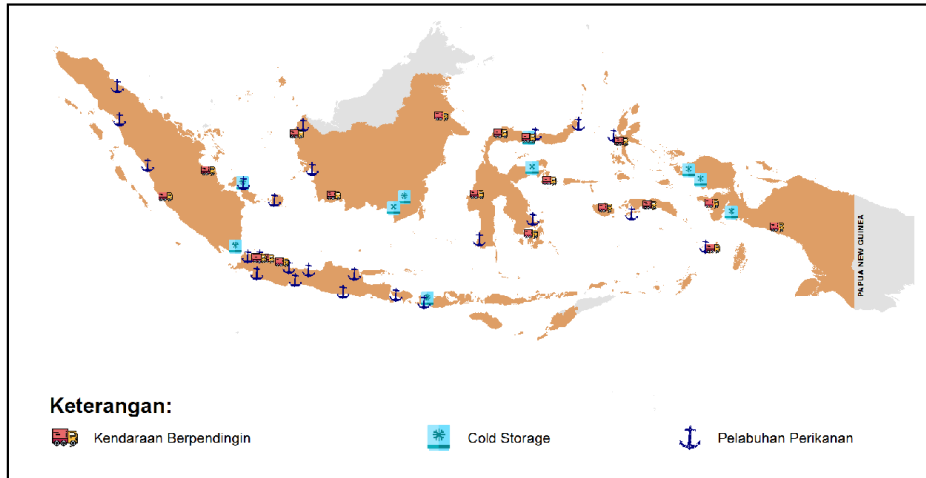


Gambar 4.18 Sebaran Proyek Prioritas PP Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

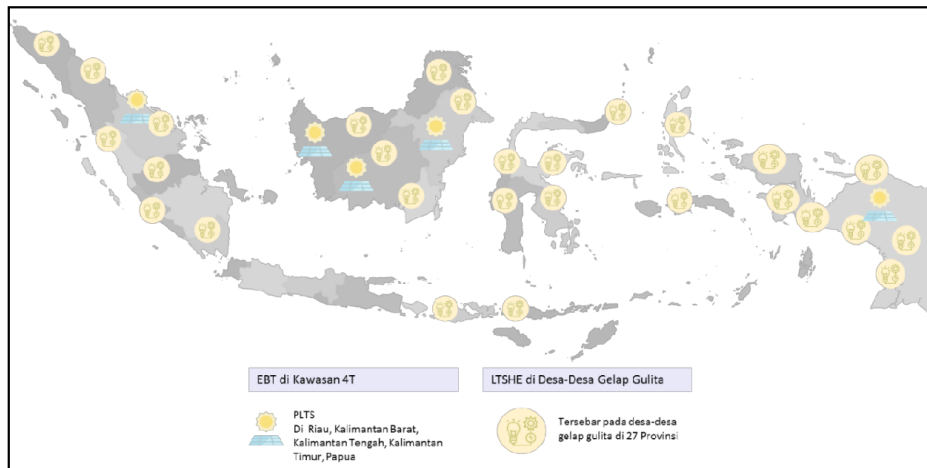


PP - 7

Gambar 4.22 Peta Sebaran Proyek Prioritas PP Sistem Logistik

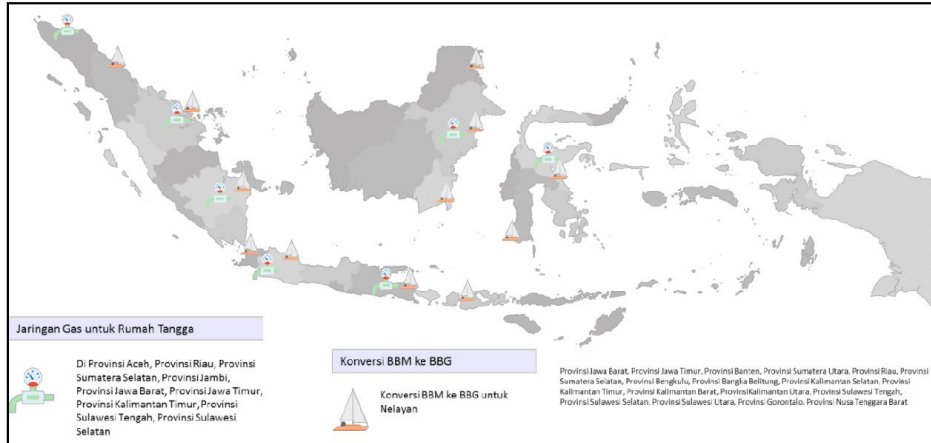


Gambar 4.36 Peta Rencana Pembangunan Energi Baru Terbarukan

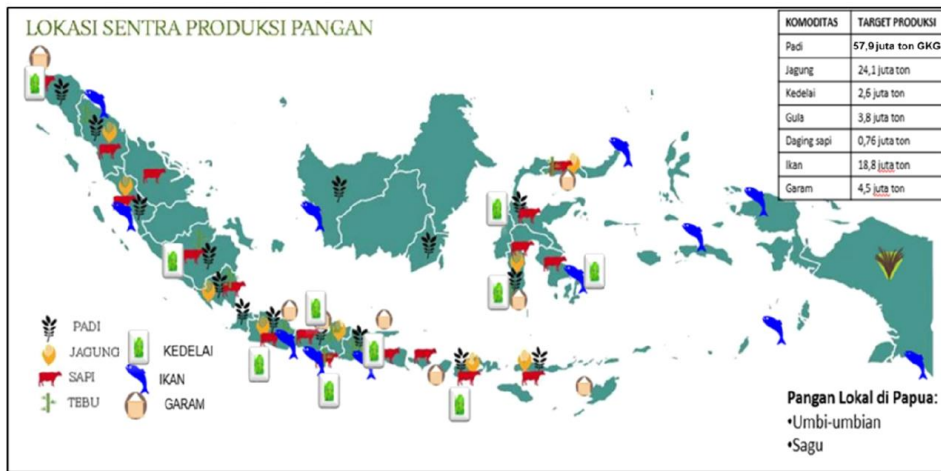


PP - 8

Gambar 4.37 Peta Rencana Pelaksanaan Perluasan Pemanfaatan Gas Bumi



Gambar 4.39 Peta Rencana PP Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan dalam Aspek Kewilayahan



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG PEMUTAKHIRAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

PEMUTAKHIRAN SUPLEMEN INTEGRASI PENDANAAN

- L.1 -

Tabel 1
Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Tahun 2019

PN	Prioritas Nasional	Alokasi Prioritas Nasional (Rp. Triliun)		
		Belanja K/L	KPBU-AP ^{a)}	Jumlah
01	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	205,1	0,0	205,1
02	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	45,6	8,5	54,1
03	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	21,0	0,0	21,0
04	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	43,9	0,0	43,9
05	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	64,5	0,0	64,5
Jumlah		380,1	8,5	388,6

^{a)} Terdapat potensi KPBU lainnya diluar KPBU - AP

Sumber:

a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018

b) KPBU-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018

- L.2 -

Tabel 2
Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Pembangunan Manusia
melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Alokasi Prioritas Nasional (Belanja KL dan KPBU-AP^{a)}) (Rp. Miliar)
Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	74,849,8
Penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan	39,289,0
Penguatan Literasi untuk Kesejahteraan	642,5
Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Akademik	3,907,7
Penyediaan Afirmasi Pendidikan	5,772,9
Penyediaan Pendidik yang Berkualitas dan Merata	25,237,8
Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	15,775,2
Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman	53,3
Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak	5,220,3
Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau	10,501,6
Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	10,190,9
Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan pengendalian penyakit	1,778,3
Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	3,304,5
Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan	583,3
Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi	3,481,2
Percepatan penurunan stunting	1,043,7
Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	965,9
Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	380,7
Penguatan Layanan dan Rujukan Terpadu	507,0
Percepatan Pencapaian SPM di Daerah	78,2
Percepatan Pengurangan Kemiskinan	103,297,1
Pelaksanaan Reforma Agraria	4,103,7
Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial	594,4
Pengembangan Kemitraan Petani, Nelayan, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	606,4
Penguatan Pelaksanaan Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	71,248,5
Penguatan Sistem Jaminan Sosial	26,744,1
Jumlah	205,078,9

^{a)} Terdapat potensi KPBU lainnya diluar KPBU - AP

Sumber:

a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018

b) KPBU-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018

- L.3 -

Tabel 3
Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah
melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Alokasi Prioritas Nasional (Belanja KL dan KPBU-AP^{a)}) (Rp. Miliar)
Penanggulangan Bencana	905,4
Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana	216,7
Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana	389,5
Penguatan Manajemen Kebencanaan	104,7
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	194,5
Peningkatan Konektivitas dan TIK	32,871,7
Pembangunan dan Pengembangan Bandara pada Jalur Utama Transportasi	1,480,9
Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda dan Perkotaan	22,026,7
Pengembangan Pelabuhan dan Angkutan Tol Laut	5,007,9
Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi	1,509,8
Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK	2,846,4
Peningkatan Sistem Logistik	12,103,1
Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian	137,3
Penyediaan Infrastruktur Energi, Sarana Angkut, dan Transportasi Mendukung Sistem Logistik	11,965,8
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	4,578,8
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan	1,655,6
Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi	684,5
Percepatan Pembangunan Desa	2,238,7
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	3,639,0
Pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata hulu hilir	26,2
Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	117,6
Peningkatan infrastruktur dasar, TIK, dan konektivitas antar provinsi, kabupaten/kota, distrik, dan kampung	3,483,7
Peningkatan tata kelola dan kelembagaan	11,4
Jumlah	54,097,9

^{a)} Terdapat potensi KPBU lainnya diluar KPBU - AP

Sumber:

- a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018
b) KPBU-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018

- L.4 -

Tabel 4
Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi
dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata,
dan Jasa Produktif Lainnya

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Alokasi Prioritas Nasional (Belanja KL dan KPBU-AP^{a)}) (Rp. Miliar)
Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	1,255,5
Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas	206,0
Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas	196,1
Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier	307,2
Penyiapan SDM IPTEK (Peneliti, Perekayasa)	546,2
Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	1,975,9
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	197,6
Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	225,1
Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	1,412,1
Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	83,2
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	57,9
Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	6,734,6
Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif	1,013,1
Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	2,301,1
Percepatan Pengembangan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas termasuk 4 KEK Pariwisata dan Penguatan Pemasaran Pariwisata Prioritas	3,216,0
Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan	204,5
Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan	1,118,6
Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik	84,6
Pengembangan dan Peningkatan Investasi Industri Hulu Non Agro dan Pendukung	78,0
Peningkatan Daya Saing Industri Andalan Non Pangan	346,6
Perbaikan Iklim Usaha dan peningkatan Investasi	609,3
Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	9,952,1
Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi	711,0
Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	5,856,4
Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha	2,385,3
Peningkatan Keterampilan Wirausaha	999,4
Jumlah	21,036,6

^{a)} Terdapat potensi KPBU lainnya diluar KPBU - AP

Sumber:

a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018

b) KPBU-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018

- L.5 -

Tabel 5
Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional
Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Alokasi Prioritas Nasional (Belanja KL dan KPBU-AP^{a)}) (Rp. Miliar)
Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	1,230,1
Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup	58,5
Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	388,7
Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Pengawasan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	172,8
Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	610,1
Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air	20,262,3
Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air	5,944,3
Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem	3,619,2
Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif	10,665,6
Penguatan Kelembagaan, Regulasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air	33,2
Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	1,502,2
Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik	5,9
Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	478,5
Peningkatan Efisiensi Energi	0,3
Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri	1,008,5
Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi Lainnya	9,0
Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	20,862,2
Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan	231,6
Penguatan Kelembagaan serta Layanan Pertanian dan Perikanan	1,407,3
Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan	862,1
Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan	6,417,0
Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan	11,944,1
Jumlah	43,856,8

^{a)} Terdapat potensi KPBU lainnya diluar KPBU - AP

Sumber:

a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018

b) KPBU-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018

- L.6 -

Tabel 6
Integrasi Pendanaan Prioritas Nasional Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

Program Prioritas/Kegiatan Prioritas	Alokasi Prioritas Nasional (Belanja KL dan KPBU-AP^{a)}) (Rp. Miliar)
Efektivitas Diplomasi	646,4
Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional	56,1
Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan	114,4
Peningkatan Kualitas Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri	440,1
Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika	35,8
Kamtibmas dan Keamanan Siber	7,231,9
Penanganan Konflik Sosial	278,3
Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	597,0
Penanggulangan Terorisme dan Radikalisme	437,7
Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap	3,889,2
Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Ruang Siber	2,029,6
Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi	1,524,0
Manajemen Talenta Indonesia	14,9
Pelaksanaan e-Government yang terintegrasi	521,6
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	45,8
Penegakan Hukum	941,7
Kesuksesan Pemilihan Umum	24,010,3
Netralitas Birokrasi dalam Pemilihan Umum 2019	17,1
Pengamanan Pemilihan Umum	2,708,0
Penguatan Lembaga Demokrasi	20,075,7
Peningkatan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil	1,209,5
Pertahanan Wilayah Nasional	31,135,2
Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara	715,4
Pengamanan Wilayah Nasional dan Sumber Daya Kelautan	610,8
Penguatan Pertahanan Berdaya Gantar Tinggi	29,809,0
Jumlah	64,547,7

^{a)} Terdapat potensi KPBU lainnya diluar KPBU - AP

Sumber:

- a) Belanja K/L: KRISNA TA 2019 per 28 Nopember 2018 (diolah), 2018
 b) KPBU-AP : Public Private Partnership (PPP) Project Pipeline (diolah), 2018

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO